

KAJIAN KEBIJAKAN POLITIK INTERNASIONAL

Metode, Teori dan Studi Kasus



**Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang No. 28 Tahun 2014
Tentang Hak Cipta**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama **1 (satu) tahun** dan/atau pidana denda paling banyak **Rp100.000.000 (seratus juta rupiah)**.
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama **3 (tiga) tahun** dan/atau pidana denda paling banyak **Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)**.
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama **4 (empat) tahun** dan/atau pidana denda paling banyak **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)**.
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama **10 (sepuluh) tahun** dan/atau pidana denda paling banyak **Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)**.

KAJIAN KEBIJAKAN POLITIK INTERNASIONAL

Metode, Teori dan Studi Kasus

Renny Puspitarini



**KAJIAN KEBIJAKAN POLITIK INTERNASIONAL:
Metode, Teori dan Studi Kasus**

Renny Puspitarini

Copyright@2020

Desain Sampul
Bichiz DAZ

Editor
Tika Lestari

Penata Letak
Dhiky Wandana

Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang
Ketentuan Pidana Pasal 112-119
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
Memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
Tanpa izin tertulis dari penerbit

Diterbitkan dan dicetak pertama kali oleh
CV. Jakad Media Publishing
Graha Indah E-11 Gayung Kebonsari Surabaya
(031) 8293033, 081230444797, 081234408577

 <https://jakad.id/>  jakadmedia@gmail.com

Anggota IKAPI

Perpustakaan Nasional RI.
Data Katalog Dalam Terbitan (KDT)
ISBN: 978-623-7681-54-0
viii + 198 hlm.; 15,5x23 cm

KATA PENGANTAR

Puji syukur, penulis panjatkan ke hadirat Allah atas sifat Rahman dan Rahim-Nya sehingga penulis dapat menuliskan sedikit dari ilmu yang diperoleh kepada manusia. Atas kemudahan dan keselamatan yang diberikan-Nya, penulis dapat menyelesaikan buku ajar ini.

Shalawat dan salam, penulis panjatkan kepada Nabi Muhammad yang telah terpilih sebagai Rasulullah dan menyampaikan peringatan dan berita gembira kepada umat manusia agar dapat lebih dekat menuju keridhoan-Nya.

Buku ini awalnya merupakan intisari penulis sebagai pengajar. Penulis awalnya ingin menulis buku referensi, namun karena berbagai masukan penulis akhirnya mencoba untuk menulis buku ajar dalam mata kuliah Kebijakan Politik Internasional sebagai bentuk perhatian penulis terhadap metode dan teori dalam kajian kebijakan politik internasional yang belum banyak Salinan dalam Bahasa Indonesia. Hal ini yang menjadi salah satu tantangan yang ditemui penulis selama mengajar di perguruan tinggi swasta.

Penulis menyadari bahwa buku ajar ini tidak akan terwujud tanpa kehadiran dan masukan dari berbagai pihak yang telah memotivasi penulis untuk berkarya. Karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setulusnya kepada rekan dosen yang berkenan meluangkan waktu untuk membaca manuskrip tulisan. Penulis juga menyampaikan kepada rekan yang telah berkenan memberi kata pengantar untuk buku ajar ini yang berisi motivasi dan kebanggaan tersendiri bagi penulis.

Tak lupa pula, penulis menyampaikan terima kasih atas kerjasama dan motivasi yang diberikan oleh suami tercinta untuk dapat menyelesaikan buku ajar ini. Penulis juga mengucapkan pada seluruh rekan, kawan rekan dosen yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu serta asisten dosen saya yang berkenan menemani saya berdiskusi hingga tak mengenal waktu. Kehadiran teman diskusi menjadi salah satu semangat bagi penulis untuk menyelesaikan tulisan ini segera. Perhatian kalian dan curahan semangat yang penulis

dapatkan dari kalian semoga dicatat sebagai amalan yang baik di sisi Allah. Semoga apa yang penulis lakukan ini dicatat sebagai amalan yang baik di sisi-Nya.

Probolinggo, 23 Maret 2020

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I : MEMPELAJARI KEBIJAKAN POLITIK	
INTERNASIONAL.....	3
A. Konsep, Metodologi dan Pendekatan	3
B. Pengertian Kebijakan Politik Internasional.....	7
C. Kompleksitas Politik Luar Negeri: Faktor-faktor yang Mempengaruhi sebagai Unit Eksplanasi	9
D. Pengertian Metode dan Pendekatan.....	10
E. Contoh Penerapan Metodologi dan Pendekatan dalam Kajian Kebijakan Politik Internasional	15
BAB II : UNIT ANALISIS DAN UNIT EKSPLANASI.....	19
BAB III : LEVEL ANALISIS INDIVIDU.....	31
A. Konsep dalam Level Analisis Individu	31
B. Faktor-faktor Berpengaruh yang Menjadi Unit Eksplanasi dalam Level Analisis Individu	32
BAB IV : LEVEL ANALISIS NEGARA	45
A. Konsep dalam Level Analisis Negara.....	45
B. Faktor-faktor Berpengaruh yang Menjadi Unit Eksplanasi dalam Level Analisis Negara.....	52
BAB V : LEVEL ANALISIS SISTEM.....	57
A. Konsep dalam Level Analisis Sistem.....	57

B. Faktor-faktor Berpengaruh yang Menjadi Unit Eksplanasi dalam Level Analisis Sistem.....	59
BAB VI : STUDI KASUS KEBIJAKAN POLITIK INTERNASIONAL PRESIDEN AMERIKA SERIKAT DONALD TRUMP	63
A. Menguraikan Kebijakan Politik Internasional Donald Trump di Tengah Perang Dagang AS-China	63
B. Studi Kasus Perang Dagang AS-China 2017-2019.....	67
C. Studi Kasus Kebijakan “ <i>Make America Great Again</i> ”	68
D. Nilai Kepemimpinan Ekspansionisme dalam Kepribadian Presiden Donal Trump	70
BAB VII : MENGURAIKAN KEBIJAKAN POLITIK INTERNASIONAL PRESIDEN TURKI RECCEP ERDOGAN	77
A. Studi Kasus Ekonomi Turki dan Pelemahan Kurs Lira.....	79
B. Studi Kasus Ketegangan Diplomatik AS-Turki	80
C. Nilai Kepemimpinan Ekspansionisme dalam Kepribadian Presiden Reccep Erdogan	82
BAB VIII : MENGURAIKAN KEBIJAKAN POLITIK INTERNASIONAL PUTRA MAHKOTA SAUDI ARABIA MOHAMMAD BIN SALMAN.....	89
A. Studi Kasus Konspirasi Pembunuhan Jamal Khasoggi.....	
B. Studi Kasus Ketegangan Diplomatik di Timur Tengah dan Hegemoni Arab Saudi.....	90

C. Nilai Kepemimpinan Ekspansionisme dalam Kepribadian Putra Mahkota Mohammad bin Salam	92
BAB IX : MENGURAIKAN KEBIJAKAN POLITIK INTERNASIONAL PRESIDEN FILIPINA RODRIGO DUTERTE.....	105
A. Studi Kasus <i>War on Drugs</i>	105
B. Nilai Kepemimpinan Ekspansionisme dalam Kepribadian Presiden Rodrigo Duterte.....	109
BAB X : MENGURAIKAN KEBIJAKAN POLITIK INTERNASIONAL PRESIDEN EMMANUEL MARCON	115
A. Studi Kasus Demonstrasi Rompi Kuning 2018-2019.....	115
B. Studi Kasus Popularitasi Presiden Merosot.....	116
C. Nilai Kepemimpinan Konsiliatif dalam Kepribadian Presiden Emmanuel Macro	116
BAB XI : MENGURAIKAN KEBIJAKAN POLITIK INTERNASIONAL KANSELIR JERMAN ANGELA MARKLE.....	133
A. Studi Kasus Keutuhan Uni Eropa	133
B. Nilai Kepemimpinan Konsiliatif dalam Kepribadian Kanselir Jerman Angela Markle	135
BAB XII : MENGURAIKAN KEBIJAKAN POLITIK INTERNASIONAL PRESIDEN RUSIA VLADIMIR PUTIN	147
A. Studi Kasus Kepentingan Nasional Rusia di Ukraina	147

BAB XIII : KESIMPULAN	175
DAFTAR PUSTAKA	177
BIODATA PENULIS.....	196



Mempelajari Kebijakan Politik Internasional



ALFABETA
PUBLISHING
GROUP







BAB I

MEMPELAJARI KEBIJAKAN POLITIK INTERNASIONAL

A. Konsep, Metodologi dan Pendekatan

Kompetensi akhir yang diharapkan:

1. Menjelaskan konsep dan definisi kebijakan politik internasional
2. Menentukan faktor-faktor yang berpengaruh sebagai unit eksplanasi
3. Menentukan komponen metodologi dan pendekatan yang sesuai

Hubungan internasional belakangan ini didominasi berita yang meletakkan tatanan dunia pada perspektif baru. Presiden Donald Trump terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat. Ia terpilih setelah berhasil mengalahkan kandidat presiden dari Partai Demokrat, Hillary Rodham Clinton dalam pemilihan umum Amerika Serikat (AS) yang digelar pada Selasa, 8 November 2016. Meskipun kalah dalam *popular vote*¹, Donald Trump kemudian dilantik sebagai presiden ke-45 menggantikan Presiden ke-44 Barrack Obama pada tanggal 21 Januari 2017 (Bump, 2017; Sabato, Kondik, & Skelley, 2017). Pemilu AS 2016 lalu mengundang sejumlah pakar politik dan kolumnis yang terdiri atas jurnalis media mainstream di AS untuk menulis. Sabato, Kondik dan Skelley dari Universitas Virginia, Center for Politics, pada tahun 2017 mengawali investigasi kontroversi seputar pemilu AS 2016 yang dirangkum dalam buku berjudul “Trumped: The 2016 Election That Broke All The Rules”.

¹*Popular vote* adalah jumlah akumulasi seluruh suara dari 50 negara bagian AS termasuk Washington DC. AS memberlakukan system *electoral college* yang berdasarkan suara per negara bagian, ditambah penetapan system *winner-take-all* untuk seluruh negara bagian kecuali Maine dan Nebraska – yang memberlakukan system proporsional. Berdasarkan system *electoral college*, terdapat total 538 suara yang diperebutkan dua kandidat. Perhitungan akhir CNN menunjukkan Trump mendapat 290 *electoral vote* sedangkan Hillary mendapat 232 *electoral vote*. Artinya sebanyak 30 negara bagian condong ke Trump, sedangkan sisanya yakni 20 negara bagian condong ke Hillary (Christiastuti, 2016).

Siapapun tidak dapat membayangkan bahkan dunia internasional apabila Donald Trump terpilih sebagai Presiden AS ke-45. Trump telah mendapat popularitas baik sebagai pengusaha maupun sebagai tokoh *reality show* “the Apprentice” (“The Apprentice’ star Donald Trump to NBC: You can’t fire me, I quit - Reality TV World,” 2007b).

Ia memiliki kepribadian yang kontroversial dan mencolok di tengah-tengah dunia bisnis. Pengalamannya sebagai pengusaha properti mengantarkannya pada kesuksesan dalam banyak hal. Kendati tanpa pengalaman birokrasi, Trump kemudian mencoba peruntungan untuk mencalonkan diri sebagai kandidat presiden dari Partai Republik.

Untuk mendapatkan simpati pemilih, Trump sengaja menggodok isu keuangan finansial dan kemerosotan ekonomi sebagai komoditas kampanyenya. Ia juga tidak segan memoles berita palsu sehingga tampak seperti suatu kebenaran. Ia menyangsikan Barrack Obama lahir di Amerika Serikat. Suatu pernyataan yang tidak didasari dengan kebenaran. Pada kenyataannya Barrack Obama lahir di Amerika Serikat. Tidak hanya itu, Trump juga mengindikasikan bahwa Barrack Obama diam-diam adalah Muslim sehingga tidak layak menduduki kursi Presiden. Meskipun pada akhirnya Trump kemudian mengakui kekeliruannya kendati tidak menyertai dengan permintaan maaf dan penyesalan (Sabato et al., 2017).

Bahkan ia secara terang-terangan menggunakan gabungan sentimen rasisme, populisme, dan ultranasionalisme untuk membuatnya sebagai kandidat paling menjanjikan guna membuat Amerika jaya kembali atau dalam bahasa kampanyenya “Make America Great Again!” (Sabato et al., 2017, p. 19). Banyak kontroversi lain seputar pemilu 2016 dan kepribadian Donald Trump yang membuat pengamat politik dan hubungan internasional mengerutkan kening.

Kontroversi Donald Trump adalah salah satu dari situasi hubungan internasional yang menarik. Kontroversi pemimpin

global lainnya berasal dari Presiden Recep Tayyip Erdogan. Erdogan telah memimpin Turki sejak tahun 2003—yang mana saat itu ia menjabat sebagai perdana menteri sampai tahun ketika buku ini ditulis (Jazeera, 2018). Di tangan dia, konstitusi Turki diubah pada tahun 2017 dari sistem parlementer ke sistem presidensiil (Britannica.com, 2019). Hal ini menempatkan presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi karena berperan sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara.

Pengamat politik internasional menyangsikan kualitas demokrasi Turki di bawah pemerintahan Presiden Erdogan. Pengamat politik menilai pemerintahan Erdogan sebagai kombinasi dari menekan kebebasan berpendapat, memenjarakan saingan politiknya, serta menekan kebebasan media di saat yang sama memperluas kekuasaan eksekutif pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya (Anindhita, Arisanty, & Rahmawati, 2016).

Di saat yang sama, negara-negara muslim merasa Presiden Erdogan menjadi simbol kebangkitan politik Islam. Dalam beragam tayangan video di Youtube, ia seringkali mengangkat kebangkitan Islam untuk melawan dominansi Barat (utamanya Amerika Serikat) yang terus menerus mendiskreditkan Islam. Hal ini menjadikan Presiden Erdogan sebagai pemimpin global yang patut menjadi panutan bagi pemimpin negara Islam yang tengah dikerdilkan oleh dominansi Amerika Serikat (Al-Qannuji, 2013).

Salah satu presiden yang juga tidak gentar dengan dominasi Barat ialah Presiden Filipinan Rodrigo Roa Duterte. Ia terpilih menjadi presiden setelah berhasil mengangkat popularitas atas keberhasilannya sebagai Walikota Kota Davao Filipina. Ia memiliki gagasan yang sangat domestik yakni semangat untuk memerangi peredaran obat terlarang di Filipina. Untuk itu ia segera setelah terpilih mencanangkan perang akan narkoba di seluruh kepulauan Filipina (correspondent, 2018a).

Pada mulanya sikap tegas dan penuh kebulatan tekad Presiden Duterte mendapat simpatisannya. Ditambah dengan kepribadiannya yang dekat dengan rakyat dan seolah tak memiliki

batas protokoler dengan rakyatnya, ia disukai hampir oleh seluruh rakyat Filipina (News, 2017; ResetDoc, 2019; Reuters, 2019). Sehingga setiap kampanye dan kebijakan kontroversialnya disambut dengan suka cita.

Namun belakangan ini, popularitas Presiden Duterte mulai goyah (correspondent, 2018c; Miller, 2018). Kampanye perang melawan narkobanya mulai mendapat tantangan sejak beberapa remaja menjadi korban penembakan misterius oleh aparat penegak hukum karena terlibat dalam transaksi obat-obatan terlarang di jalanan. Setidaknya sejak perang atas narkoba dicanangkan, 5000 orang telah menjadi korban penembakan misterius (correspondent, 2018a, 2018b; Ip, 2015).

Pemberitaan media massa terkait kepribadian Presiden Duterte yang tegas dan tanpa pandang bulu bahkan pada terduga narkoba berusia remaja menjadi pemberitaan luas baik di domestik maupun internasional (Marcus, 2018; Timberman, 2019). Di tingkat domestik, popularitas Presiden Duterte mulai goyah dan simpatisannya pun mulai mempertanyakan kewarasan Duterte (Berehulak, 2016; "Presiden Filipina Rodrigo Duterte menyebut bahwa Tuhan itu 'goblok,'" 2019). Sedang di tingkat internasional, muncul tekanan agar Presiden Duterte menghentikan tindakan sewenang-wenangnya dan mengikuti prosedur hukum untuk membuktikan bahwa pelaku benar-benar layak untuk dihukum. Tekanan dunia internasional juga datang dari Presiden AS Donald Trump yang kemudian ditampik oleh Presiden Duterte (France-Presse, 2017). Singkat cerita Presiden Duterte menjadi contoh dari pemimpin yang berani untuk mengambil keputusan paling buruk dalam sejarah kepresidenan pemimpin di Asia Tenggara yang menjadikannya menarik untuk dikaji guna mengetahui arah kebijakan politik internasional negara Filipina.

Tiga contoh di atas adalah warna baru dalam hubungan internasional maupun dalam ranah kebijakan politik internasional. Mengingat informasi tentang hal tersebut masih sedikit maka perlu

ada ulasan sebagai pengantar sehingga dapat memahami kebijakan politik internasional.

Pemimpin kadang membuat keputusan yang membingungkan. Mereka datang dengan kepribadian yang kompleks yang sukar dipahami. Kepribadian ini merupakan formula dari motivasi, kognisi, persepsi, dan pengalaman selama bertahun-tahun.

Bagaimana menjelaskan kebijakan politik internasional? Sejauh ini fokus dari kebijakan politik internasional terletak pada pemimpin sebagai pembuat keputusan dan proses pengambilan keputusan. Namun, di luar itu terdapat banyak variabel yang dapat diteliti dan dijelaskan menggunakan unit eksplanasi yang mempengaruhi dengan perangkat analisis yang sesuai.

Studi kebijakan politik internasional memiliki ruang lingkup yang cukup luas, komprehensif dan spesifik. Inti dari kebijakan politik internasional ialah mempelajari guna memahami tindakan negara-negara dan perilaku negara terhadap negara lain dalam lingkungan dunia internasional (Özkırımlı, 2019).

B. Pengertian Kebijakan Politik Internasional

Pengertian akan membantu kita mengenali langsung apa itu kebijakan politik internasional. Kebijakan politik internasional dianggap sebagai suatu totalitas kebijakan negara terhadap dan interaksi dengan lingkungan di luar batas negaranya (Breuning, 2007). Hudson (2013b) mendefinisikan kebijakan politik internasional sebagai studi terhadap keputusan yang diambil oleh para pengambil keputusan dengan referensi atau dengan sedikit referensi atau setidaknya dengan memahami konsekuensi terhadap entitas eksternal negara bangsa mereka.

Membangun pengertian tentang kebijakan politik internasional dapat juga dilakukan dengan mengenali karakteristiknya. Salah satu karakteristiknya ialah menerapkan rasionalitas. Bahwa dalam mengambil keputusan di antara kalkulasi pilihan yang dimiliki, pemimpin global mengandalkan rasionalitasnya. Rasionalitas yang dimaksud salah satu maknanya adalah berarti bahwa kebijakan

pada hakikatnya terkait dengan akhir dari tujuan yang dimiliki oleh seorang pemimpin negara.

Yang dijelaskan dalam kebijakan politik internasional ialah keputusan atau *decision*. *Decision* ialah keputusan yang diambil dari sejumlah pilihan yang ada (Breuning, 2007). Keputusan ini dapat berasal dari rujukan (referensi) atau dengan mengetahui segala konsekuensi (akibat) yang dapat ditimbulkan pada entitas eksternal-atau negara lain dari kehidupan negara bangsa-dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (hubungan internasional). Kebijakan politik internasional suatu negara dapat ditelusuri dari para pembuat keputusan-bisa presiden maupun kelompok pengambil keputusan tergantung pada isu tertentu (*issue area*), meskipun juga mungkin untuk menganalisisnya dari sekelompok orang yang tidak memiliki posisi tersebut.

Hal yang tidak dipelajari sebagai objek kajian yakni kesalahan (*mistakes*) atau keputusan yang bahkan tidak bisa dikonseptualisasikan memiliki komponen internasional dan atau hubungan internasional. Selain itu yang tidak dapat dipelajari sebagai kajian antara lain tindakan yang tidak memiliki tujuan atau tanpa maksud. Terdapat suatu situasi yang mana kebijakan mungkin dapat dianalisis menggunakan metodologi kebijakan politik internasional tetapi tidak bisa dikaji menggunakan kebijakan publik (domestik). Ada pula jika terdapat kebijakan yang tidak dapat dikaji dalam kerangka kebijakan politik internasional, dan hanya dapat dianalisis menggunakan kebijakan publik (domestik). Penting bagi mahasiswa untuk merenungkan mengapa suatu kasus dapat dianalisis menggunakan kerangka kebijakan politik internasional dan tidak dapat dianalisis menggunakan kerangka kebijakan publik. Serta penting bagi mahasiswa untuk mengenali kebijakan yang hanya dapat dianalisis menggunakan kerangka kebijakan publik saja.

C. Kompleksitas Politik Luar Negeri: Faktor-Faktor yang Mempengaruhi sebagai Unit Eksplanasi

Terdapat kesulitan bagi analis kebijakan politik internasional. Mereka menghadapi situasi yang mana jawaban dari suatu kebijakan politik internasional suatu negara tidak serta merta dapat diperoleh saat itu juga. Jawaban ini terkadang diperoleh setelah mengendap beberapa tahun yang memungkinkan pakar politik internasional membangun penjelasan-penjelasan dari sejumlah evaluasi gagasan dan pikiran. Oleh karena itu, seringkali analis kemudian beralih pada data sejarah atau data saat ini yang mengendap disekeliling pemberitaan dan publikasi internasional baik di media massa maupun di media elektronik. Hal ini merupakan pendekatan yang biasa ditemukan. Oleh karena itu tidak heran jika analis kebijakan politik internasional mengandalkan keputusan yang dimuat melalui media berupa kronologi dari suatu peristiwa. Hal ini yang kemudian dinamai dengan "event data".

Event data memuat antara lain aksi atau tindakan yang menjelaskan apa yang sedang terjadi, catatan waktu, dan catatan peristiwa yang memuat segala informasi relevan yang diketahui tentang peristiwa tersebut termasuk informasi dan entitas yang terlibat seperti penulis, sistem manajemen isi yang berhubungan dengan suatu peristiwa (Wetzler, 2017).

Kebijakan politik internasional juga dapat dikenali dari faktor-faktor yang dapat menjelaskannya. Faktor-faktor ini adalah faktor yang berpengaruh dan mempengaruhi proses pengambilan keputusan dan para pembuat kebijakan. Mengenali faktor tersebut bukan hal yang mudah. Perlu keterampilan dan kepekaan untuk dapat mengenalinya. Sebagai permulaan kita dapat mengenalinya dengan diajak berpikir bahwa faktor-faktor tersebut banyak dan saling mempengaruhi dan dapat saling menjelaskan atau mengantar kita pada penjelasan yang lebih komprehensif. Sehingga tidak salah jika kita berpikir bahwa analisis kebijakan politik internasional membutuhkan analisis yang bersifat **multifaktorial**.

Tak jarang pula analisis kebijakan politik internasional melibatkan lebih dari satu bidang atau satu disiplin. Untuk memahami kepribadian Presiden Donald Trump, misalnya, kita perlu memahami bagaimana konsep psikologi dapat digunakan. Sehingga kita dapat menggunakan metodologi psikobiografi sebagaimana digunakan oleh Post (2010) dan Winter(1996). Dalam bagian berikutnya, mahasiswa akan diajak untuk mengenali terdapat tingkat level analisis yang berguna untuk dapat menjelaskan kebijakan politik suatu negara. Analisis ini meliputi tingkat level analisis individu, negara dan sistem. Karena setidaknya dibutuhkan lebih dari satu level dalam menganalisis, maka seringkali kebijakan politik internasional memerlukan pandangan yang bersifat **multilevel**.

Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi suatu kebijakan luar negeri. Sebagaimana yang telah dibahas, mengkaji politik internasional melibatkan sudut pandang yang kompleks. Mahasiswa diajak untuk berpikir secara multifaktorial, **multidisipliner**, serta multilevel serta di saat yang sama untuk tetap berpegang bahwa kebijakan politik internasional selalu bersifat **agent oriented**. Hal ini disebabkan yang menentukan dan mengambil kebijakan atau putusan ialah mulai dari individual dan sekelompok orang dengan segala kompleksitas yang menyertainya.

Selain itu, analisis juga memerlukan argumen yang **multifacet**. Multifacet artinya mempertimbangkan beberapa sudut pandang, paradigma, pendekatan, maupun pandangan umum terhadap suatu peristiwa yang relevan dengan studi kasus.

D. Pengertian Metode dan Pendekatan

Metode memiliki fungsi yang berbeda dalam setiap penelitian. Namun demikian, tujuan dari adanya metode dan pendekatan adalah sama yakni untuk membedakan penelitian yang bersifat sosial dan terapan. Metode dan pendekatan pada setiap disiplin ilmu sangat unik. Keunikan ini tidak membuat disiplin ilmu berada pada dua kutub yang berbeda. Keunikan dapat dijadikan sebagai

pelengkap penjelasan jika dirasa satu disiplin ilmu belum dapat memberi jawaban yang memuaskan mengenai apa yang sedang terjadi.

“Metode” dalam Kamus Online Tesaurus Indonesia diartikan sebagai penalaran yang memuat cara berpikir, jalan pikir, metode penalaran, penalaran, penalaran awal, penawaran siklus, dan penalaran lanjut. Metode secara umum dapat terdiri atas metode deduksi, penalaran deduktif, induksi, penalaran induktif, silogisme, yang didalamnya menuntun untuk cara yang harus dilalui guna mendapat simpulan atau generalisasi yang mendekati benar (Tesaurus Online Indonesia, 2019).

Breuning mengenalkan tiga cara untuk dapat melakukan kajian. Pertama dengan menggunakan metode psikoanalisis, *leadership trait analysis*(LTA) dan *presidential character*.

Psikoanalisis dilakukan dengan cara meminjam konsep dari ilmu psikologi yang memiliki sejumlah instrumen untuk mempelajari individu serta motivasinya serta pendekatan terhadap pemecahan masalah (*problem solving*) dan pengambilan keputusan (*decision making*) serta pandangan dasar terhadap dunia di sekitarnya (Breuning, 2007, hlm. 37). Ahli psikologi biasanya akan sampai pada pandangan tentang kepribadian melalui eksperimen yang hati-hati dan menyeluruh yang menyediakan pengetahuan ke dalam kecenderungan perilaku manusia. Sebagian besar ahli psikologi menghindari membuat prediksi definitif tentang perilaku seorang individu, tetapi akan memasukkan penilaiannya ke dalam pola kecenderungan perilaku dengan kepribadian para pemimpin. Yang paling penting dalam pendekatan ini dalam kajian politik internasional ialah, terletak pada perbedaannya.

Para ahli psikologi tertarik dengan pengetahuan umum tentang perilaku manusia, sementara kebijakan politik internasional tertarik dalam menilai perilaku individu secara spesifik baik sebagai pemimpin domestik maupun sebagai pemimpin global (Hudson, 2013a).

Analisis kebijakan politik internasional cenderung fokus dalam menilai pemimpin seperti apa secara spesifik seorang individu kira-kira, dan putusan kebijakan luar negeri seperti apa yang dapat diperkirakan diambil oleh pemimpin dengan karakter kepribadian yang demikian.

Ahli psikologi biasanya memiliki akses langsung terhadap individu yang menjadi pasien mereka, sementara analisis kebijakan politik internasional tidak memiliki akses langsung yang berisi catatan medis, perilaku, dan kecenderungan yang dimiliki oleh individu yang bersangkutan. Yang artinya, analisis harus bergantung pada metode tidak langsung.

Menggunakan teknik psikoanalisis bukan hal yang mudah. Kesulitan yang dialami adalah analisis tidak bisa menggantungkan pada pesona publik yang ditampilkan oleh individu (*public persona*). Guna mengatasi hal ini, maka sejumlah strategi diusulkan yakni dengan mempelajari informasi biografi yang dikeluarkan dalam suatu catatan tertulis maupun melalui interpretasi dari aksi publik pemimpin itu sendiri. Selain itu terdapat juga cara dengan mengidentifikasi dan mengenali kepribadian pemimpin melalui pidato-pidato yang dilakukan dan wawancara. Namun sekali lagi, metode ini mengundang kelemahan sendiri karena pidato dapat disusun oleh staf ahli di lingkungan presiden dan metode wawancara dapat dilakukan secara terstruktur.

Metode untuk mengenali kepemimpinan yang kedua ialah dengan menggunakan analisis isi. Analisis isi dapat dilakukan dengan meneliti, mencermati dan mencatat kode operasional yang muncul. Butuh kecermatan dan kepekaan serta pengetahuan yang mendalam serta luas terkait kode operasional tersebut sehingga dapat dikenali dengan baik. Salah satu alat analisis yang dapat digunakan ialah *Profiler Plus* yang dapat diakses di web resminya.

Kode operasional menjadi metode yang bermaksud untuk mendeskripsikan keyakinan mendasar pemimpin yang menyediakannya norma, standar-standar dan panduan untuk mengambil keputusan (Caldwell, 2018; George, 1967). Kode operasional

memang tidak secara langsung memberitahu putusan apa yang diambil oleh pengambil keputusan. Kode operasional menyediakan pengetahuan akan persepsi pengambil keputusan dan evaluasi terhadap dunia serta memprediksi bagaimana pengambil keputusan memperhitungkan manfaat dan risiko dari serangkaian tindakan. Dengan kata lain, kode operasional didesain untuk memungkinkan kita masuk ke dalam cara berpikir pengambil keputusan.

Metode kedua yang dapat dilakukan ialah dengan mengamati karakter presiden (pengambil keputusan tergantung dari bentuk negaranya). Cara ini juga dikenal dengan nama *presidential character* (C. F. Hermann, Studies, & International Affairs Center of, 1969; M. G. Hermann, 1980; M. G. Hermann & Milburn, 1977). Cara melakukan ini adalah dengan menilai sejauh mana pemimpin tersebut aktif? Sejauh mana ia mendedikasikan energi pada urusan kenegaraan? Sejauh mana ia merasa puas dengan apa yang ia lakukan dan bagaimana ia melihat dirinya sendiri secara negatif dalam memenuhi panggilan tugasnya?

Jawaban dari pertanyaan tersebut dapat dituangkan dalam salah satu contoh hasil penelitian yang pernah dilakukan atas presiden-presiden di Amerika Serikat sebagaimana dirangkum dalam tabel di bawah ini:

2. Sejauh mana ia merasa puas dengan apa yang ia lakukan dan bagaimana ia melihat dirinya sendiri secara negatif dalam memenuhi panggilan tugasnya			
1. Sejauh mana ia mendedikasikan energi pada urusan kenegaraan	Aktif	<i>Aktif-Positif</i> Henry S Truman, John F Kennedy, George H W Bush	<i>Aktif-Negatif</i> Lyndon B Johnson, Richard Nixon
	Pasif	<i>Pasif-Positif</i> Ronald Reagan	<i>Pasif-Negatif</i> Dwight D Eisenhower

Kode operasional cenderung condong ditemukan pada tulisan-tulisan atau komentar verbal terekam media.

Berikut adalah salah satu pertanyaan yang dapat membantu mengenali kode operasional sebagai metodologi.

1. Pertanyaan Filosofis	<ol style="list-style-type: none">1. Apa yang menjadi hakikat penting dalam kehidupan politisnya? Apakah ranah politik secara krusial dapat menjadi harmonis atau justru menjadi konflik? Apakah yang menjadi karakter mendasar dari salah satu lawan politiknya?2. Apa yang menjadi prospek guna mewujudkan nilai-nilai politik mendasar dan aspirasinya? Dapatkan ia menjadi pribadi yang optimistis atau harus terlihat pesimistis, dan dalam hal apa?3. Apakah masa depan politik bisa diprediksi? Dalam hal apa dalam tingkat apa?4. Seberapa banyak kontrol atau penguasaan yang dapat ia lakukan atas perkembangan sejarah yang sedang terjadi? Apakah perannya dalam menggerakkannya dan mencetak sejarah kearah yang diinginkan?5. Apa peran “perubahan” dalam urusan manusia dan perkembangannya dalam sejarah?
-------------------------	---

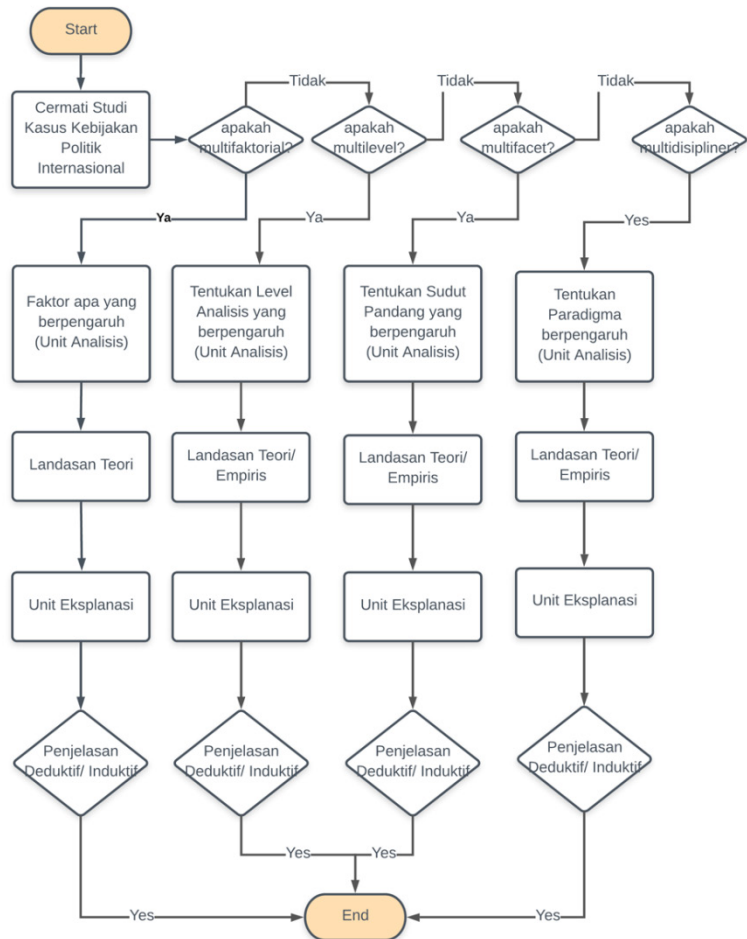
2. Pertanyaan instrumental	6. Apa yang menjadi pendekatan terbaik dalam memilih tujuan politis maupun capaian? 7. Bagaimana tujuan dari suatu aksi dijalankan secara efektif? 8. Bagaimana risiko politis dari tindakan yang diperhitungkan, kontrol atau diterima? 9. Kapankah waktu yang tepat untuk aksi menindaklanjuti kepentingan seseorang? 10. Apa yang menjadi tulis dan peran dari sejumlah maksud untuk meningkatkan kepentingannya?
----------------------------	--

Metode ketiga ialah *leadership trait analysis*. LTA ditemukan dari seperangkat pertanyaan yang menggugah beberapa aspek dari karakter personal pemimpin yang relevan terhadap proses pengambilan keputusan. Tabel di bawah ini menunjukkan tujuh pertanyaan yang digolongkan ke dalam tiga dimensi yang diwakili.

LTA berbeda dengan kode operasional. Terdapat lebih sedikit pertanyaan, dan pertanyaan yang berkaitan langsung dengan kehidupan politik. Salah satu contohnya, instrument yang fokus pada apakah pemimpin yakin dia dapat mengontrol peristiwa yang terjadi dan merasa perlu (C. F. Hermann et al., 1969; M. G. Hermann, 1980; M. G. Hermann & Milburn, 1977).

E. Contoh Penerapan Metodologi dan Pendekatan dalam Kajian Kebijakan Politik Internasional

Metodologi dalam kajian politik internasional cukup bervariasi. Valerie Hudson menyebut metodologi secara kuantitatif dan kualitatif dapat digunakan secara bersamaan maupun secara terpisah tergantung pada preferensi dan kasus yang diteliti. Berikut adalah ringkasan metodologi yang dapat digunakan untuk menganalisis kebijakan politik internasional.



Gambar 1.1
Ringkasan Metodologi yang disimpulkan dari Post (2003),
Hudson (2013), Breuning (2007)

Unit Analisis
&
Unit Eksplanasi







BAB II

UNIT ANALISIS DAN UNIT EKSPLANASI

Kompetensi akhir yang diharapkan:

1. Mengidentifikasi unit analisis berupa dampak secara kualitatif
2. Mengidentifikasi unit eksplanasi berupa faktor-faktor yang berpengaruh secara kualitatif
3. Menentukan dan menggunakan unit analisis dan unit eksplanasi

Setiap kajian ilmu memiliki unit analisis yang unik. Unit analisis dalam kajian politik internasional mengandung maksud unit atau obyek yang dijadikan sumber penelitian. Unit analisis juga mengandung pengertian apa yang akan diteliti, apa yang hendak dijelaskan, dan apa yang hendak dikaji. Menurut Breuning (2007) yang menjadi unit analisis dapat berupa *options*, *decision*, *behavior* dan *outcome*. Kaitannya dapat dipelajari dalam gambar di bawah ini:

Table 1.1 Levels of analysis and the study of foreign policy

<i>Level of Analysis</i>	<i>Foreign Policy Focus</i>
Individual	Options/Decisions
State	Behaviors
System	Outcomes

Bahwa dalam mengenali dan menentukan unit analisis yang dominan, maka kita dapat dibantu dengan tabel di atas. Level analisis individu memuat kajian yang fokus pada pilihan-pilihan dan putusan. Hal ini dapat lebih kita pahami melalui contoh.

Kasus perang dagang Amerika Serikat (AS) dan China misalnya. Presiden Donald Trump beserta dewan penasehatnya sudah merumuskan pilihan-pilihan yang dimiliki untuk mengatasi kelesuan ekonomi (Guardian, 2018). Diskusi dan dialog mengenai sumber kelesuan ekonomi berujung pada sejumlah pilihan-pilihan yang dapat diambil yang diperoleh dengan mengidentifikasi masalah. Pilihan ini adalah pilihan yang terbaik yang dapat dipikirkan untuk mengatasi persoalan.

Kendati persoalan yang cukup kompleks dialami oleh AS (“Silicon or Soy? Targets of the U.S.-China Trade War,” 2019), Presiden Donald Trump tanpa ragu memutuskan untuk menaikkan tarif impor atas produk dari mitra dagang utama yakni China(Wang, 2018). Kenaikan tarif impor dilakukan secara bertahap. Maka berdasarkan studi kasus tersebut dapat ditarik kesimpulan kajian level analisis individu dapat dilakukan dengan menitikberatkan pada serangkaian pilihan yang dimiliki Donald Trump dan bagaimana ia sampai pada putusan untuk memberlakukan kenaikan tarif impor terhadap China atas impor aluminium dan besi.

Menggunakan studi kasus yang sama, maka kita dapat tentukan unit analisis jika menggunakan level analisis negara. Breuning menyarankan untuk fokus pada *behavior* (Breuning, 2007). Sebagaimana telah diuraikan di bagian terdahulu tulisan, yang dimaksud dengan *behavior* adalah bagaimana suatu putusan tersebut dijalankan dalam batas negara dan luar batas negara.

Dengan ini maka kita diajak untuk menelusuri bagaimana putusan perang dagang dijalankan. Untuk memahami ini maka kita dapat melakukan dua cara pendekatan yakni pendekatan *normative theory of rationality* dan pendekatan *empirical theory of rationality*.

Normative theory of rationality memungkinkan kita menggunakan model perilaku rasional (*rational behavior model*) dan menilai perilaku sebenarnya menggunakan model tersebut. Model ini dikenalkan oleh Allison dalam bukunya “*Conceptual Model*”, Simon dalam bukunya “*Human Nature in Politics*” dan Hill dalam “*Changing Politics in Foreign Policy*” (Breuning, 2007, p. 45).

Model ini mengajak kita menelusuri langkah-langkah yang pada umumnya dilakukan oleh seorang pemimpin yakni adalah: (1) bagaimana pemimpin menghadapi situasi krisis yang membutuhkan putusan segera, (2) pemimpin mengartikan dan memaknai situasi tersebut, (3) menginvestigasi pilihan-pilihan, (4) menimbang keuntungan dan kerugian dari setiap pilihan, serta (5) memutuskan pilihan yang dapat mencapai tujuan terbaik dengan resiko seringan mungkin.

Perbandingan dua pendekatan ini dirangkum dalam tabel di bawah ini:

Table 3.1 Comparing normative and empirical rationality

	<i>Normative Rationality</i>	<i>Empirical Rationality</i>
Start with:	A situation that requires a decision	A situation that requires a decision
Process:	1. What are the relevant foreign policy goals? 2. What are my options? 3. What are the advantages (expected benefits) and disadvantages (expected costs) of each option? 4. Make a decision. Choose the option that performs best in the cost/benefit analysis.	1. Who were the relevant decisionmakers? 2. What did they know and when? 3. How did they interpret the information? 4. What options did they perceive as realistic? 5. How did they evaluate those options?
Finish with:	A decision	A decision
Theory or model:	Prescribed decision process serves as standard for judgment.	The decision making process is itself the subject of investigation.
Assumption:	Closely following the prescribed process leads to the best possible decision.	The quality of the process is related to the quality of the decision. (We want to be able to repeat good decision making and learn to avoid bad decision making.)

Pendekatan *empirical theory of rationality* memungkinkan kita mengevaluasi putusan yang diambil oleh individu secara kualitatif yang luput diinvestigasi oleh *normative theory of rationality*.

Adapun penjelasan harus memuat jawaban dari pertanyaan sebagai berikut: (1) mengenali siapa pembuat keputusan yang paling relevan dengan kebijakan dengan isu area tersebut, (2) apa yang diketahui dan kapan serta bagaimana, (3) bagaimana pembuat keputusan membaca, mengartikan dan memaknai informasi tersebut, (4) pilihan

apa yang dianggap cukup realistis, (5) bagaimana pembuat keputusan mengevaluasi pilihan-pilihan yang ada, (6) proses pengambilan keputusan sendiri merupakan subyek investigasi (artinya hal sumber investigasi secara menyeluruh).

Model ini kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang mengandung bahwa kualitas proses pengambilan keputusan juga menentukan kualitas putusan yang diambil itu sendiri. Salah satu motivasi utama pendekatan ini adalah, pengambil keputusan selalu sedapat mungkin mengambil keputusan paling baik dan berkualitas dan menghindari mengulang keputusan buruk yang tidak berkualitas.

Breuning juga menjelaskan kaitannya penyebab yang terdiri atas faktor-faktor dan dampaknya dalam gambar di bawah ini:

Table 1.3 Foreign policy analysis and social scientific terminology

Factors that contribute to the occurrence of foreign policy decision, behavior, or outcome	→	Foreign policy decision, behavior, or outcome (the thing to be explained)
Causes	→	Effect
Independent variables	→	Dependent variable

Yang dimaksud *options* adalah pilihan-pilihan yang dimiliki para pengambil keputusan terhadap suatu isu internasional yang terkait dengan kebijakan suatu negara terhadap dan pada interaksi negara lain di lingkungan sekitarnya.

Sedangkan yang dimaksud dengan *decision* ialah pilihan yang diambil. Pilihan yang diambil ini mesti melalui suatu proses pertimbangan yang melibatkan informasi yang relevan dan spesifik dan teruji kebenarannya. Setelah suatu putusan diambil, maka putusan itu mesti dijalankan.

Putusan yang dijalankan inilah yang disebut dengan tindakan atau *behavior*. Sedangkan keluaran dari kebijakan sangat tergantung pada interaksi dari negara lain yang terpengaruh dan atau berkepentingan dengan kebijakan tersebut. Dengan demikian, yang dapat diteliti dalam kajian ialah pilihan yang dimiliki oleh pengambil keputusan,

pertimbangan terkait informasi dan prioritas dalam mengambil suatu pilihan untuk dijadikan putusan. Dan tindakan atau perilaku negara dalam menjalankan suatu putusan yang disebut dengan *behavior*. Selain itu menarik untuk mengetahui bagaimana negara lain merespons kebijakan tersebut.

Konsep yang digunakan dan diteliti dalam analisis kebijakan luar negeri yakni *decision* atau putusan yang diambil oleh pengambil keputusan manusia dengan merujuk pada konsekuensi dari entitas eksternal maupun tanpa rujukan sama sekali. Putusan yang demikian dapat meliputi bentuk tanpa aksi maupun tanpa putusan sama sekali. Artinya, putusan atau kebijakan luar negeri dapat berupa aksi atau tanpa aksi. Juga dapat berupa suatu putusan maupun tanpa putusan.

Pakar hubungan internasional dapat meneliti suatu konstelasi putusan yang diambil dengan merujuk pada suatu situasi. Tidak hanya itu, putusan juga dapat berubah sepanjang waktu, dibingkai, dan persepsi ke tahap lebih lanjut dari suatu keinginan untuk memprioritaskan tujuan, perencanaan mendatang, dan penilaian atas pilihan-pilihan yang ada. Terakhir, analisis politik luar negeri secara konvensional tertarik untuk menganalisis putusan yang diambil oleh manusia yang memiliki posisi dan wewenang untuk melaksanakan kebijakan luar negeri negara, meskipun sangat mungkin juga menganalisis putusan pada pelaku yang tidak memegang putusan tersebut juga (Hudson, *et al*).

Sedang hal yang tidak diteliti dan tidak dijelaskan dalam analisis kebijakan luar negeri adalah kecelakaan atau kesalahan atau putusan lain yang tidak dapat dikonseptualisasi sebagai memiliki komponen internasional. Dengan kata lain, disebut suatu tindakan yang tidak memiliki tujuan. Misalnya, suatu tindakan atau putusan yang tidak dapat dianalisis dengan kajian kebijakan luar negeri, namun sangat mungkin dapat dianalisis menggunakan analisis kebijakan publik. Akan tetapi, konseptualisasi dan metodologi yang digunakan dalam analisis kebijakan luar negeri barangkali dapat digunakan untuk meneliti dan menjelaskan putusan kebijakan publik. Oleh karena itu dengan mempelajari analisis kebijakan luar negeri, dapat juga membantu

untuk menganalisis pelaku pengambilan kebijakan daripada hanya meneliti pada substansinya.

Perlu diketahui dalam wacana kebijakan luar negeri, yang dimaksud dengan putusan yang sebenarnya tidak langsung dapat diobservasi oleh analis begitu saja. Terkadang, maksud dari kebijakan luar negeri tersebut masih tersirat dan hanya dapat dicari penjelasan utuhnya bertahun-tahun setelahnya. Dalam banyak kasus, hal ini berarti analis bekerja dan fokus pada data sejarah (*historical data*), atau data saat ini (*contemporary data*) dari sumber-sumber publik yang mana informasi dapat menjadi akurat atau sedikit akurat. Mengenali situasi ini, maka pendekatan paling umum adalah dengan menggunakan catatan putusan yang tertinggal di berbagai media cetak yang memuat kronologi. Hal ini pula disebut dengan “kronologi peristiwa” dan data yang dihasilkan dengan mengumpulkan catatan peristiwa tersebut kemudian lazim disebut dengan “data peristiwa”.

James Rosenau mengajak untuk membangun teori *d* dan teori multilevel yang dapat menjadi salah satu uji yang menyusun dasar kajian perbandingan politik luar negeri (PPLN). Kebijakan luar negeri menurutnya tidak dapat dikaji secara utuh sebaik ilmu perilaku kebijakan luar negeri. Dalam kajian perilaku kebijakan luar negeri terdapat variabel event yang terdiri dari unsur “siapa mempengaruhi apa, dan bagaimana” atau *who does what to whom, how*.

Dengan berpedoman pada konseptualisasi di atas membantu peneliti perbandingan politik luar negeri dan analisis kebijakan luar negeri melakukan reduksi data. Sehingga data yang tidak mengandung unsur siapa melakukan apa pada siapa dan bagaimana, perlu dikesampingkan dari metodologi penelitian. Tidak hanya itu, ada tidaknya dampak kebijakan terhadap perkembangan situasi politik internasional juga menjadi faktor keempat yang patut diikutsertakan. Sejumlah faktor dan pola menjadi variabel independen yang dapat diikutsertakan dalam usaha mendapat penjelasan dan menyusun rasionalitas.

Events data juga dapat dikumpulkan menggunakan metodologi penelitian analisis data kuantitatif. Caranya adalah dengan memberi

kode dan membuat pedoman kode. Pedoman kode dapat berupa identifikasi peristiwa dan eskalasi peristiwa. Misal seperangkat kode bisa bekerja sebagai berikut, angka “1” dapat menjadi penanda tindakan militer, angka “3” dapat menandakan adanya tindakan permusuhan, dan angka “7” dapat mengindikasikan model invasi yang lebih spesifik. Sehingga suatu peristiwa dapat ditandai dengan angka “317” tergantung selera peneliti namun tetap sistematis dan dapat diukur. Sehingga perangkat data peristiwa dapat berisi ribuan bahkan jutaan variasi kode yang masing-masing merupakan suatu “peristiwa” kebijakan luar negeri.

McClosky (1962) menyebut salah satu kompleksitas besar dari analisis kebijakan luar negeri adalah mengatasi kekurangan yang ditemukan dalam proses mencari jawaban yang mendekati benar. Proses mencari jawaban ini melibatkan suatu desain riset yang membutuhkan peneliti untuk mengumpulkan informasi rinci tentang persoalan yang sangat luas dalam sistem sosial, sistem ekonomi, situasi hubungan internasional, aktor, persepsi, motivasi, nilai, tujuan dan sasaran, problem komunikasi, kepribadian dan sebagainya yang harus dicakup peneliti agar peristiwa pengambilan putusan kebijakan luar negeri mendapat penjelasan yang utuh. Bukan hal mudah untuk dapat dipenuhi meskipun peneliti memiliki keinginan kuat untuk menginvestasikan energinya. Jika peneliti tidak cukup teliti, maka ia tidak cukup puas hanya pada kumpulan data yang berisi banyak variabel yang signifikansinya hanya dapat dipahami dan dibaca peneliti dan pengaruhnya hanya dapat diukur peneliti yang bersangkutan.

Oleh karena itu tidak mengherankan apabila analisis kebijakan luar negeri membutuhkan kesadaran bahwa yang akan diteliti (*unit analisis*) dan unit penjelasnya bersifat **multifaktorial**, **multilevel**, **multidisipliner**, berhubungan dengan teori orientasi agen, bersifat kekhususan pada aktor tertentu.

Hudson merinci hubungan antara unit analisis dan contoh unit eksplanasi terkait. Kesemuanya dijelaskan dalam gambar di bawah ini:

Table 1.1: Major Levels of Analysis in FPA

Cognitive Processes	Effects of cognition, learning, emotion, illness, heuristic fallacies, memory, problem representation, etc.
Leader Personality and Orientation	Approaches include operational code analysis, studies of motivations, psychobiography, leader foreign policy orientation studies, etc.
Small Group Dynamics	Small group structures and processes, coalition theory, groupthink and newgroup analysis, etc.
Organizational Process	Examination of incremental learning, standard operating procedures, implementation issues, organizational culture, etc.
Bureaucratic Politics	Major concepts include turf, morale, budget, influence, interagency group politics, etc.
Culture and Identity	Approaches include role theory, nationalism and identity politics, investigation of identity through history and discourse, value preferences, action templates, etc.
Domestic Political Contestation	Examination of regime type, political interest groups, the two-level game, electoral politics, public opinion, media studies, etc.
National Attributes	Factors here may include geography, national resources, economic variables such as level of development or patterns of trade flow, etc.
Regional and International Systems	Regional and international distributions of power, anarchy and its mitigation by international regimes, longstanding enmities and friendships, etc.

Yang dimaksud dengan **multifaktorial** ialah kenyataan bahwa analisis kebijakan luar negeri tidak hanya dapat mempertimbangkan satu faktor saja. Penjelasan dapat diambil jika menggabungkan, mempertimbangkan dan memperhitungkan seluruh faktor yang berhubungan. Hal ini bermanfaat untuk menarik suatu penjelasan yang utuh dan diperkuat oleh banyak penjelasan lain yang berhubungan.

Yang dimaksud dengan multilevel, ialah kenyataan bahwa analisis kebijakan luar negeri tidak cukup hanya mendapat penjelasan dari satu tingkat analisis misalnya tingkat analisis individu saja, tingkat analisis negara atau domestik saja, maupun tingkat analisis sistem semata. Penjelasan yang disampaikan menggunakan analisis kebijakan luar negeri akan menjadi utuh dan komprehensif apabila mempertimbangkan dan mengukur seluruh tingkat analisis yang dapat digunakan.

Hal yang sama dimaksud dengan multidisipliner. Mempelajari kebijakan luar negeri tidak hanya dapat mengandalkan ilmu atau pengetahuan yang diperoleh dari ilmu hubungan internasional. Ilmu-ilmu lain juga sama pentingnya untuk dapat digunakan meneliti kebijakan luar negeri. Salah satu ilmu yang paling dominan ialah ilmu ekonomi, ilmu sosial, ilmu psikologi yang bermanfaat masing-masing dalam memberi penjelasan yang spesifik namun masih berkaitan. Variasi ilmu yang digunakan ini akan sangat bergantung pada area isu yang mana kebijakan tersebut berhubungan.

Teori orientasi agen mengenalkan bahwa pusat studi analisis kebijakan luar negeri adalah pelakunya. Pelaku ini adalah manusia yang mana mengambil putusan melalui proses mengolah informasi dan menimbang dampak dan konsekuensi dari putusan tersebut. Teori orientasi agen mengingatkan bahwa pelaku dari masing-masing negara yang mana kebijakan luar negeri diambil dan menjadi sasaran, maka penting untuk mempelajari setiap pelaku penting kebijakan luar negeri pada berbagai negara yang berbeda.

Kekhususan aktor, yang dimaksud, yakni seluruh sumber kebijakan luar negeri dan perubahan dalam politik internasional sangat bergantung pada pelaku yang memanfaatkan agen di mana mereka berada untuk berbuat secara individual atau bertindak dalam grup kecil yang bertanggung jawab mengeluarkan putusan kebijakan luar negeri.

Unit analisis memiliki sejumlah pengertian. Michael le roy (Roy & Corbett, 2008) menyebut sebagai subyek penelitian yang datanya kita miliki. Morris (Morris, 2006) menyebut unit analisis sebagai keseluruhan entitas yang diteliti. Breuning (Breuning, 2007) menyebut unit analisis sebagai unit yang menjadi fokus kajian atau penelitian

Unit analisis menurut Breuning terdiri atas unit analisis individu, unit analisis negara dan unit analisis system. Unit analisis menurut Breuning yang mengutip terdiri atas akibat atau *outcome* kebijakan.

Yang dimaksud dengan analisis individu ialah individu sebagai hal yang diteliti dan dikaji. Apa yang menjadi unit yang dapat menjelaskan individu terdiri dari banyak konsep. Konsep ini dapat ditemukan

dengan meminjam konsep atau variabel yang utamanya digunakan oleh Breuning, Hudson, Jerrold Post, Winter, Margareth Hermann, dan Charles Hermann. Unit analisis negara, dengan analisis negara ialah individu sebagai hal yang diteliti dan dikaji. Unit analisis sistem, memahami system yang saat itu terbangun dalam suatu tatanan dunia. Lebih lengkapnya tentang unit eksplanasi ini akan dijelaskan pada bagian lain dari tulisan ini.

Level Analisis Individu



JAKAD
PUBLISHING
GROUP







BAB III

LEVEL ANALISIS INDIVIDU

Kompetensi akhir yang diharapkan:

1. Mengidentifikasi level analisis individu berupa *options* dan *decisions*
2. Mengidentifikasi level analisis berupa faktor-faktor yang berpengaruh secara kualitatif dan unit yang dapat dijadikan penjelasannya (unit eksplanasi)

A. Konsep dalam Level Analisis Individu

Level analisis individu diartikan sebagai fokus penelitian yang menitikberatkan pada pilihan-pilihan yang dimiliki oleh pembuat keputusan secara individu maupun kolektif dan putusan yang diambil dalam kaitannya dengan kajian politik internasional (Breuning, 2007, hlm. 19). Level analisis individu berusaha menjelaskan bagaimana kepribadian, motivasi, keyakinan dan karakter individu mempengaruhi ia dalam memproses suatu informasi sehingga menghasilkan pilihan-pilihan dan akhirnya membuat keputusan.

Unit eksplanasi kepribadian dapat dikenali dengan mencermati proses kognisi yang terjadi di dalam dirinya. Yang dimaksud dengan proses kognisi adalah bagaimana individu memproses segala informasi yang ia terima dalam suatu proses berpikir sehingga ia dapat menyusun pertimbangan dalam mengambil suatu pilihan menjadi suatu putusan. Adapun unit eksplanasi dalam proses kognisi sebagaimana ditulis oleh Hudson (2007, hlm. 34) mencakup pengaruh kognisi, pembelajaran yang pernah ia alami di bangku pendidikan atau berdasarkan pengalaman dan atau pelatihan yang pernah diikuti (C. F. Hermann & Studies, 1969; M. G. Hermann, 1980), emosi, sakit atau sehatnya (*illness*), praduga dapat terdiri atas stereotip dan bias, ingatan (trauma), persoalan lain dan

lainnya dapat menentukan kepribadian, motivasi, keyakinan serta karakter yang dimiliki oleh individu pembuat keputusan sehingga ia cenderung mengambil pilihan A daripada mempertimbangkan pilihan lain yang tersedia.

Kepribadian presiden dan orientasi yang dapat menjadi unit analisis dalam kajian menggunakan level analisis individu. Sedangkan hal yang dapat menjelaskannya atau berperan sebagai unit eksplanasinya adalah pendekatan yang dapat digunakan dalam menentukan kode operasional (*code operational*) yang relevan, studi motivasi sesuai dengan teori yang berkembang dalam bidang ilmu psikologi dengan menggunakan pendekatan psikobiografi (Post, 2010; Winter, 1996) dan psikoanalisis (Breuning, 2007). Selain itu yang menjadi unit eksplanasinya yang lain dapat berupa studi orientasi (motivasi) pemimpin luar negeri. Namun demikian, uraian ini tidak membatasi adanya peluang unit eksplanasi lain yang dapat digunakan dan relevan dengan setiap studi kasus pada masing-masing negara yang ingin diteliti.

Keduanya, yakni proses kognisi dan orientasi serta kepribadian pemimpin dapat menjadi landasan teori fundamental untuk dapat digunakan mengkaji kebijakan politik internasional menggunakan level analisis individu dengan komprehensif.

B. Faktor-faktor Berpengaruh yang Menjadi Unit Eksplanasi dalam Level Analisis Individu

Berdasarkan ulasan pada bagian tulisan sebelumnya, maka kita mendapat pengetahuan mendasar yang bermanfaat untuk menentukan faktor-faktor yang berpengaruh menjadi unit eksplanasi dalam level analisis individu.

Menggunakan landasan teori level analisis individu yang mana unit eksplanasinya adalah individu, maka kita dituntun untuk fokus pada kepribadian presiden, motivasi presiden, keyakinan mendasar yang dimiliki presiden serta karakter yang unik dan melekat pada presiden tersebut.

Dalam menjelaskan kepribadian presiden, kita dapat menelusuri proses kognisi yang terjadi dengan mencocokkan dengan karakter presiden tersebut.

Terdapat sejumlah teori kepribadian yang dapat kita gunakan. Pertama, menggunakan teori kepribadian yang dikenalkan dan dikembangkan oleh Jerrold Post dalam 21 penelitiannya dengan Badan Intelijen Amerika Serikat pada masa perang dingin. Jerrold Post menghabiskan waktunya untuk meneliti dan membandingkan kepribadian yang dimiliki oleh Presiden Iraq Saddam Husein dan Presiden Amerika Serikat saat itu yakni Presiden Bill Clinton (Post, 2010).

Hasil penelitiannya menghasilkan dua tipe kepribadian yang dikenal dengan konsep kepribadian ekspansionisme dan konsep kepribadian konsiliatoris. Adapun tipe kepribadian ekspansionisme sangat lekat dengan karakteristik sebagai berikut punya keyakinan besar terhadap diri sendiri dapat mengontrol situasi di lingkungan eksternal tempat ia berada, punya ambisi untuk memperluas kekuasaan yang ia miliki (M. G. Hermann, 1980).

Ia juga menambahkan ciri pemimpin yang konsiliatoris yang karakteristiknya berlawanan dengan pemimpin yang ekspansionisme yakni mengedepankan hubungan harmonis dan kerjasama dengan negara lain. Pemimpin yang konsiliatif meyakini situasi dapat dikontrol dengan mengajak kerjasama dengan negara lain untuk mengatasinya, sehingga ia tidak percaya dirinya sendiri dapat mengontrol situasi eksternal yang berlangsung di sekitarnya. Hal ini selaras dengan kepribadiannya yang tidak cukup ambisius dalam meluaskan atau melebarkan pengaruh dan kekuasaannya kepada negara lain di luar batasnya. Pemimpin konsiliatif juga sangat identik dengan proses kognisi yang berlangsung dengan tingkat kerumitan yang tinggi. Hermann (1980) menyebutnya dengan kepribadian dengan tingkat kompleksitas informasi yang tinggi. Dalam kamus the saurus, pribadi konsiliatoris juga lekat dengan sebutan "peacemaker" dan "mediator".

Sedangkan kepribadian yang ekspansionisme memiliki kecenderungan dengan proses kognisi yang rendah yang mengandung arti dalam terdapat tingkat kerumitan yang rendah dalam mengolah informasi di sekitarnya untuk mengambil suatu putusan.

Dalam memperdalam level analisis individu, Breuning mengenalkan tiga metodologi dalam mengetahui kepribadian pengambil keputusan individu. Ia merinci ketiga metodologi tersebut terdiri atas “operational code” dalam metodologi psikoanalisis, “presidential character”, dan “leadership trait analysis”.

Metode kode operasional memberi pengetahuan fundamental dan mendasar tentang kecenderungan perilaku kebijakan politik internasional dari pemimpin suatu negara (Breuning, 2007, hlm. 38; Leites, t.t.). Metode ini adalah salah satu metode yang pernah digunakan dengan menerapkan konsep psikologi ke dalam studi pemimpin-pemimpin di dunia.

Table 2.2 The operational code: determining the philosophical and instrumental beliefs of leaders

A. Philosophical Questions	<p>1. What is the “essential” nature of political life? Is the political universe essentially one of harmony or conflict? What is the fundamental character of one’s political opponents?</p> <p>2. What are the prospects for the eventual realization of one’s fundamental political values and aspirations? Can one be optimistic, or must one be pessimistic on this score; and in what respects the one or the other?</p> <p>3. Is the political future predictable? In what sense and to what extent?</p> <p>4. How much “control” or “mastery” can one have over historical development? What is one’s role in “moving” and “shaping” history in the desired direction?</p> <p>5. What is the role of ‘chance’ in human affairs and in historical development?</p>
B. Instrumental Questions	<p>1. What is the best approach for selecting goals political or objectives for action?</p> <p>2. How are the goals of action pursued most effectively?</p> <p>3. How are the risks of political action calculated, controlled, and accepted?</p> <p>4. What is the best ‘timing’ of action to advance one’s interests?</p> <p>5. What is the utility and role of different means for advancing one’s interests?</p>

Kode operasional sangat kuat mendasarkan metodologinya pada psikoanalisis. Metodologi ini fokus untuk mempelajari keterkaitan kode seperti keyakinan mendasar, norma, standar dan pedoman pengambil keputusan terhadap kepribadian mereka dan kecenderungan mereka mengambil suatu putusan. Kode operasional tidak memberitahu secara spesifik kepada kita apa yang akan diputuskan oleh individu. Melainkan memberi kita wawasan ke dalam persepsi yang dimiliki individu dan penilaian mereka terhadap dunia disekitarnya dan dunia internasional dalam interaksi dengan negara-negara, serta memperkirakan bagaimana seorang individu menimbang resiko dan keuntungan dari setiap aksi yang diambil dan putusan yang dijalankan. Intinya kode operasional membantu kita memahami dan meletakkan kita pada pola pikir dan ke dalam pikiran individu tersebut.

Presidential character adalah salah satu unit analisis yang dapat membantu mengkaji politik internasional menggunakan level analisis individu. *Presidential character* meliputi unit eksplanasi yang terdiri atas meneliti secara kualitatif sehingga dapat menggolongkan pemimpin ke dalam empat golongan yakni: **(1) aktif-positif, (2) aktif negatif, (3) pasif-positif, dan (4) pasif-negatif.** Uraian dan tabel golongan ini telah dibubuhi contoh dengan menggolongkan presiden Amerika Serikat terdahulu kedalam kelompok-kelompok tersebut. penelitian yang menghasilkan kelompok ini berdasarkan kepribadian pertama kali dilakukan oleh J.D. Barber pada tahun 1977 (Blondel, 1987, hlm. 27).

Table 2.1 Classification of leader personality types

		2. Is politics a satisfying and enjoyable career or does the leader seek office out of a sense of duty to serve? Does the leader view politics positively or negatively?	
1. Does the leader invest a lot of energy in his or her political office? How active or passive is the leader?		Positive	Negative
	Active	1. Active-Positive Harry S. Truman John F. Kennedy George H. W. Bush	2. Active-Negative Lyndon B. Johnson Richard Nixon
	Passive	3. Passive-Positive Ronald Reagan	4. Passive-Negative Dwight D. Eisenhower

Namun sampai sekarang belum ada penelitian terbaru yang menghasilkan kesimpulan menggolongkan pemimpin dunia sebagaimana yang disampaikan Breuning dan Barber di atas.

Adapula teori tipe kepribadian menurut C.G. Rosberg dalam penelitiannya berjudul "*Personal Rule in Black Africa* (1981)" yang mana ia menggolongkan kepribadian pemimpin menjadi empat yakni: *princes, autocrats, prophets*, dan *tyrants* (Blondel, 1987, hlm. 27).

Hudson juga mengenalkan metode bagaimana mempelajari kepribadian individual seorang pemimpin. Menurut Hudson pemimpin individu memegang peran penting dalam membentuk kebijakan politik internasional. Pertanyaannya adalah dalam kapan dan bagaimana peran tersebut menguat.

Hudson merinci, peran individu dalam merumuskan kebijakan politik internasional menguat ketika atau bergantung pada: (1) tipe rezim (pemerintahan pada suatu waktu), ketika (2) pemimpin tertarik untuk terjun pada suatu kebijakan yang menurut dia menarik, (3) ketika terdapat situasi penuh ketidakpastian, (4) ada tidaknya pengalaman diplomatik yang dimiliki oleh seorang pemimpin, (5) ahli di isu area atau bidang tertentu, (6) apakah pemimpin gemar mendelegasikan putusannya akan isu tertentu kepada seseorang yang lebih ahli, dan (7) *illness*, artinya apakah pemimpin tersebut sedang dalam kondisi paling sehat dalam hidupnya atau sedang menderita suatu penyakit (Hudson, 2013, hlm. 42).

Hudson mengenalkan metodologi untuk mempelajari kepribadian individu seorang pengambil keputusan dalam hal ini adalah pemimpin eksekutif dan anggota dari kelompok pengambil keputusan tergantung pada bentuk negara dan tipe rezim yang sedang berkuasa.

Table 2.3 Leadership trait analysis

<i>Attitude towards constraints</i>	1. Belief in one's own ability to control events	Perception of control over situations
	2. Need for power and influence	Concern for establishing, maintaining, or restoring one's influence over others
<i>Openness to new information</i>	3. Conceptual complexity	Differentiation in describing or discussing other people, places, policies, ideas, or things
	4. Self-confidence	Sense of self-importance
<i>Motivation</i>	5. Task versus interpersonal	Focus on substance of policy (problem solving) versus interpersonal relations (team work)
	6. Distrust of others	Inclination to suspect and doubt the motives of others.
	7. Ingroup Bias	Degree to which own group is central in view of the world

Pertama, Hudson meminjam konseptual dari persepsi dan kognisi. Persepsi adalah proses berpikir yang terjadi pada alam berpikir kita yang memutuskan apa yang ingin kita lihat, dengar dan telaah dan apa yang secara sadar maupun tidak sadar kita abaikan. Hal ini cenderung kita lakukan karena kita menentukan sendiri kapasitas otak kita memproses suatu informasi. Otak kita memproses beragam informasi yang dengan sadar atau tidak kita lalu turut memilah informasi atau melakukan seleksi berpikir. Seleksi berpikir ini melibatkan pertimbangan-pertimbangan dan pemikiran yang berasal dari pengetahuan dasar atau awal yang telah kita miliki, pengalaman yang kita alami, dan informasi lainnya yang kita anggap penting. Seleksi berpikir menuntun kita menentukan skala prioritas sehingga pilihan-pilihan yang banyak menjadi lebih sedikit dan diantara pilihan tersebut kita membuat keputusan. Seleksi berpikir ini dapat mencakup stereotip, bias dan heuristic apa yang menjadi filter kita dalam mengolah informasi yang melimpah sehingga dapat menghasilkan suatu prioritas dan putusan.

Persepsi juga dapat tumbuh dari situasi yang mana kita kesulitan secara sederhana berpikir rasional. Bukan karena kita tidak dapat berpikir rasional, tetapi lebih tepatnya disebut rasionalitas kita sedang dibatasi. Dibatasi oleh ketidakmampuan kita untuk dapat mengetahui semua hal, memikirkan banyak hal sekaligus memahami segala hal (termasuk diri kita sendiri).

Akibatnya kita sering kali membangun model mental dari realitas tersebut (kadang realitas ini dapat semakin jauh dari kenyataan atau realitas sebenarnya). Kita pun akhir terbiasa dengan hiperealitas yang kita produksi dalam pikiran kita sendiri.

Heuristic Fallacies

Terdapat sejumlah hasil tulisan tentang heuristic fallacies, salah satunya adalah karya Richard Heuer *The Psychology of Intelligence Analysis* (1999) dan *Judgement under Uncertainty: Heuristics and Biases* oleh Daniel Kahneman, Paul Slovic dan Amos Tversky (1982). Penelitian tersebut menekankan bagaimana cara otak kita bekerja yang sebenarnya daripada apa yang pernah kita pikirkan tentang cara kerja otak kita.

Penelitian ini hendak menganalogikan cara kerja otak kita seperti suatu mesin. Kita selalu percaya akan kemampuan otak kita yang seolah tanpa batas dalam merekam memori jangka panjang. Kenyataannya, kita secara sadar maupun tidak sadar memberi perintah pada otak kita sehingga menghasilkan ingatan jangka panjang dan ingatan jangka pendek.

Dalam proses merekam, ingatan jangka pendek memiliki batasan dalam merekam suatu kejadian. Biasanya ia akan merekam dalam waktu tertentu. Apabila rekaman ini melebihi batas yang kita inginkan secara sadar maupun tidak, maka ingatan yang terakhir akan dibuang berdasarkan kondisi mental yang disebut dengan proses membuat prioritas. Sebagai contoh, kita mungkin masih dapat mengingat hal terakhir yang kita lakukan atau rutinitas kita tujuh hari yang lalu. Di saat yang sama kita pasti akan kesulitan untuk memanggil ingatan dari hal yang sama sepuluh hari atau bahkan dua minggu yang lalu. Sebaliknya, ingatan tentang apa

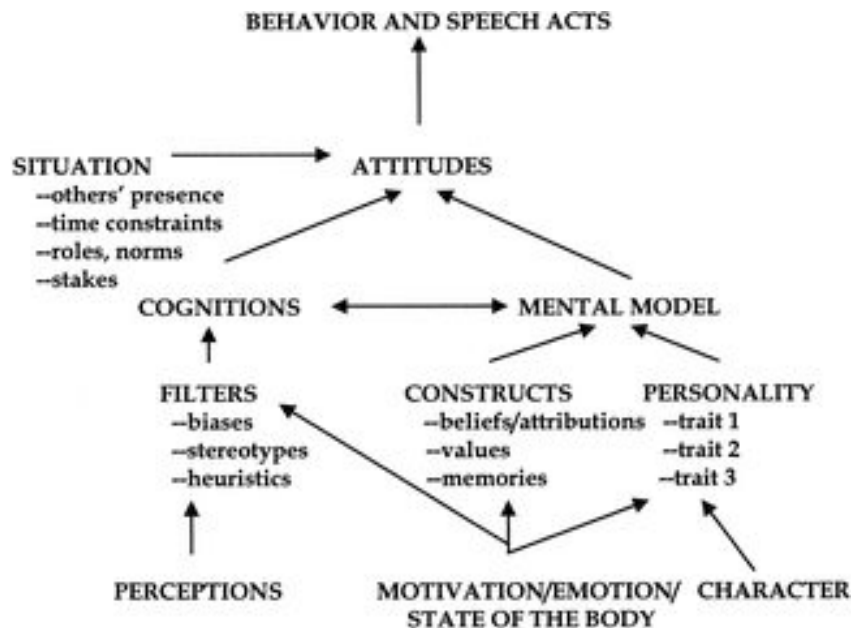
yang kita lakukan sehari sebelumnya, tentu kita masih dapat mengingatnya dengan baik dan lebih rinci daripada ingatan pada hari-hari berikutnya.

Pada suatu waktu kita bahkan dapat mengingat hal yang telah terjadi beberapa bulan yang lalu atau bahkan tahunan yang lalu dengan beberapa catatan. Catatan ini meliputi jika ingatan tersebut meninggalkan gambaran yang unik maupun istimewa. Hal ini dilakukan oleh fungsi otak yang disebut dengan **ingatan jangka panjang**.

Ingatan jangka pendek dan jangka panjang jika berkolaborasi maka ia akan membentuk suatu panggung ingatan atau **skema**. Skema ini bermanfaat sebagai suatu gambaran ingatan yang semi utuh yang dapat dipanggil kembali sebagai suatu desain ingatan, meskipun gambarannya tidak benar-benar utuh. Biasanya proses memanggil ingatan ini melibatkan suatu "*reasoning*" atau membuat masuk akal atas suatu kejadian yang pernah kita alami atau kita pelajari dari pengalaman atau kejadian yang menimpa orang lain (Hudson, Schrod, dan Whitmer, 2004).

Proses ini yang menyebabkan kita kemudian membangun suatu aturan atau bangunan yang membatasi tentang apa yang dapat kita lakukan dan batasan yang kita miliki. Batasan yang kita miliki inilah yang menciptakan persepsi atau pola pikir yang dapat mencitrakan pola pikir berupa **jalan pintas** atas apa yang dapat terjadi di masa mendatang akibat dari putusan yang kita ambil, misalnya putusan A daripada putusan yang lain, misalnya putusan selain A.

Salah satu contoh *heuristic fallacies* yang dapat kita dengan mudah kenali adalah kecenderungan kita memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi dari resiko atau manfaat mengambil suatu putusan. Patut dicatat, bahwa manusia sangat buruk dalam merumuskan kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi.



Konseptualisasi analisis individu seperti yang ditampilkan dalam bagan di atas mengandung unit eksplanasi yang penting. Artinya untuk memahami perilaku individu seorang pemimpin, kita dapat ketahui dengan merumuskan situasi, sikap yang terbentuk dari kognisi dan model mental.

Situasi ini dapat dikonstruksikan sebagai framing (kecenderungan muncul dugaan) atas kehadiran entitas lain baik pengaruhnya yang semakin menguat di kawasan maupun dalam interaksi dunia internasional, batasan waktu yang berkaitan dengan tingkat krisis dan urgensi yang dihadapi oleh individu, peran dan norma yang dimainkan, serta tingkat taruhan yang harus dipertimbangkan.

Kedua, keyakinan dan atribut yang dimiliki oleh seorang individu dapat berupa pelatihan diplomatik, pengalaman di birokrasi, pendidikan yang diperoleh dan bermanfaat dalam menjalankan kepemimpinan negara, nilai-nilai universal yang dimiliki, serta ingatan bermanfaat untuk memperkirakan konstruksi pikiran individu pemimpin.

Kepribadian pemimpin seperti yang diilustrasikan dalam bagan di atas terdiri atas keseluruhan karakter yang dimiliki oleh individu tersebut.

Bersama-sama dengan konstruksi dan kepribadian, maka tercipta model mental dari individu pemimpin negara. Maka yang dapat dilakukan adalah menelusuri dengan metodologi yang tepat dapat menggunakan kode operasional unit-unit eksplanasi tersebut. Sehingga unit-unit tersebut dapat digunakan untuk menjelaskan unit yang menjadi analisisnya.

Kognisi, meskipun juga ada kaitannya dengan proses kognitif yang terjadi pada alam pikir individu, juga turut dibentuk dan disusun oleh unit eksplanasi lainnya seperti stereotip, bias dan heuristic (*fallacies*).

Persepsi membentuk apa yang menjadi stereotip, bias dan heuristic yang dimiliki seorang individu. Proses ini telah disampaikan dan diuraikan pada bagian tulisan sebelumnya.

Motivasi, kondisi tubuh, serta emosi masing-masing memberi sumbangan yang termanifestasi pada filter, konstruk dan personalitas yang dimiliki seseorang.



Level Analisis Negara



JAWAD
PUBLISHING
GROUP







BAB IV

LEVEL ANALISIS NEGARA

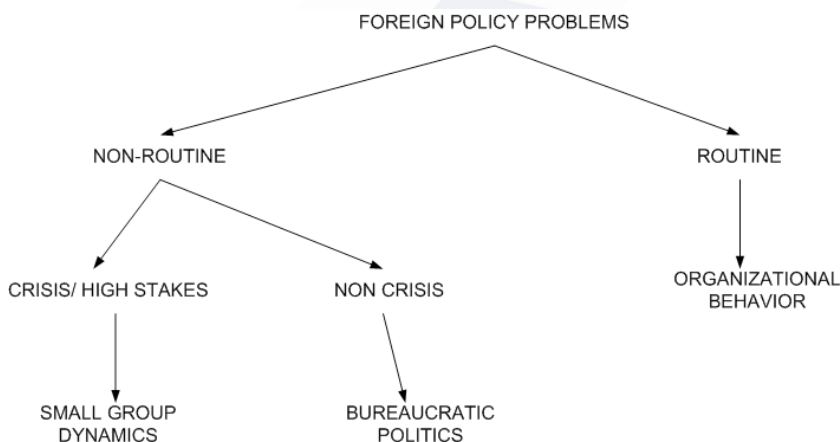
Kompetensi akhir yang diharapkan:

1. Mengkaitkan konsep unit analisis dalam level analisis negara
2. Mengkorelasikan faktor-faktor yang menjadi unit eksplanasi dalam level analisis negara

A. Konsep dalam Level Analisis Negara

Level analisis negara biasa digunakan jika unit analisis yang ingin dijelaskan berkaitan dengan negara.

Unit analisis ini mengajak kita untuk mengenali fokus dari kajian yang dapat terdiri atas: (1) *small group dynamics*, (2) *organizational process*, (3) *bureaucratic politics*, (4) *culture and identity*, (5) *domestic political contestation*, dan (6) *national attributes*.



Dalam fokus *small group dynamics*, maka salah satu yang dapat menjadi unit eksplanasi terdiri atas: (1) *small group structures and processes*, (2) *coalition theory*, (3) *group think and newgroup analysis*, dan lainnya.

Hudson menyampaikan bahwa dinamika kelompok kecil biasanya hadir jika suatu putusan atau kebijakan memiliki urgensi yang tinggi utamanya di tengah situasi krisis dan situasi yang mana banyak yang dipertaruhkan. Situasi krisis ini biasanya muncul apabila suatu negara berada di tengah ancaman perang, negara berada dalam situasi darurat seperti ancaman kudeta dan pemberontakan, negara dalam situasi tengah diancam oleh sanksi dagang atau embargo ekonomi, dan banyak lainnya. Kehadiran kelompok kecil ini biasanya identik dengan anggotanya sebanyak tidak lebih dari 15 orang.

Sedangkan dalam situasi non-rutin dan non-krisis, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan informasi yang terjadi dalam proses birokrasi politik. **Bureaucratic politics** menyediakan unit seperti: (1) konsep penting seperti *turf, morale, budget, influence, interagency group politics*, dan lainnya. Meskipun demikian, struktur dan proses birokrasi di setiap negara cukup unik. Hal ini membuat kita menyadari bahwa terdapat perbedaan mendasar namun penting dan krusial profil setiap politik birokrasi di setiap negara utamanya yang literturnya cukup melimpah yakni antara negara demokrasi dan negara non demokrasi atau negara yang dipimpin oleh **monarki, tirani, princes, prophets, puppets**, dan lainnya sesuai dengan karakteristik pemimpin oleh Jackson dan Rosberg (1981).

Sedangkan dalam situasi rutin, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan informasi yang terjadi dalam **organizational process**. Unit eksplanasi yang dapat digunakan namun tidak terbatas pada: (1) *examination of incremental learning, standard operating procedures, implementation issues, organizational culture*, dan lainnya.

Dinamika dalam grup sangat penting guna memahami perilaku kebijakan politik, dan tidak dapat diabaikan karena pada tingkat yang cukup krusial putusan kebijakan politik diimplementasikan melalui organisasi eksekutif seperti departemen dan agensi. Unit eksplanasinya membantu kita memahami bagaimana

situasi membantu kita untuk mengeksplorasi pada tingkat mana pemerintah bukan lagi unit aktor rasional yang tunggal. Organizational process juga dapat menjadi strategi bagi suatu pemerintahan untuk mengulur waktu dan menampilkan batasan yang harus dilalui lawannya sehingga harus tunduk dan mengikuti keterbatasan tersebut. hal ini pernah menjadi strategi AS untuk mengenakan politik inkonsistensi terhadap komitmen pada energi berkelanjutan pada kasus panel surya. Melalui Department of Commerce, Amerika Serikat memaksa China melalui produsen panel surya untuk mengikuti aturan main sehingga AS dapat mengontrol pasar dan mengenakan bea impor terhadap produk panel surya (Winanti & Puspitarini, 2016).

Di Indonesia sendiri, presiden selalu menggelar pertemuan penting dengan sejumlah menteri koordinator secara rutin. Pertemuan ini biasanya dilakukan untuk membahas dan mencari solusi atas suatu permasalahan rutin. Terkait dengan realisasi investasi di Indonesia yang rendah padahal pemerintah melalui sejumlah kementerian mengklaim telah melakukan berbagai promosi untuk menarik investasi. Presiden Joko Widodo terus menghimbau jajarannya agar mengawal investasi di Indonesia agar sesuai dengan target dan realisasi (kompas.id, 2019). Salah satu saran presiden adalah membentuk lembaga yang mengawasi investasi ini. Saran ini menuai sejumlah pendapat bahwa lembaga baru akan memperpanjang dan memperumit rantai birokrasi yang identik dengan peraturan yang tumpang tindih dan saling bertentangan, anggaran yang lebih besar dan peraturan pajak yang belum pro-iklim investasi yang baik (Arman, 2019; Reksodipietro, 2019).

Dengan ini maka kita diajak untuk mencari penjelasan yang terdiri atas unit eksplanasi di atas. Pertanyaan yang muncul yang dapat menjelaskan studi kasus perang dagang dapat dicari tahu dalam proses dan struktur dalam suatu kelompok kecil yang berpengaruh dalam proses pengambilan putusan atau berpengaruh pada keteguhan Donald Trump secara sungguh-

sejumlah program.

Patut diketahui, proses pengambilan putusan yang terjadi di AS dapat ditelusuri melalui siapa yang tergabung dalam dewan pertimbangannya. Kendati dewan pertimbangan dan sejumlah posisi penting dan strategis sering mengalami perombakan (“Everyone Who’s Been Fired by Trump, Quit Since Inauguration-Variety,” t.t.; “The Turnover at the Top of the Trump Administration Is Unprecedented-The New York Times,” 2019; “Trump aides face calls to resign after president’s appearance with Putin - POLITICO,” 2018). Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana struktur dan proses yang berlangsung dalam kelompok tersebut.

Culture and identity menyediakan unit eksplanasi seperti: (1) pendekatan dalam teori peran, nasionalisme dan identitas politik, investigasi terhadap identitas melalui sejarah dan wacana sejarah, pilihan-pilihan nilai, desain aksi dan banyak lainnya. Pertanyaan yang mendasar yang mesti dijawab menggunakan unit eksplanasi ini ialah pertanyaan seputar: (1) siapa kami, (2) apa yang membuat menjadi kami, (3) apa yang kami lakukan, (4) siapa mereka, (5) apa yang mereka lakukan, dan lainnya.

Hofstede (1991) mendefinisikan budaya sebagai buatan manusia dan bagian dari lingkungannya. Herkovits (1955) mengartikan budaya sebagai perangkat lunak pikiran atau “*software of the mind*”. Sedangkan Skinner mendefinisikan kultur sebagai perangkat dari agenda yang dikenakan dari orang lain atau lingkungan sekitar pada seseorang (1981). Ada pula yang mengartikan budaya sebagai sistem pemaknaan, persepsi dan nilai yang secara interpersonal dibagikan” (Millennium, 1993). LeVine (1973) menyebut budaya sebagai bagian dari seperangkat aturan yang terorganisasi dan berkaitan dengan cara-cara individu dalam populasi mesti berkomunikasi dengan yang lainnya, memikirkan tentang dirinya sendiri dan lingkungan disekitarnya, serta bersikap terhadap satu sama lain maupun terhadap obyek di sekitar lingkungannya. Kluckhohn (1951) mengartikan kultur

sebagai pola pikir, merasa, dan bereaksi, yang diperoleh seseorang dan disampaikan atau disalurkan melalui simbol yang tersusun kekhasan yang dimiliki oleh kelompok tertentu termasuk atribut yang dibawanya, juga sebagai inti penting yang terdiri dari aspek-aspek tradisional, ide dan keterikatannya pada nilai dan norma. Triandis (1994) membangun konsep budaya sebagai seperangkat elemen obyektif dan subyektif manusia di waktu dulu yang dapat bertahan dan berkembang dan menghasilkan kepuasan hidup bagi partisipannya dalam suatu kelompok ekologis sehingga menjadi hal yang dianut oleh karena sudah ada kesamaan bahasa dan mereka tinggal di tempat yang sama dalam kurun waktu tertentu. D'Andrade (1984) mendefinisikan budaya sebagai entitas yang terdiri atas pembelajaran akan makna yang serupa, yang dikomunikasikan oleh tujuan-tujuan bahasa natural dan sistem simbol, memiliki fungsi keterwakilan, arahan, dan pedoman serta mampu menciptakan entitas budaya dan realitas tertentu. Melalui sistem pemaknaan, sekelompok orang dapat beradaptasi di lingkungan mereka dan kegiatan struktural interpersonal yang dimiliki. Geertz (Geertz, 2016; Gregory, 2007; Ortner, 1999) mengartikan kultur sebagai pola pemaknaan lintas sejarah yang melekat dalam simbol sebagai suatu sistem yang diwariskan dan ekspresikan dalam beragam bentuk yang mana manusia dapat berkomunikasi, bertahan, dan mengembangkan pengetahuan dan sikap mereka akan kehidupan.

Ambil contoh yang terjadi di Indonesia, kultur dan identitas di Indonesia saat ini bisa dipahami dari sejumlah sudut pandang. Salah satu sudut pandang yang bermanfaat ialah meneliti terjadinya hiperrealitas jendela Instagram dan kaitannya dengan struktur masyarakat menengah di Indonesia. Dunia maya lewat platform Instagram menyajikan hiperrealitas dalam ironi. Instagram memungkinkan masyarakat untuk melihat dunia dengan gambar-gambar yang indah, meskipun tak seindah gambar-gambar di dunia nyata. Dunia Instagram menampilkan dunia yang sempurna dengan beragam pengaturan cahaya lewat fitur-fiturnya. Instagram memungkinkan penggunaannya memberi lambang hati kepada foto

dan postingan yang dipasang orang lain. Meskipun kenyataannya, lambang hati tersebut jarang sekali diberikan di dunia nyata. Akibatnya masyarakat tenggelam dalam paradox hiperrealitas. Instagram membuat setiap penggunanya hanya memperhatikan diri sendiri. Setiap pribadi yang fokus pada diri sendiri dan dalam hati memohon dengan sangat agar semakin banyak orang yang memberi lambang hati. Inilah yang menjadi karakter umum yang ditangkap Haryanto dalam tulisannya “Dunia Tak Seindah Instagram” mencoba mengajak kita menyadari hiperrealitas yang tercipta di tengah-tengah masyarakat saat ini. Yakni masyarakat yang *inward looking*, focus meperhatikan diri sendiri, abai terhadap realitas yang terjadi sesungguhnya, dan terserap dalam jebakan dunia maya(kompas, 2018b).

Hiperrealitas ini juga diisi oleh tindakan kekerasan dengan postingan gambar-gambar yang mengganggu. Lardellier seperti yang dikutip Haryatmoko (2007, hlm. 119) dalam mengatakan bahwa kekerasan bisa didefinisikan sebagai prinsip tindak yang mendasarkan pada kekuatan untuk memaksa pihak lain tanpa persetujuan. Kekerasan yang diposting di platform Instagram memungkinkan untuk diviralkan dan didistribusikan secara viral dan massif dan instan tanpa adanya sensor. Hal ini mencerminkan hilangnya etika dan moral yang semestinya melekat pada realitas itu sendiri (kompas, 2018b). Inilah yang menjadi kultur baru dalam kehidupan masyarakat di Indonesia pada khususnya dan di dunia pada umumnya. Perilaku instan ini menjelma dan secara tidak langsung turut membentuk struktur masyarakat dan cara berpikir mereka dalam menanggapi dunia seolah seluas genggam dan sedangkal etika dan moral universal.

Literatur yang bermanfaat yang memuat klasifikasi budaya yakni oleh Aaron Wildavsky (1987) yang mengembangkan teori budaya Mary Douglas, menggolongkan budaya dengan (1) fatalist, (2) hierarchist, (3) egalitarian, dan (4) individualist. (Wildavsky, 2018).

Domestic political contestation meliputi unit eksplanasi yang terdiri atas: (1) menelusuri tipe rezim, (2) kelompok kepentingan politis, (3) struktur dalam two-level game, (4) politik elektoral, (5) opini publik, (6) studi media, dan lainnya.

Menggunakan unit analisis ini, maka kita digiring untuk menelusuri faktor-faktor yang dominan dalam membentuk kepentingan politis akan suatu kebijakan. Selain itu kita diajak untuk menelusuri apakah kebijakan luar negeri yang diusung pemerintah merupakan manifestasi dari kebutuhan masyarakat akan suatu perubahan yang berarti ataukah semata keinginan pemerintah untuk mengikuti suatu arah kebijakan yang lebih besar. Sedangkan menggunakan unit analisis politik elektoral hanya bisa digunakan untuk menganalisis bagaimana hasil pemilihan umum menggunakan sistem elektoral memaksa pemerintahan eksekutif mengikuti putusan atau kebijakan tertentu atau menguak batasan yang dimiliki pemerintahan eksekutif atas kebijakan yang dinilai tidak populer (Sabato et al., 2017).

Namun sistem ini hanya berlaku pada pemerintahan yang menggunakan sistem elektoral. Sedangkan di Indonesia, sistem elektoral bukan menjadi ciri-ciri konstitusi dan pelaksanaan pemilihan umum. Opini publik dapat dipelajari dari survei yang diselenggarakan oleh lembaga yang independen. Di Amerika Serikat misalnya, survei Gallop biasanya digunakan untuk mengetahui respon masyarakat dan seringkali dijadikan cermin dari opini publik yang sedang berkembang saat itu. Studi media juga menarik dan mudah dilakukan meskipun memerlukan waktu yang tidak sedikit karena harus mencermati konten dari media yang diteliti. Namun hal ini dapat memberikan informasi massif yang bermanfaat untuk menilai kebijakan suatu negara.

National attributes meliputi unit eksplanasi yang terdiri atas: (1) faktor yang dapat mempengaruhi seperti geografi, sumber daya alam, variabel-variabel seperti tingkat pertumbuhan dan pola arus dagang dan lainnya.

Dalam menggunakan unit analisis ini, maka peneliti diajak untuk menelusuri catatan yang dikeluarkan secara rutin dan periodik oleh lembaga-lembaga dunia. World Trade Organization (WTO), UNDP (United Nations of Development Program), World Economic Forum (WEF), OECD adalah salah satu contoh lembaga yang independen mengeluarkan catatan peringkat negara berdasarkan indikator yang sering digunakan. Indikator ini dapat ditemukan dalam studi ilmu ekonomi pembangunan. Sehingga untuk dapat mengenali atribut nasional dengan maka perlu mencermati catatan-catatan yang dikeluarkan oleh lembaga tersebut. catatan ini biasanya dapat diakses secara dalam jaringan dengan mengakses situs resmi masing-masing. Pengetahuan mendasar tentang data di atas akan membantu dalam mengelompokkan negara apakah termasuk ke dalam kelompok negara maju, berkembang, dan kurang berkembang, maupun negara utara dan selatan, dan mengidentifikasi hubungan negara apakah termasuk dalam ketergantungan (*interdependent countries*) atau negara yang bergantung pada negara lain atau *dependent countries* (Bilton et al., 2017; Wendt, 1999).

B. Faktor-faktor Berpengaruh yang Menjadi Unit Eksplanasi dalam Level Analisis Negara

Ambil contoh kita hendak meneliti kebijakan perang dagang AS dan China di masa pemerintahan Donald Trump maka kita akan menemukan sejumlah fokus yang menarik untuk dielaborasi dan dicari penjelasannya. Proses ini memang membutuhkan tidak hanya waktu yang cukup banyak tetapi juga ketelitian dan reduksi data yang cermat.

Lebih jelasnya hal ini akan diuraikan pada bagian tulisan selanjutnya. Untuk memberi gambaran, menggunakan level analisis negara maka kita perlu untuk mencermati struktur birokrasi di Amerika Serikat dulu guna mendapat pendahuluan. Pendahuluan bermanfaat untuk mengetahui perbedaan menarik yang menjadi unit eksplanasi dari kebijakan politik internasional negara AS.

Ambil contoh yang terjadi di Indonesia, kita dapat menerangkan struktur birokrasi. Terkait dengan pengangguran dan lapangan pekerjaan, terdapat persoalan yang mana terjadi kesenjangan antara kompetensi lulusan Pendidikan vokasi dengan tuntutan industri. Pendidikan vokasi yang lebih fokus pada sisi *supply* yakni menyiapkan lulusan lewat Pendidikan selama ini hanya dianggap menambah pengangguran terdidik sehingga muncul anggapan Pendidikan vokasi dinilai gagal. Persoalan ini kemudian diatasi dengan penyelenggaraan Pendidikan vokasi yang lebih fokus pada sisi *demand*. Untuk itu, system pemagangan dibuat dengan kerjasama Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) atas koordinasi Kementerian Koordinator Perekonomian Bersama Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Perindustrian. Kadin sejak dua tahun alalu menggalakkan pemagangan. Proyek percontohan pun dilakukan dengan mengambil lokasi di Karawang, Jawa Barat(Kompas.id, 2018).

Contoh nyata bagaimana birokrasi politik juga turut mempengaruhi kebijakan politik internasional dapat dicermati dalam studi kasus birokrasi politik Uni Eropa dalam mempersulit sawit Indonesia. Dalam tulisannya “Ideologi Antisawit Eropa”, menurut Oegroseno upaya untuk mengkerdikan sawit Indonesia dari memasuki pabean Uni Eropa tak lepas dari birokrasi dan lobi kuat pihak-pihak yang berkepentingan. Mereka adalah PE dari Liberal Demokrat. PE adalah petani, eks petani atau memiliki bisnis terkait pertanian. Anggota PE menerima dana hingga 5.000 poun atau setara degan Rp 93 juta per bulan dari bisnis pertanian. Selain itu juga terdapat Avril Group. Avril memiliki anggaran hingga 4.8 juta euro atau sekitar Rp 78 miliar per tahun dengan 76 pelobi professional untuk melakukan lobi kepentingan industri minyak nabati di UE, hal yang sama dilakukan oleh PE. Pelobi ini mempromosikan dan mengkampanyekan agar UE mengurangi atau menghapus penggunaan minyak sawit dan turunnya dalam *biofuel*. PE, Avril Group dan Komisi Dagang di UE memungkinkan untuk mendorong sawit Indonesia sepenuhnya keluar dari pasar

UE karena berbagai alasan mulai dari alasan kesehatan, deforestasi, dan keberlanjutan(Oegroseno, 2018).



Level Analisis Sistem



JAKAD
PUBLISHING
GROUP







BAB I

LEVEL ANALISIS SISTEM

Kompetensi akhir yang diharapkan:

1. Mengkaitkan konsep unit analisis dalam level analisis sistem
2. Mengkorelasikan faktor-faktor yang menjadi unit eksplanasi dalam level analisis sistem

A. Konsep dalam Level Analisis Sistem

Level analisis sistem memungkinkan untuk mempelajari profil negara dan *power* relatif yang dimiliki negara tersebut di tengah-tengah interaksinya dengan negara lain. Level analisis sistem sangat berkaitan erat dengan distribusi *power* yang dimiliki suatu negara. Level analisis sistem juga erat dengan atribut nasional yang dimiliki negara tersebut. hal ini lah yang kemudian menjadi unit eksplanasi yang dibandingkan dengan negara lain di tengah interaksinya dalam hubungan internasional.

Power relatif ini bisa digali dari beragam sumber dan berdasarkan banyak landasan teori. Joseph Nye misalnya menyebut bahwa selain memiliki *power* fisik (*hard power*) suatu negara juga perlu mengamplifikasi *power* lunak (*soft power*) berupa pengaruh dalam kebijakan politik internasionalnya (Nye, 2009, 2011, 2015).

Laman lembaga internasional dapat menawarkan keuntungan karena menyediakan data-data faktual yang dapat diakses secara gratis. Bahkan untuk tujuan riset dan kepentingan akademisi, periset dapat menghubungi pihak tersebut dan meminta data dengan mengirim email.

Data yang bermanfaat untuk mengetahui profil *power* relatif negara antara lain tingkat *Gross Domestic Product*, *Gross National Product*, *Military Spending*, volume perdagangan termasuk volume ekspor dan impor, dan banyak lainnya. Data tersebut bermanfaat

dalam menerka peluang yang dimiliki suatu negara serta keterbatasannya yang mungkin harus dilampaui.

Power relatif yang dimiliki negara bisa dipandang dengan dua sudut pandang atau menurut konseptual hubungan internasional terdapat dua arus pemikiran yang relevan.

Neo realisme Kenneth Waltz melihat power relatif suatu negara dapat menjadi keterbatasan dan peluang bagi negara untuk meluaskan kebijakan politik internasionalnya(Waltz, 2010). Misalnya dengan *softpower* yang signifikan seperti Amerika Serikat dan sekutunya, maka AS dan sekutunya dapat dengan mudah mempengaruhi suatu negara untuk melakukan sesuatu yang tidak ingin dilakukannya. Hal ini sesuai dengan konsep power yang digagas oleh E.H. Carr. Hal ini secara natural dapat menjelaskan kenapa negara dengan power yang relatif berlebih seperti di sektor ekonomi dan kekuatan militer dapat tampil percaya diri di kancah dunia internasional. Sedangkan negara dengan power yang insignifikan cenderung terbatas untuk melakukan banyak hal.

Pandangan kedua yakni yang populer disebut konstruktivisme sosial mungkin memberi pandangan yang lain dan benar-benar melengkapi. Pandangan konstruktivisme sosial dipopulerkan pertama kali oleh Alexander Wendt. Menurut dia, power relatif itu berkaitan erat dengan ide yang terbentuk di benak kita (Wendt, 1999). Dunia ide memungkinkan kita memahami bahwa negara kecil sekalipun ternyata mampu bersaing dengan negara maju dan mengenakan *power* yang bahkan lebih bermanfaat dengan negara lain yang lebih besar.

Menurut Wendt, tidak melulu negara kecil selalu kalah sama halnya tidak melulu negara besar selalu dapat menguasai panggung. Hal ini telah dicontohkan dengan bukti empiris bagaimana kerajaan Belgia di bawah kekuasaan King Leopold III dapat menaklukkan daerah di Benua Afrika yang luasnya puluhan kali lipat. Hal yang sama pada negara Singapura, yang tampil tanpa merasa terintimidasi oleh negara-negara besar di kawasan Asia Tenggara. Sebaliknya, menggunakan sudut pandang ini kita bisa

memahami negara besar seperti Indonesia dengan populasi yang besar, luas wilayah yang fenomenal, luas perairan yang tiga kali lipat luas daratan, kaya sumber daya alam, justru berjuang keras untuk dapat bertahan baik secara ekonomi, politik, hukum dan keamanan di tengah-tengah kepentingan negara-negara besar di sekitarnya seperti Amerika Serikat dan Australia (Griffiths, 2013; Guzzini & Leander, 2005; Wendt, 1999).

B. Faktor-faktor Berpengaruh yang menjadi Unit Eksplanasi dalam Level Analisis Sistem

Seperti yang disampaikan dalam tulisan terdahulu, maka unit eksplanasi yang dapat digunakan untuk menjelaskan unit analisis menggunakan level analisis sistem terdiri atas: (1) distribusi *power* baik secara regional maupun internasional, (2) anarki dan mitigasi anarki lewat rezim internasional, (3) sejarah negara yang pernah menjadi sekutu ataupun negara yang pernah berkonflik, serta lainnya yang relevan.

Distribusi power. Untuk mengetahui distribusi suatu negara seperti yang telah dibahas pada bagian sebelumnya. Anarki dan mitigasi lewat rezim internasional. Pada bagian tulisan ini mengantarkan kita untuk memikirkan peluang yang dapat negara manfaatkan guna meningkatkan *power*-nya. Negara harus cukup jeli mencermati jika ada cela dari rezim internasional yang dapat dimanfaatkan. Cela ini cukup bervariasi. Kasus negara memanfaatkan rezim internasional guna meningkatkan *power*-nya dapat dilihat dalam kasus yang diulas secara rinci di WTO. Brazil misalnya memanfaatkan dengan baik rezim perdagangan multilateral ini meningkatkan *power*-nya di bidang pertanian. Hal ini cukup efektif dilakukan sehingga Brazil kemudian dikenal sebagai negara terdepan dalam menghadapi negara maju di bidang perdagangan agrikulturnya (Gregory, 2007).

Hal yang sama juga dilakukan India, ia memanfaatkan cela di WTO dengan baik guna meningkatkan *power* relatifnya. India tidak segan untuk menantang negara maju yang dengan

sepihak melemparkan kebijakan yang dilandasi oleh ideologi proteksionisme semu di bidang farmasi. Oleh karena itu, India kemudian dikenal karena keberhasilannya untuk meningkatkan *power* di bidang farmasi melawan perusahaan besar farmasi negara maju (Smedley, 2013).



Studi Kasus Kebijakan Politik Internasional
Presiden Amerika Serikat Donald Trump







BAB VI

MENGURAIKAN KASUS KEBIJAKAN POLITIK INTERNASIONAL PRESIDEN AMERIKA SERIKAT DONALD TRUMP

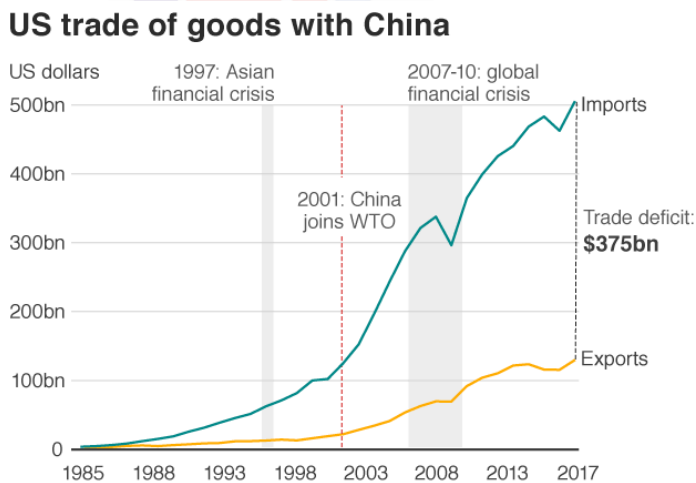
Kompetensi akhir yang diharapkan:

1. Menjelaskan konsep dan definisi kebijakan politik internasional
2. Menentukan faktor-faktor yang berpengaruh sebagai unit eksplanasi
3. Menentukan komponen metodologi dan pendekatan yang sesuai

A. Menguraikan Kebijakan Politik Internasional Donald Trump di Tengah Perang Dagang AS-China

Sepuluh defisit perdagangan AS berasal dari China, tak heran jika Trump kemudian menggalakkan perang dagang dengan China. Defisit 566 miliar dolar (Smedley, 2013) AS itu merupakan gabungan produk barang dan jasa. Jika produk jasa dikeluarkan, defisit AS mencapai 810 miliar dolar AS (kompas, 2018c).

Grafik 1 Perdagangan Barang AS dan China



Source: US Census Bureau

BBC

Sumber: ("Charting the US-China trade battle," 2019)

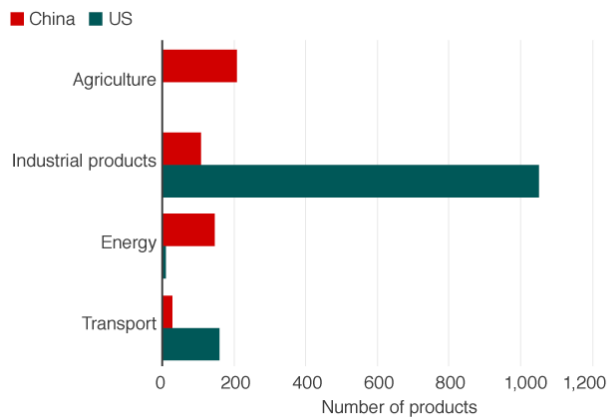
Berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui defisit perdagangan AS terhadap mitra dagang China melebar sejak tahun 1985. Puncaknya pada tahun 2017, besaran defisit perdagangan mencapai US\$375 juta. Defisit perdagangan ini dihitung dari nilai ekspor dan impor masing-masing negara. Baik China maupun AS merilis nilai perdagangan masing-masing yang tampaknya nilai sama (Lau, 2018, p. 21).

AS memulai perang dagang dengan China sejak Juli 2018. AS mengenakan tarif 25 persen terhadap impor dari China senilai 50 miliar dollar AS (kompas, 2018d). Di saat yang berdekatan, Trump sedang bersiap untuk menambah tarif terhadap barang impor dari China senilai 200 miliar dollar AS menjadi 25 persen pada awal Januari 2019. Pada 22 Januari lalu President AS, Donald Trump, memutuskan untuk memasang tarif impor mesin cuci dan panel tenaga surya (solar panels), masing-masing sebesar 50 persen dan 30 persen. Awal Maret, AS memutuskan akan memasang tarif tinggi untuk impor semua produk baja dan aluminium (kompas, 2018e). Pada Maret 2018, AS kembali menysasar produk baja dan aluminium sebagai sasaran kebijakan perang dagang dengan klaim demi menyelamatkan produk domestik (kompas, 2018a). Tidak hanya China, Eropa juga pada April 2019 menjadi sasaran terkait defisit perdagangan. Oleh karena itu, AS juga mengajukan pengenaan tarif kepada UE terkait produk wine dan makanan yang nilai perdagangannya mencapai 11 juta dollar (BBCNews, 2019).

Keputusan Presiden Trump menaikkan tarif barang asal China, khususnya produk baja dan aluminium, tidak bisa dipisahkan dari fakta melebarnya defisit perdagangan AS. Pada 2008, total defisit barang dan jasa AS mencapai hampir 700 miliar dollar AS, terutama dengan China. Di sisi lain, cadangan devisa China melonjak dari sekitar 450 miliar dollar AS pada awal 2000-an menjadi sekitar 2,5 triliun dollar AS pada 2009. Peningkatan terjadi akibat surplus perdagangan yang begitu masif, khususnya terhadap AS (Prasetyantoko, 2018).

Keinginan Donald Trump cukup jelas. Ia ingin perdagangan yang adil baik untuk negaranya dan juga untuk negara lain. Selain itu, ia juga meminta agar perusahaan AS yang memiliki pabrik di luar AS untuk kembali membangun pabriknya di AS. Intinya, Trump mengajak pengusaha untuk membangun operasional bisnisnya di AS. Dengan demikian, lapangan pekerjaan tersedia untuk orang-orang Amerika Serikat. Misalnya, Trump menghimbau agar perusahaan Harley Davidson untuk memindahkan pabriknya ke AS (kompas, 2018f).

What the tariffs will affect



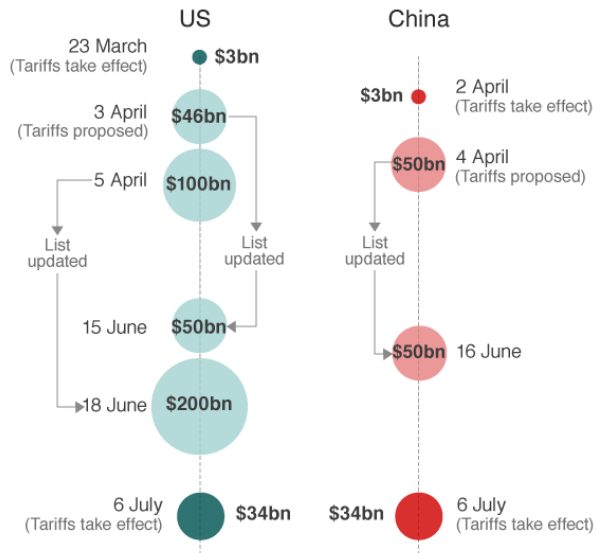
Note: Data as of 15 June 2018

Source: Peterson Institute for International Economics, BBC research

BBC

Sumber: ("Charting the US-China trade battle," 2019)

How the tariffs battle has escalated this year



Note: Data as of 6 July 2018

Source: Peterson Institute for International Economics, BBC research

BBC

Sumber: (*"Charting the US-China trade battle,"* 2019)

Kebijakan perang dagang ini kemudian diperkuat dengan serangkaian tindakan bank sentral AS. Jerome Powell, gubernur baru Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed, yang untuk pertama kalinya memimpin rapat dan langsung menaikkan suku bunga referensi 25 poin menjadi 1,75 persen (Prasetyantoko, 2018).

Keduanya berdampak langsung, akibat keputusan Presiden AS Donald Trump menerapkan tarif atas produk China. Pada akhir minggu lalu, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah sekitar 0,70 persen ke level 6.210. Padahal, pada awal tahun sempat menyentuh level tertinggi pada kisaran 6.600. Nilai tukar juga melemah mendekati Rp 13.800 per dolar AS (Prasetyantoko, 2018). Nampaknya yang menjadi faktor penentu kebijakan perang dagang AS adalah deficit perdagangan AS yang melebar di saat yang sama lapangan pekerjaan yang menyempit. Selain itu, Lau menambahkan terdapat dua faktor lain yang juga mempengaruhi yakni ekonomi dan kompetisi teknologi

serta kebangkitan sentimen populis, *isolationism*, nasionalis dan proteksionis hampir di seluruh bagian negara di dunia, utamanya Amerika Serikat. Hal ini yang mengakibatkan kebijakan mengenakan tarif tidak mendapat penolakan dari konstituen domestiknya (Lau, 2018).

B. Studi Kasus Perang Dagang AS-China 2017-2019

Perang dagang memiliki banyak dimensi. Dimensi pertama ialah apa yang disebut oleh Yash Tandon sebagai perang akan sumber daya alam (Tandon, 2015, p. 136). Perang dagang juga mengambil tempat di rezim internasional. Yang dimaksud dengan rezim internasional tersebut ialah di WTO (World Trade Organization) (Tandon, 2015, p. 149).

Amerika Serikat dan China masing-masing merupakan negara dengan perekonomian pertama dan kedua di dunia (Lau, 2018). Hubungan ekonomi kedua negara juga merupakan mitra dagang paling penting bagi banyak negara di dunia.

Perang dagang secara resmi diinisiasi oleh pemerintah AS bahkan sebelum Trump menjadi presiden ke-45. Sebelumnya pada tahun 2012, atas tuntutan produsen solar domestic yakni Solar World, Amerika Serikat telah mengajukan kenaikan tarif atas produk panel Surya (Winanti & Puspitarini, 2016; Zeng & Ka, 2010). Namun Trump menjadi presiden pertama di era proteksionisme ini yang menabuh genderang disertai pernyataan kontroversial yang ia unggah di kanal Twitter. Pernyataan-pernyataan ini menjadi ciri khas Trump sehingga pemerhati politik menyebutnya contoh terbaik kepribadian yang sadis, superego, necrophilia, agresif dan disruptif (Kellner, 2018).

Perang dagang AS terhadap mitra dagangnya dimulai sejak memberlakukan tarif sebesar 25% pada impor baja dan tarif sebesar 10% pada impor aluminium. Sejatinya China saat itu bukan merupakan negara eksportir baja dan aluminium ke Amerika Serikat. Kendati demikian, China menjadi negara pertama yang mengajukan gugatan kepada WTO terkait kenaikan tarif tersebut.

Diikuti oleh Uni Eropa yang mengajukan gugatan serupa pada bulan Juni 2018(Kuo, 2018).

Pengenaan tarif impor yang secara langsung menarget China sebagai negara eksportir terjadi di awal 6 Juli 2018. Amerika Serikat mengenakan impor sebesar 25% terhadap produk yang terdampak langsung yakni ban pesawat terbang, pemanas air, komponen mesin X-ray, dan sejumlah produk industri lainnya. Tarif ini kemudian disamai oleh China dengan mengenakan tarif sebesar 25% terhadap produk AS senilai US\$34 juta dollar termasuk produk seperti kendaraan listrik, bahan pangan mengandung babi dan kedelai.

Babak kedua pengenaan tarif sebesar US\$16 juta dikenakan pada impor masing-masing negara pada 23 Agustus 2018 sebesar 25%. China kemudian mengikutinya dengan mengajukan gugatan ke WTO atas pengenaan tarif yang diberlakukan AS.

Babak ketiga pengenaan tarif terjadi senilai US\$200 juta oleh China terhadap produk AS sebagian balasan tarif impor yang dikenakan AS pada 24 September 2018. Tarif mula pengenaan impor ini sebesar 10 persen kemudian naik menjadi 25 persen pada 1 Januari 2019. Retaliasi ini terus terjadi hingga pengenaan impor terakhir tercatat sebesar US\$250 juta setara dengan separuh nilai total impor AS dari China. China membalas dengan mengenakan tarif tambahan sebesar US\$60 juta terhadap impor dari AS pada rate yang bervariasi dari 5 sampai 25 persen.

C. Studi Kasus Kebijakan "*Make America Great Again!*"

Make America Great Again adalah frasa yang menjadi jargon Donald Trump selama masa kampanye pada tahun 2016. Frasa ini mengandung arti hendak mengembalikan kejayaan Amerika Serikat baik secara politik dan ekonomi seperti yang pernah dinikmati Amerika Serikat.

Secara politik frasa ini meneguhkan ambisi Trump ingin menempatkan politik AS sebagai negara yang tidak diremehkan oleh negara lain. Bahkan lebih jauh, Trump ingin ekonomi AS tidak

dipertaruhkan untuk mengirim keuntungan ke negara lain. Perang dagang adalah salah satu aspek penting dalam perekonomian dan perdagangan dunia. Untuk memahami konsep perang dagang seutuhnya, maka perlu untuk mendapat pengetahuan mendasar juga tentang proteksionisme dan tarif.

Perang dagang dapat membawa negara-negara ke usaha yang disruptif. Perang dagang juga dapat menggerogoti hubungan antarnegara dan mengarah pada persaingan tidak sehat (IntroBooks, 2019). Pengenaan pajak yang berlebihan atau peningkatan akan memicu negara lain untuk melakukan hal serupa. Hal ini disebut dengan retaliasi. Kedepannya, pengenaan tarif tidak hanya menempatkan ekonomi suatu negara sebagai taruhannya, kedepannya juga dapat memicu kondisi yang membahayakan. Tarif dapat dijadikan penghambat yang mana dapat mempengaruhi ekonomi negara lain yang bermitra maupun banyak negara apabila pengenaan tarif diberlakukan oleh negara yang secara ekonomi sangat berpengaruh seperti Amerika Serikat, China, dan Uni Eropa.

Faktor yang melatarbelakangi perang dagang antara lain: (1) Analisa kondisi perekonomian domestic, (2) tekanan dari grup penekan misalnya asosiasi perkumpulan industry dan dagang di domestic, (3) politisi yang berpengaruh dan sedang memegang kekuasaan penting, dan (4) usaha-usaha lain dari domestic yang mengakibatkan suatu produk terlihat tidak menarik atau menampilkan beragam alasan untuk membatasi pasar suatu produk dari negara tertentu (IntroBooks, 2019).

Akar dari kebijakan perang dagang berasal dari keinginan dari perusahaan domestik dan industri yang dapat mengarah pada putusan yang buruk. Tarif adalah salah satu konsep penting dalam perang dagang. Tarif adalah sejenis pajak yang dikenakan terhadap barang dan jasa yang diimpor atau didatangkan dari negara lain (IntroBooks, 2019).

D. Nilai Kepemimpinan Ekspansionisme dalam Kepribadian Presiden Donald Trump

Hubungan internasional belakangan ini didominasi berita yang meletakkan tatanan dunia pada perspektif baru. Presiden Donald Trump terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat. Ia terpilih setelah berhasil mengalahkan kandidat presiden dari Partai Demokrat, Hillary Rodham Clinton dalam pemilihan umum Amerika Serikat (AS) yang digelar pada Selasa, 8 November 2016 (Bump, 2017; Sabato et al., 2017).

Siapapun tidak dapat membayangkan bahkan dunia internasional apabila Donald Trump terpilih sebagai Presiden AS ke-45. Trump telah mendapat popularitas baik sebagai pengusaha maupun sebagai tokoh *reality show* “*the Apprentice*” (“*The Apprentice’ star Donald Trump to NBC: You can’t fire me, I quit - Reality TV World*,” 2007a). Minimnya pengalaman di dunia internasional dan hubungan diplomatik, tidak membuat Trump kehilangan keyakinan dapat menjalankan politik luar negerinya. Banyak pengamat yang menilai kebijakan politik internasional di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump merupakan cermin dari miskonsepsi (Keck, 2019). Bahkan Jeffrey D Sachs seperti yang dikutip Keck (2019) menyebutkan arah kebijakan politik internasional penuh kritik akan pendekatan yang diambil Trump:

Jeffrey D. Sachs’s A New Foreign Policy is a broad critique of US President Donald Trump’s approach to global affairs. Sachs’s book is ultimately a plea for greater US involvement in the world, mainly through the United Nations and within the Sustainable Development Goals (SDG) framework. This, the author argues, is not only desirable from a moral perspective, but also offers a remarkable return on investment compared to a foreign policy of costly ‘endless war’

Pendekatan yang diambil oleh Presiden Trump tidak lepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Salah satunya ialah, kepribadian (C. F. Hermann et al., 1969; M. G. Hermann, 1980; M. G.

Hermann & Milburn, 1977; Post, 2010, 2014; Winter, 1992, 1996). Ia memiliki kepribadian yang kontroversial dan mencolok di tengah-tengah dunia bisnis. Pengalamannya sebagai pengusaha properti mengantarkannya pada kesuksesan dalam banyak hal (Gordon & Trump, 2007). Kendati tanpa pengalaman birokrasi, Trump sangat percaya diri melalui proses sehingga menjadi kandidat dari Partai Republik untuk masuk bursa calon presiden.

Untuk mendapatkan simpati pemilih, Trump sengaja menggodok isu keuangan finansial dan kemerosotan ekonomi sebagai komoditas kampanyenya. Ia juga tidak segan memoles berita palsu sehingga tampak seperti suatu kebenaran. Mulanya, ia menyangsikan Barrack Obama lahir di Amerika Serikat. Suatu pernyataan yang tidak didasari dengan kebenaran. Pada kenyataannya Barrack Obama lahir di Amerika Serikat. Tidak hanya itu, Trump juga mengindikasikan bahwa Barrack Obama diam-diam adalah Muslim sehingga tidak layak menduduki kursi Presiden. Meskipun pada akhirnya Trump kemudian mengakui kekeliruannya kendati tidak menyertai dengan permintaan maaf dan penyesalan (Sabato et al., 2017).

Bahkan ia secara terang-terangan menggunakan gabungan sentimen rasisme, populisme, dan ultranasionalisme untuk membuatnya sebagai kandidat paling menjanjikan guna membuat Amerika jaya kembali atau dalam bahasa kampanyenya "*Make America Great Again!*" (Trump, 2016). Banyak kontroversi lain seputar pemilu 2016 dan kepribadian Donald Trump yang membuat pengamat politik dan hubungan internasional mengerutkan kening.

Donald Trump memiliki kepercayaan diri dalam melihat hal disekelilingnya. Ia bahkan menuangkan pemikirannya mengenai permasalahan yang sedang dihadapi oleh AS dan solusi untuk mengatasinya. Trump juga menyebut ekonomi AS lumpuh dan untuk itu perlu dipulihkan dengan cara-cara yang menurutnya dapat berhasil (Trump, 2016).

Secara kualitatif, terdapat sejumlah tulisan yang menyimpulkan kepribadian individu Donald Trump. Trump bekerja sama dengan

penulis seperti Gordon, Sexton, dan McIver menulis motivasi untuk menjadi sukses. Dalam bukunya berjudul “Trump University entrepreneurship 101 : *how to turn your idea into a money machine*”, Trump mengedepankan kepribadiannya sebagai motivator bisnis (Gordon & Trump, 2007; Sexton & Trump, 2006; Trump, 2007; Trump & McIver, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009).

Menggunakan konsep yang digagas Hermann, maka kepribadian Donald Trump dapat ditelusuri menggunakan *Leadership Trait Analysis* (LTA). Analisis ini mengajak untuk meneliti tingkat kepribadian seorang individu presiden dari tingkat kompleksitas konseptual, kepercayaan dirinya akan control di lingkungan eksternal, ketidakpercayaan (distrust), orientasi tugas, bias, dan kebutuhan akan kekuasaan (M. G. Hermann, 1980; M. G. Hermann & Milburn, 1977).

Menggunakan konsep yang digagas oleh Breuning, maka kepribadian Donald Trump dapat ditelusuri menggunakan konsep seperti kepribadian, motivasi, keyakinan dan karakter yang melekat (Breuning, 2007). Dalam melakukan itu, Breuning menggunakan *presidential character* milik Barber (Barber, 1992) dalam Blondel (Blondel, 1987) dan Jackson dan Rosberg (Jackson & Rosberg, 1981).

Perihal kepribadian Donald Trump, Kellner (2018) menggunakan analisis kepribadian Frommian menyimpulkan Trump dengan:

In the Anatomy of Human Destructiveness (1973), Fromm engages in a detailed analysis of the authoritarian character as sadistic, excessively narcissistic, malignantly aggressive, vengeably destructive, and necrophiliac, personality traits arguably applicable to Trump

Yang dimaksud dengan sikap sadistik ialah, menggunakan istilah yang dikutip dari Fromm sebagai seseorang dengan keinginan kuat untuk mengontrol, menyakiti, membuat malu orang lain. Ini adalah kepribadian yang menjadi ciri kas dari seorang

otoritarian. Kepribadian ini tercermin dalam kebiasaan Trump dalam menyinggung dan kebiasaan pengikutnya dalam mencoba mendiskreditkan pesaing dan lawannya.

Yang disebut dengan sikap narsis berlebihan adalah patologi psikis kronik. Bagi seorang narsisis hanya terdapat satu realitas yang berlaku yakni pikirannya, perasaannya dan kebutuhannya semata (Fromm, 1955: 36). Dalam bukunya, Michael D'Antonio juga menyebut Trump sebagai contoh terbaik sikap narsisistik sebagaimana pernah disampaikan oleh Christopher Lasch:

*Trump was offered as a journalist's paragon of narcissism at least as far back as 1988. The academics and psychologists got involved a few years later would go on to make the diagnosis of Trump into a kind of professional sport. Trump makes an appearance in texts for the profession, including *Abnormal Behavior in the 21st Century and Personality Disorders and Older Adults: Diagnosis, Assessment, and Treatment*. He also appears in books for laypeople such as *The Narcissism Epidemic: Loving in the Age of Entitlement; Help! I'm in Love with a Narcissist; and When you Love a Man Who Loves Himself**

Contoh paling nyata kepribadian narsisistik ialah dengan meletakkan namanya sebagai nama gedung, nama pesawatnya, nama kasino di New Jersey, hingga nama lapangan golf.

Yang disebut dengan sikap agresif adalah kepribadian yang tidak segan membalas orang lain yang berani berkomentar atau membuat komentar yang tidak sesuai dengan yang ia ingin dengar. Kepribadian ini juga sesuai dengan kepribadian Trump yang sering menyebut lawannya dengan "pecundang" atau "loser" dan kebiasaan dengan menyebut lawannya sebutan lain yang ekstrim.

Yang disebut dengan sikap yang disruptif adalah sikap yang tidak segan-segan membuat orang lain terganggu. Trump menjadi satu-satunya presiden yang gemar berbagi pendapat pribadinya: apa yang ia rasakan, dan apa yang ia pikirkan secara instan di platform seperti Twitter. Misalnya, ketika menanggapi tantangan

dari Hakim Gonzalo Curiel dengan menyebut-nyebut asal muasal nya yang lahir dari orang tua Meksiko-Amerika. Donald Trump selalu mengungkit bahwa asal usul hakim menjelaskan posisi hakim yang berseberangan.

Yang disebut dengan *necrophiliac* adalah kegemaran untuk terus menerus mengisi diri dengan kemenangan, kepemilikan, perampasan atau akuisisi. Kepribadian *necrophilia* cenderung mengisi kekosongan dalam hidupnya dengan sikap-sikap seperti sadism, agresi, mengumpulkan kekayaan dan kekuasaan, namun sangat rentan dengan kekerasan dan tindakan merusak diri sendiri.

Kellner berpendapat Trump tidak segan menunjukkan ego yang tidak tersaingi tanpa batas. Hal ini merupakan manifestasi dari kesuksesan yang ia kumpulkan sejak menjadi pengusaha. Ia berbagi cara sukses dalam usaha dalam kitab sucinya berjudul "*art of the deal*". Mungkin nanti ia akan membuat buku kiat sukses memenangkan pemilu dan menjadi Presiden Amerika Serikat. Kellner mengaitkan kepribadian Trump dengan pemimpin Fasis klasik dan tidak meragukan jika Trump memiliki bakat superego. Ia sepakat dengan Frankfurt School yang telah lama mempelajari otoritarian populisme dan neofasisme hingga sampai pada kesimpulan Trump adalah contoh terbaik kedua istilah tersebut.

Penulis lain juga berkesempatan untuk mengkaji kepribadian Donald Trump. Ia mengaitkan kepribadian Donald Trump dengan otoritarian. Berdasarkan kajian literatur di atas maka kita memperoleh bekal gambaran karakter, kepribadian, keyakinan dan motivasi Presiden Donald Trump dan mengimplementasikannya untuk memprediksi dan menilai secara kualitatif arah kebijakan politik internasionalnya.

Menguraikan Kebijakan Politik Internasional
Presiden Turki Recep Erdogan







BAB VII

MENGURAIKAN KEBIJAKAN POLITIK INTERNASIONAL PRESIDEN TURKI RECEP ERDOGAN

Kompetensi akhir yang diharapkan:

1. Menguraikan kebijakan politik internasional Erdogan di tengah krisis ekonomi Turki dan merosotnya kurs Lira
2. Menguraikan pentingnya kebijakan domestik untuk menyelamatkan Lira di tengah kontroversi hubungan diplomatik AS-Turki
3. Menunjukkan sikap kepemimpinan, berpikir kritis dan cinta tanah air

Turki tengah menyita perhatian dunia akibat sejumlah terobosan di bidang politik, ekonomi, sosial, hukum, pertahanan dan keamanan. Bahkan saat ini, Turki menjadi negara yang cukup diperhitungkan dalam politik internasional dan geopolitik kawasan. Utamanya sejak Turki dipimpin oleh Presiden Erdogan sejak tahun 2002.

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, akrab dengan panggilan Presiden Erdogan, menjadi simbol resistensi terhadap narasi tatanan dunia global yang dikendalikan oleh kepentingan negara-negara maju dan adidaya.

Gaya kepemimpinan Presiden Erdogan menyiratkan keberanian mengambil sikap tidak populis di tengah-tengah kepentingan negara maju patut menjadi contoh bagi negara-negara berkembang saat ini. Kendati Presiden Erdogan mendapat tekanan internasional yang meragukan kualitas demokrasi Turki pasca kudeta yang gagal pada tahun 2017, Turki melalui Presiden Erdogan menjadi simbol harapan baru kebangkitan peradaban Islam.

Dengan mengimplementasikan metode dalam menganalisis kebijakan politik internasional dan mengkorelasikannya dengan tipe kepemimpinan menurut Margaret Hermann, Jerrold Post dan pendekatan tiga level analisis Marijke Breuning, kita dapat menyelami kepemimpinan, motivasi, kepribadian serta karakter Presiden Erdogan

guna memahami keputusan dan pengaruhnya dalam kebijakan politik internasional Turki secara kualitatif deskriptif.

Pada masa pemerintahan Erdogan sebagai Presiden, Turki memiliki sejumlah tantangan. Tantangannya tidak hanya berasal dari luar negeri tetapi juga dari dalam negeri.

Di luar negeri, Presiden Erdogan berbenturan baik secara motivasi, karakter, prinsip, dan norma yang diyakini dengan Presiden Donald Trump. Kerap kali kedua presiden tersebut tidak tanggung-tanggung untuk menunjukkan perbedaannya dalam menyikapi beragam persoalan internasional di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.

Tantangan dari luar negeri atau dunia internasional yang dihadapi oleh Presiden Erdogan terdiri atas: pertama, berkaitan dengan kebijakan Amerika Serikat untuk melakukan perang dagang dengan China. Kedua, berkaitan dengan kebijakan unilateral Amerika Serikat yang menaikkan hambatan tarif produk besi, baja dan aluminium dari sejumlah negara termasuk Turki. Ketiga, berkaitan dengan komentar yang diberikan Presiden Trump terhadap kepemimpinan Presiden Erdogan di dalam negeri. Keempat, berkaitan stabilitas politik dan ekonomi domestik dalam negeri selama Presiden Erdogan memimpin. Kelima, berkaitan respon Presiden Donald Trump terhadap perkembangan temuan kasus pembunuhan wartawan internasional Jamal Khashoggi. Kelima, berkaitan pelemahan kurs Lira. Keenam, berkaitan kebijakan Turki dalam memerangi etnis Kurdi di wilayahnya. Ketujuh, berkaitan mobilisasi kendaraan militer Turki di perbatasan dengan Suriah yang sedang dilanda konflik. Terakhir, berkaitan dengan sikap Presiden Erdogan terhadap pengungsi Suriah.

Sedangkan di dalam negeri, Presiden Erdogan menghadapi tantangan yang tidak kalah rumitnya. Tantangan tersebut dapat dirinci sebagai berikut: pertama, kekalahan Partai AKP dalam pemilu daerah di wilayah basis pendukung AKP terbesar di Turki yakni Istanbul. Kedua, berkaitan dengan stabilitas politik yang mana Presiden Erdogan menghadapi tekanan dari pendukung yang kecewa dengan kinerja pemerintahannya. Ketiga, berkaitan dengan ketidakstabilan

politik pasca kudeta 2017. Keempat, berkaitan dengan pemerintahan Presiden Erdogan yang dinilai lebih otoriter dan menekan kebebasan berpendapat. Kelima, berkaitan dengan dukungan warga Turki yang masih dipengaruhi oleh kompetitor Erdogan yakni Fethullah Guyen. Keenam, berkaitan dengan orang-orang terdekat Presiden Erdogan yang ditunjuk sebagai pejabat strategis dikabinetnya.

Sejumlah persoalan tersebut baik dari luar negeri dan dalam negeri, turut menjadi faktor yang mempengaruhi arah kebijakan politik internasional yang diambil Presiden Erdogan selama masa pemerintahannya. Dengan demikian, guna menelaah dan menganalisis kebijakan politik internasional pada masa pemerintahan Presiden Erdogan diperlukan pemahaman mendalam meliputi seluruh komponen kebijakan yang, mengutip Breuning, bersifat multifaktor, multiagen, dan multiorientasi. Sehingga kompleksitas kebijakan politik internasional Turki pada masa pemerintahan Presiden Erdogan dapat diuraikan secara kualitatif dan mendalam.

Namun mengingat kompleksitas faktor yang dapat memengaruhi kebijakan politik internasional Turki, maka pada bagian tulisan ini hanya akan membahas mengenai isu pelemahan kurs Lira Turki serta ketidakpastian yang ditimbulkan terhadap kebijakan politik internasional pada masa pemerintahan Presiden Erdogan.

A. Studi Kasus Ekonomi Turki dan Pelemahan Kurs Lira

Lira adalah mata uang Turki. Mata uang ini sedang mengalami tekanan baik secara politik dan ekonomi. Dikatakan mendapat tekanan politik, adalah akibat hubungan diplomatik Turki dan Amerika Serikat yang memanas berkat sentimen negatif hubungan kedua negara yang ditunjukkan oleh saling lempar komentar antara masing-masing presiden.

Presiden Trump lama sebelum menjadi presiden AS telah dikenal lama tidak menahan diri berkomentar atas suatu situasi. Situasi yang dipandang lebih banyak menciptakan kontroversi yang tidak perlu dengan kepala negara lainnya, tidak terkecuali Presiden Erdogan.

Sedangkan Presiden Erdogan, belakangan ini sangat terbuka dan tidak takut menyembunyikan pandangannya yang berseberangan dengan dunia barat, Amerika Serikat dan Uni Eropa. Pandangan yang membuat malu kepala negara lain yang cenderung menyembunyikan pandangannya guna mempertahankan hubungan yang kohesif, kondusif dan harmonis antarnegara.

Mata uang ini juga ditengarai mendapat tekanan dari kebijakan sepihak Amerika Serikat. Kebijakan tersebut sebenarnya tidak hanya menghantam Lira secara khusus. Hanya saja perang dagang antara AS dan China telah mengirim gelombang pelemahan kurs, dan Lira adalah salah satu korbannya.

Tekanan ekonomi pada Lira tidak jauh dari dua faktor utama yakni perang dagang dua kekuatan ekonomi besar dunia serta kenaikan suku bunga *the Fed* yang mengakibatkan pelarian modal keluar dari negara berkembang, Turki salah satunya, kembali ke Amerika Serikat. Tidak dapat dipungkiri, ketergantungan pada investasi luar negeri jangka pendek berupa FDI membuat perekonomian suatu negara rentan dengan aksi spekulatif para investor. Namun, peristiwa ini tidak cukup banyak dapat menjelaskan tipe kepemimpinan Presiden Erdogan.

Sebaliknya, tekanan politik pada Lira yang dipicu oleh dua faktor hubungan diplomatik Turki dan AS dan sikap kedua pemimpin negara, dapat cukup menjelaskan tipe kepemimpinan Presiden Erdogan. Oleh karena itu, dapat pula membantu mengetahui arah kebijakan politik internasional Turki pada masa pemerintahan Presiden Erdogan.

B. Studi Kasus Ketegangan Diplomatik AS-Turki

Ketegangan hubungan diplomatik Turki dan AS memiliki sejarah panjang. Turki dan AS bersama-sama merupakan bagian dari NATO yang kini anggotanya sedang hiatus. Hiatus ini diperparah dengan AS yang tidak dapat mempertahankan hubungan harmonis dengan Rusia, Uni Eropa dan Turki sebab AS mulai menarik diri dari kesepakatan-kesepakatan internasional. Sayangnya, NATO adalah

salah satu yang menurut Presiden Trump tidak mendatangkan keuntungan strategis bagi AS utamanya.

Hubungan diplomatik Turki dan AS dapat diamati dari tanggapan yang saling dilontarkan oleh kedua kepala negara sejak Trump dan Erdogan memegang pemerintahan eksekutif. Hubungan ini diperparah dengan temuan pemerintah Turki atas konspirasi pembunuhan wartawan Jamal Khashoggi yang menukik pada dugaan keterlibatan sekutu AS, Mohammad bin Salman. Namun, pembahasan tentang konspirasi pembunuhan Khasoggi bukan menjadi intisari dari bagian tulisan ini.

Turki tadinya memiliki hubungan baik dengan AS. Bahkan dapat dikatakan, jauh sebelum Erdogan memangku jabatan penting di Turki, Turki telah menjadi sekutu AS dalam banyak hal. Sejarah Turki sebagai sekutu AS dapat ditelusuri pada perang dunia II yang merupakan tindak lanjut dari Second Cairo Conference pada bulan Desember 1943. Saat tantangan muncul, berupa ancaman komunisme di Yunani, Presiden Truman kemudian mengeluarkan *Truman Doctrine* pada 1947 yang isinya menjamin keamanan Turki sekaligus kepentingan nasional Amerika Serikat di Selat Turki. Kerjasama juga dijalin kemudian dengan membentuk pasukan bersama, yang dinamai dengan operasi "Counter-Guerrilla" di bawah nama *Operation Gladio*. Setelah berpartisipasi dengan pasukan gabungan United Nations, Turki diterima menjadi anggota tetap NATO. Sejak saat itu, Turki selalu mendukung kepentingan nasional AS di kawasan Timur Tengah dan tidak pernah ketinggalan untuk menjadi sekutunya. Namun, tatanan ini mulai mengalami perubahan sejak Turki dipimpin oleh Presiden Erdogan. Sedangkan AS dipimpin oleh Presiden Trump. Keduanya memiliki karakter kepribadian yang bertolak belakang sehingga kini kepentingan nasional AS di kawasan mulai mendapat tandingan dari Turki.

Hubungan diplomatik Turki dan AS secara administrasi dan kepentingan serta kerjasama bilateral barangkali tidak banyak perubahan. Namun hubungan Presiden Erdogan dan AS diwarnai sejumlah pertukaran sentimen yang bisa dikatakan tidak pernah

konstruktif. Interaksi keduanya sangat menarik diikuti untuk menganalisis proyeksi kebijakan politik internasional di kawasan yang mana kepentingan nasional AS-Turki bersinggungan.

C. Nilai Kepemimpinan Ekspansionisme dalam Kepribadian Presiden Recep Erdogan

Untuk menilai kepemimpinan Presiden Erdogan, maka unit analisis yang digunakan yakni unit analisis negara dan unit analisis sistem. Sedangkan unit analisis individu digunakan untuk menguraikan bagaimana motivasi, kepribadian, dan karakter dalam menerka tipe kepemimpinan Presiden Erdogan sesuai dengan Kepribadian Recep Tayyip Erdogan lahir pada 26 Februari 1954. Ia seorang politisi yang menjabat sebagai presiden Turki sejak 2014. Ia pernah menjadi Walikota Istanbul sejak tahun 1994 hingga 1998. Sebelumnya ia menjabat sebagai perdana menteri sejak 14 Maret 2003 hingga 28 Agustus 2014. Karier politiknya berpengaruh tidak hanya dalam domestik Turki tetapi juga dalam politik internasional global. Pada tahun 2018 ia terpilih sebagai muslim paling berpengaruh di dunia.

Erdogan Bersama dengan rekannya yang menjadi anggota partai yang sudah ada, mendirikan Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) di tahun 2001. Partai ini berhaluan kanan moderat dengan ideologi partai yang konservatif. Partai ini memiliki ideologi yang dekat dengan barat atau pro-Barat dengan agenda memperjuangkan nilai-nilai konservatif Turki dan sistem ekonomi liberal. Pada pemilu tahun 2002 AKP berhasil mendapatkan suara banyak dan berhasil menduduki 327 kursi parlemen. Hasil pemilu 2007 juga menunjukkan AKP unggul dari sejumlah partai lain dengan mendapat 341 kursi di parlemen. Pemilu tersebut juga akhirnya menempatkan Abdullah Gul yang sebagai anggota kader untuk menjabat sebagai perdana Menteri. Karena mendapat dukungan public yang cukup kuat, maka AKP berhasil memenangkan pemilihan umum di tahun 2002, 2007 dan 2011. Sayangnya pada pemilu yang baru saja digelar tahun 2019,

partai AKP mengalami kekalahan. Kekalahan ini ditandai dengan terpilihnya sejumlah kepala daerah dari partai lain.

Pada tahun 2007, Erdogan terpilih kembali sebagai perdana menteri dan kader partai Abdullah Gul menjadi presiden Turki. Erdogan baru membuka diri pada pemilihan presiden tahun 2014. Sistem pemerintahan di Turki tadinya bersifat parlementer yang mana kepala negara diisi oleh presiden. Sedangkan kepala pemerintahan dilaksanakan oleh peran perdana Menteri. Akan tetapi sejak referendum tahun 2017, presiden menjadi kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Hal ini menempatkan Recep Tayyip Erdogan memegang kekuasaan penuh di Turki sebagai presiden ("Erdoganism and Turkey's new prime minister," 2016).

Menggunakan metodologi leadership trait analisis Hermann secara kualitatif, maka kita menilai kebijakan politik internasional Turki dengan meneliti aspek kepribadian, motivasi, karakter kepemimpinan, dan motivasi Presiden Erdogan.

Latar Belakang

Erdogan berasal dari latar belakang politik Islam dan menyebut dirinya demokrat konservatif, ia juga turut mempromosikan pemikiran konservatif sosialis dan kebijakan ekonomi liberal selama masa pemerintahannya. Namun belakangan ini muncul kecaman internasional bahwa demokrasi di Turki selama masa pemerintahannya justru mengalami kemunduran (Özkırımı, 2019).

Erdogan sempat bermain bola untuk Kasimpiasa sebelum akhirnya terpilih sebagai walikota Istanbul dari Partai Kesejahteraan Islam. Ia kemudian dilucuti posisinya, hak politiknya dicabut, dan dipenjara selama empat bulan karena membawakan puisi yang didalamnya mengandung pandangan agama tentang pemerintahan dalam pidato yang diberikan pada tahun 1998.

Erdogan lalu secara terbuka meninggalkan politik Islam dan mendirikan partai yang lebih konservatif dengan nama AKP (Partai Pembangunan dan Keadilan) di tahun 2001. Kemenangan Partai AKP di tahun 2002, mengantarkan pendiri partai yakni

Abdullah Gul menjadi perdana menteri hingga pemerintahannya kemudian mengangkat status tahanan politik Erdogan. Erdogan lalu menjadi perdana Menteri pada bulan Maret tahun 2003 setelah memenangkan pemilu di bagian Siirt.

Pemerintahan Erdogan melihat negosiasi keanggotaan Turki di Uni Eropa, perbaikan ekonomi di tengah kemerosotan keuangan di tahun 2001 mengubah konstitusi melalui referendum di tahun 2007 dan 2010, ia juga menerapkan kebijakan politik yang disebut berhaluan Neo Ottoman, ada yang menyebutnya dengan Erdoganisme yang menempuh tindakan seperti membuka investasi di bidang infrastruktur termasuk jalan, bandara, dan jaringan kereta api cepat sampai akhirnya terjadi kemerosotan ekonomi akibat eksternalitas global ("Erdoganism and Turkey's new prime minister," 2016).

Belum ada penelitian yang menentukan tipe kepemimpinan yang dianut oleh Erdogan. Namun Erdogan terbilang sebagai pemimpin negara yang berani. Ia tidak segan menyuarakan pandangannya yang berbeda dengan negara lain. Bahkan ia tidak segan pula untuk menunjukkan cela kebijakan luar negeri dari pemimpin negara lain dalam pertemuan internasional.

Ia adalah orang yang menantang batasan-batasan yang dimiliki negara Turki selama ini. Negara Turki tidak pernah benar-benar diperhitungkan dalam politik global sebelumnya. Setelah Erdogan tampil sebagai pemimpin negara ini, maka Turki mulai diperhitungkan perannya. Erdogan adalah orang yang cukup berani untuk menyuarakan pendapatnya atas suatu isu di depan pemimpin lain maupun di hadapan publik pendukungnya.

Ia dapat digolongkan sebagai pemimpin dengan kompleksitas tinggi. Seringkali tidak perlu waktu lama baginya untuk merespon tindakan atau kebijakan luar negeri negara lain. Pemerintah Amerika Serikat yang menaikkan bea tarif impor atas impor baja, besi dan aluminium telah mengirim gelombang pelemahan kurs di berbagai negara termasuk Turki. Merespon aksi sepihak Amerika Serikat tersebut, Presiden Turki Erdogan mengajak rakyatnya yang

memiliki tabungan dollar agar segera menjual dollarnya sebagai bentuk protes.

Karakter

Penelitian yang dilakukan oleh salah satu toko politik menyebutkan terdapat perubahan karakter dalam kebijakan politik internasional Turki. Sebelum Presiden Erdogan menjadi presiden pada tahun 2017 dengan merubah konstitusi yang ada, Erdogan dikenal dengan sosok yang mengedepankan konsiliasi dengan Uni Eropa. Erdogan selalu mengedepankan kebijakan yang membawa Turki lebih dekat ke Uni Eropa. Hal ini menjadikan Erdogan sebagai pemimpin yang konsiliatif.

Pasca kudeta tahun 2017, terdapat perubahan kebijakan yang cukup signifikan pada Turki. Perubahan ini menandai Erdogan kemudian memiliki karakter kebijakan yang lebih banyak berseberangan dengan Uni Eropa. Salah satu contoh kebijakan tersebut ialah tentang pengungsi Suriah. Manakala, Erdogan merasa negara-negara Uni Eropa abai dengan kepentingan Turki di kawasan, maka Erdogan kemudian mengancam akan membuka perbatasan Turki yang memungkinkan pengungsi dapat memasuki wilayah Uni Eropa. Saat ini perbatasan Turki dengan Uni Eropa ditujukan untuk menampung pengungsi yang berasal dari Suriah.

Erdogan yang tadinya tidak pernah mengunggulkan ekspansionisme Turki, juga belakangan ini mulai berani menyuarakan kebijakannya yang bertujuan untuk menegaskan Turki di kawasan Timur Tengah. Salah satu contohnya adalah Turki tegas bersikap militerisme terhadap bangsa Kurdi yang berada di perbatasan. Turki juga tegas mendukung aktivitas militer ketika perang saudara berkecamuk di Suriah. Turki juga tegas meletakkan posisinya ketika terjadi krisis di Libia pada awal tahun 2020. Turki juga tegas merespon dan menindaklanjuti ketika terjadi pembunuhan wartawan internasional Jamal Khasoggi di konsulat Saudi Arabia di Turki. Bahkan Turki berani mengirimkan permintaan agar terduga pelaku dapat diadili di Turki daripada diadili di Saudi Arabia.



Menguraikan Kebijakan Politik Internasional Putra
Mahkota Saudi Arabia Mohammad bin Salman



AKAD
PUBLISHING
GROUP







BAB VII

MENGURAIKAN KEBIJAKAN POLITIK INTERNASIONAL PUTRA MAHKOTA SAUDI ARABIA MOHAMMAD BIN SALMAN

Kompetensi akhir yang diharapkan:

1. Menguraikan pentingnya kebijakan politik internasional MBS di tengah kospirasi pembunuhan Jamal Khasoggi
2. Menguraikan pentingnya kebijakan mempertahankan hegemoni Arab Saudi di tengah kontroversi kebebasan berpendapat
3. Menunjukkan sikap kepemimpinan, berpikir kritis, cinta tanah air dan sikap menghargai perbedaan

A. Studi Kasus Kospirasi Pembunuhan Jamal Khasoggi

Pada bagian tulisan sebelumnya, telah dibahas bagaimana kospirasi pembunuhan Khashoggi dilakukan di konsulat jenderal Saudi Arabia di Istanbul Turki. Sampai sekarang pengadilan atas pembunuhan Khashoggi secara adil belum pernah dilakukan. Hal ini disebabkan lantaran hukum internasional yang menyatakan tidak ada satu pun negara yang dapat memaksa negara lain melakukan sesuatu yang tidak diinginkan oleh negara tersebut. Prinsip ini dikenal dengan anarkis dalam hubungan internasional. Sebab tidak ada yang lebih tinggi dari suatu negara daripada kedaulatan negara itu sendiri.

Maka tidak heran, betapapun Turki mendesak pemerintahan kerajaan Saudi untuk mengizinkan Turki mengusut dan mengadili dalang di balik pembunuhan Khasoggi, tidak terdapat tindak lanjut yang berarti. Namun, hanya politik inkonsistensi yang dimainkan oleh Arab Saudi guna menghindari dampak yang ditimbulkan dari kospirasi pembunuhan tersebut.

Di sisi lain, pemerintah Saudi terus menerus berkelit dan menghindar dari tuduhan-tuduhan yang menegaskan keterlibatan Putra Mahkota Muhammad bin Salman dalam konspirasi. Dunia internasional yang terdiri atas negara-negara Uni Eropa menuntut penjelasan dari Kerajaan Saudi Arabia. Tuntutan ini ditanggapi dengan aksi diam oleh Putra Mahkota MBS. Di saat yang sama, Putra Mahkota MBS tetap melakukan kegiatan kenegaraannya dan kunjungan internasional ke negara-negara besar seperti Rusia dan Amerika Serikat. Sikap hangat yang diberikan Putin kepada Putra Mahkota MBS ketika berkunjung ke Rusia menuai sentimen negatif karena dilihat sebagai tindakan abai terhadap tekanan internasional yang menuntut kejelasan aktor di balik pembunuhan Khashoggi. Amerika Serikat melalui Presiden Donald Trump terlihat dengan jelas menyampaikan perkembangan yang terjadi itu tidak akan mengurangi kualitas hubungan Arab Saudi dengan Pemerintah Amerika Serikat. Meskipun, tekanan dari senator diberikan kepada Presiden Trump agar mengambil sikap terkait konspirasi pembunuhan wartawan senior tersebut.

Melalui kasus konspirasi pembunuhan Khashoggi ini, kesimpulan dapat ditarik. Kebijakan politik Arab Saudi saat itu lebih cenderung ke pasif kendati tekanan internasional dan Turki datang bertubi-tubi meminta kejelasan dan tanggung jawab dari siapapun yang mengirimkan instruksi untuk membunuh Jamal Khashoggi di Konsulat Jenderal Arab Saudi di Istanbul. Hal ini tecermin dengan jelas bahwa pembunuhan tersebut tidak memberi dampak signifikan atau dampak signifikan sedapat mungkin telah diminimalisir.

B. Studi Kasus Ketegangan Diplomatik di Timur Tengah dan Hegemoni Arab Saudi

Arah kebijakan politik luar negeri Arab Saudi dapat ditelusuri dengan mempelajari tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah Arab Saudi di kawasan Timur Tengah. Telah menjadi catatan sejarah yang panjang bahwa terdapat kontestasi power dan politik

di tengah-tengah kawasan Timur Tengah. Kontestasi ini diungguli oleh dua kekuatan utama yang saling melakukan keseimbangan kekuatan. Kedua kekuatan itu adalah Iran dan Arab Saudi.

Iran tidak pernah berseteru langsung dengan Arab Saudi. Namun pernah tercatat melakukan perang sembilan tahun dengan Irak dalam Perang Teluk I. Ideologi yang berseberangan seringkali diklaim sebagai penyebab ketegangan di kawasan Timur Tengah. Puncak ketegangan di tahun 2019 ialah, ketika Arab Saudi melakukan embargo dan memutus hubungan diplomatik dengan Qatar (Rahman, 2019).

Momen penggantian kali ini juga bertepatan dengan meningkatnya ketegangan Amerika Serikat-Iran dan perselisihan berkepanjangan antara Qatar dan beberapa tetangga di kawasan Teluk Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Mesir memutuskan hubungan diplomatik dan perdagangan dengan Qatar pada Juni 2017. Doha yang dituduh mendukung terorisme membantah (Koestanto, 2020).

Akibatnya, selama ini, di tengah tekanan Riyadh dan sekutunya, Doha merapat ke Ankara dan Teheran. Ankara mengirimkan tentara dan aneka persenjataan untuk ditempatkan di Qatar. Turki juga memasok aneka bahan pangan hingga air untuk Qatar.

Setelah 2,5 tahun dikucilkan, Qatar mulai membuat hubungan kembali. Qatar berniat lakukan komunikasi dengan Arab Saudi dengan mendengarkan dan mempelajari tuntutan Arab Saudi. Dalam daftar tuntutan Riyadh kepada Doha, antara lain, ada permintaan untuk menutup pangkalan militer Turki di Qatar, menutup kantor berita Aljazeera, mengurangi hubungan dengan Turki dan Iran, serta memutuskan hubungan dengan Ikhwanul Muslimin ("Arab Saudi Melunak, Qatar Belum Yakin," 2019).

Selepas serangan tersebut, upaya normalisasi hubungan Qatar-Arab Saudi semakin kencang. Doha belum sigap menanggapi permintaan itu. Terutama karena tuntutan mengurangi hubungan dengan Iran dan Turki. Qatar berpendapat mustahil untuk

mengurangi hubungan dengan negara yang selama ini telah membantu mereka di tengah krisis diembargo oleh Arab Saudi.

Geopolitik di kawasan Timur tengah sangat kental dengan persaingan untuk menjadi hegemoni antara Arab Saudi dan Iran. Jauh sebelum itu bahkan hegemoni ini terjadi antara Iran, Irak dan Arab Saudi. Ketiganya melakukan perimbangan kekuatan dan berhasil menahan diri untuk menyebarluaskan pengaruh di Timur Tengah. Negara-negara kecil di sekitarnya sebagian besar melakukan perimbangan juga dengan tergabung dalam pengaruh geopolitik salah satu negara besar tersebut.

C. Nilai Kepemimpinan Ekspansionisme dalam Kepribadian Putra Mahkota Mohammad bin Salman

Kajian politik luar negeri yang meneliti tentang individu sebagai pusat pengambil kebijakan memotivasi pakar hubungan internasional untuk menulis. Studi kasus bermanfaat untuk mengetahui secara khusus karakter dan kepribadian seorang presiden suatu negara. Terdapat dua konsep yang cukup mengemuka untuk mengukur dan menilai kepribadian suatu negara. Konseptualisasi yang dikenalkan oleh Valerie Hudson pada tulisannya *The Foundation of Comparative Foreign Politics*. Menurut Valerie Hudson kepribadian presiden dapat dikenali dengan tiga metode yakni *leader trait analysis*, *operational code* dan *event data*. Selain itu, terdapat Margareth Hermann mengusulkan teori tipe kepemimpinan yang dibedakan menjadi dua karakter yakni kepemimpinan ekspansionisme dan kepemimpinan konsiliatif. Sedangkan Jerrold Post mengenalkan enam tipe kepribadian yang dapat dimiliki presiden.

Salah satu indikator pemimpin yang ekspansionis adalah memiliki tingkat kepercayaan diri yang tinggi untuk mengontrol situasi eksternal. Salah satu indikator pemimpin yang konsiliatif maka ia tidak memiliki cukup keyakinan untuk mengontrol situasi eksternal. Alih-alih berupaya mengontrol situasi eksternal,

pemimpin yang konsiliatif cenderung mengajak pihak lain untuk terlibat terjun mengendalikan situasi eksternal.

Karakter

Mohammad bin Salman bin Abdulaziz Al Saud atau MBS lahir pada tanggal 31 Agustus 1985 di Riyadh, Arab Saudi. MBS merupakan keturunan dari Raja Salman dan pasangan ketiganya, Fahda bin Falah bin Sultan bin Hathleen. Dia adalah cucu dari Rakan bin Hithalayn, yang merupakan kepala suku Al Ajman. Ia lahir dan besar dilingkungan kerajaan yang mana didalamnya penuh dengan perjuangan perebutan tahta sehingga skema dan intrik tak dapat terhindarkan atau bahkan sudah menjadi bagian dari kehidupan. Hal inilah yang membuat MBS menjadi sosok yang cerdas dan berfikir tajam. Setelah menempuh pendidikan di King Saud University dengan gelar sarjana hukum. Setelah mendapat gelar sarjana, MBS memutuskan untuk mempelajari sektor swasta dan juga bisnis internasional serta bekerja sebagai konsultan komisi ahli Arab.

MBS bekerja untuk beberapa badan negara sebagai konsultan untuk Komisi Ahli, bekerja untuk Kabinet Saudi. Pada tahun 2009, ia ditunjuk sebagai penasihat khusus untuk ayahnya, yang melayani sebagai gubernur Riyadh pada saat itu. Dapat dikatakan ini adalah langkah pertama terjun kedalam dunia politik. Setelah itu MBS mulai bangkit pada posisi yang lebih tinggi. MBS diangkat menjadi kepala Pengadilan Putra Mahkota, dengan pangkat menteri. Tahun sebelumnya, ayahnya telah diangkat putra mahkota setelah kematian Nayef bin Abdul Aziz. Langkah ambisius mulai ditunjukkan MBS ketika ia diangkat menjadi menteri pertahanan dan Sekretaris Jenderal Royal Court oleh Salman bin Abdul aziz yang pada waktu itu baru dilantik sebagai raja selanjutnya menggantikan raja Abdullah pada tanggal 23 Januari 2015.

Langkah pertama Mohammad bin Salman sebagai menteri pertahanan termuda di usia 31 tahun adalah memobilisasi koalisi pan-GCC untuk campur tangan menyusul serangkaian pemboman bunuh diri di Sanaa melalui serangan udara terhadap Houthis, dan

memaksakan blokade laut. Invasi yang dilakukan ini tanpa melalui koordinasi dengan dewan keamanan dan menteri Garda Nasional. Misi ini dapat dikatakan gagal karena tidak dapat menekan pemberontakan Houthis dan justru membuat ratusan jiwa rakyat sipil Yaman baik anak-anak, remaja dan orang tua terbunuh. Karena langkah tersebut MBS dikecam oleh berbagai pihak tokoh hak asasi manusia internasional dan membuat PBB menuding bahwa Arab melakukan kejahatan perang dengan terlibat perang Yaman.

Pada tahun yang sama yakni pada 2015, Raja Salman menunjuk pangeran MBS sebagai Deputi Putra Mahkota Arab Saudi dan juga sebagai ketua Dewan Urusan Ekonomi dan Pembangunan. MBS kemudian meluncurkan rencana ambisus untuk perubahan ekonomi dan sosial dan mengakhiri “kecanduan” untuk minyak. Rencana ini adalah sebuah program reformasi dengan nama “vision 2030”, sebuah visi Arab Saudi tentang masa depan, membayangkan peningkatan pendapatan non-minyak menjadi 600 miliar riyal (\$ 160 miliar, £ 123bn) pada 2020 dan 1 triliun pada tahun 2030, naik dari 163,5 miliar riyal pada tahun 2015. MBS ingin menciptakan dana kekayaan sovereign terbesar di dunia, bernilai hingga \$ 3trn, dengan uang yang dihasilkan oleh sebagian privatisasi perusahaan minyak negara, Saudi Aramco. Rencana tersebut juga mempertimbangkan untuk mengubah kurikulum pendidikan, meningkatkan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja, dan berinvestasi di sektor hiburan untuk membantu menciptakan pekerjaan bagi kaum muda.

Vision 2030 juga dijadikan sebuah produk untuk mengampanyekan diri MBS sebagai calon putra Mahkota yang ideal dan reformis. Pada bulan juni 2017, raja salman menjadikan pangeran MBS menjadi putra mahkota menggantikan Muhammad bin Nayef. Raja Salman melucuti semua jabatan Pangeran Nayef. Selain sebagai putra mahkota, saat itu Pangeran Nayef juga menjabat deputi perdana menteri dan menteri dalam negeri. Keputusan pergantian putra mahkota itu diambil demi kepentingan nasional Arab Saudi. Walaupun pada pergantian ini ada tindakan paksaan yang dilakukan

oleh Raja Salman dengan membawa pasukan keamanannya di bawah kendali istana kerajaan untuk menjaga disekitar istana yang ditempati pangeran Muhammad bin Nayef sehingga membuat ia secara tidak langsung ditempatkan sebagai tahanan rumah.

Motivasi

MBS merupakan lulusan terbaik hukum Universitas King Saud. Sebagai seorang bagian dari anggota kerajaan memiliki keyakinan besar untuk masuk jurusan atau program studi mana pun yang ia inginkan. Berdasarkan profil MBS yang memiliki dan menempati sejumlah profil strategis sekaligus kelebihan materi, maka berpeluang besar untuk mendapatkan segala sesuatu yang ia inginkan dengan mudah. Lebih mudah dari orang lain.

Pertanyaannya adalah ketika konspirasi pembunuhan Jamal Khasoggi terkuak, MBS terlihat menahan diri dan tidak memberi komentar apa pun atas tudingan internasional dan tudingan Turki. Berdasarkan paparan di atas, maka secara individu dapat disimpulkan bahwa MBS ketika konspirasi terkuak, MBS menjadi individu yang tidak ekspansionisme. Pemahaman karakter MBS akan lebih mudah dilakukan dengan mencermati interaksi MBS di tengah-tengah tuduhan konspirasi pembunuhan Jamal Khashoggi.

Implikasi Konspirasi Pembunuhan Jamal Khashoggi

Pertanyaannya saat ini, apakah konspirasi menimbulkan ketidakstabilan politik di ranah domestic. Konspirasi pembunuhan Jamal Khashoggi menimbulkan pengaruh. Ia menjadi indikator dari pembungkaman pers yang berakhir dengan tragis dan dramatis. Untuk mengetahui apa yang terjadi sebelum dan sesudah konspirasi. Sebelum konspirasi menguak, politik di Saudi Arabia terdapat dugaan terjadinya korupsi oleh pangeran-pangeran di Saudi Arabia, investasi besar-besaran ke berbagai negara dalam bentuk bisnis dan modernisasi militer. Dalam rangka modernisasi militer, Saudi Arabia tengah melaksanakan transaksi dagang dari Uni Eropa dan Amerika Serikat.

Transformasi Nasional

Perubahan besar-besaran terjadi pada Kerajaan Ibnu Saud dengan pelopor MBS yang didukung oleh Salman. Diantaranya mengembalikan lagi Islam moderat. Saat berdiri tahun 1932, negara Arab Saudi dibangun dengan dua visi, yakni agama dan politik, berkat kolaborasi antara Mohammed bin Abdul Wahab (sayap agama/Wahabi) dan Mohammed bin Saud (sayap politik). Kolaborasi tersebut mengantarkan Arab Saudi lebih menampakkan konservatisme daripada modernisme selama ini. Dua visi negara Arab Saudi itu memang dihormati dan dipegang teguh oleh generasi kedua pendiri negara modern Arab Saudi (1932), yakni putra-putra Muhammad bin Abdulaziz al-Saud. Akan tetapi, masa depan dua visi negara modern Arab Saudi tersebut kini dipertanyakan setelah generasi ketiga, seperti Putra Mahkota Pangeran Mohammed bin Salman, mulai memegang kendali negara (kompas, 2018).

Sejak Mohammed bin Salman mengambil alih posisi Putera Mahkota, ia berjanji bahwa pada kepemimpinannya nanti akan menerapkan konsep "Islam moderat dan terbuka" MBS menekankan bahwa mewujudkan kehidupan normal. Sebuah kehidupan yang terbuka bagi semua agama, tradisi, dan warga seluruh dunia. Dalam mewujudkan mimpinya tersebut MBS datang dengan rencana yang ambisi yakni "vision 2030". Visi itu dibangun di sekitar tiga tema, yakni masyarakat yang penuh energi dan antusiasme, perekonomian yang tumbuh dengan baik, serta negara yang ambisius.

Dalam setahun terakhir, MBS memimpin dan mengumumkan serangkaian reformasi di Arab Saudi. Kini, Arab Saudi mengizinkan lagi pengoperasian bioskop dan konser music pop, pagelaran busana, perempuan mengemudikan sendiri mobilnya dan menonton pertandingan olahraga di stadion. Semua hal itu dilarang selama puluhan tahun. Serta pembangunan kawasan mandiri NEOM di barat laut Arab Saudi senilai 500 miliar dollar AS. Reformasi ekonomi dicanangkan Pangeran Mohammad menyusul harga minyak yang turun drastis. Namun, reformasi menuntut

prasyarat seperti di beberapa negara di dunia, seperti keterbukaan, tidak bias jender, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Perubahan juga terjadi pada mulai terbukanya Arab pada non-muslim dengan Arab Saudi sepakat dengan Vatikan untuk membuat pertemuan setiap tiga tahun dan juga Pembelian lukisan Salvator Mundi, karya Leonardo Da Vinci. Perubahan ini memicu kontroversi karena Arab Saudi sebelumnya tidak mengizinkan pemeluk agama selain Islam untuk beribadah secara terbuka.

Namun seperti yang kita ketahui Ideologi MBS yakni nasionalis dan populis dengan sikap konservatif terhadap politik dan sikap liberal pada masalah ekonomi dan sosial. Jadi tak heran bila segala tindakan yang dilakukannya yang terkesan otoriter membuat beberapa pihak geram dan mengutuknya.

Sikap konservatif terhadap politik ini lebih kepada sikap MBS dalam perpolitikan yang sampai saat ini menganggap bahwa kritik yang dilontarkan oleh orang lain mengenai kebijakannya akan menghancurkan posisinya. Jadi dia menganggap kritik sebagai ancaman dan bukan menganggap kritik sebagai sarana koreksi atas membenahi kesalahan. Sehingga tak heran bila respon yang diberikan MBS pada pihak yang mengkritiknya terbilang cukup ekstrim. Misalnya sikap MBS terhadap cuitan atas aksi penangkapan sejumlah aktivis hak asasi manusia di Arab Saudi. Sehingga Arab mengambil tindakan dengan memutuskan membekukan semua bentuk hubungan dengan Kanada, baik politik, ekonomi, maupun budaya. Dimulai dengan meminta duta besar Kanada yang ada di Arab kembali ke Kanada dan sebaliknya serta meminta semua pelajar dan mahasiswa Arab Saudi di Kanada segera meninggalkan negara itu. Tidak hanya itu Arab Saudi juga pernah menarik duta besarnya dari Stockholm pada Maret 2015 sebagai protes atas aksi Swedia mengkritik kondisi HAM di Arab Saudi. Juga Arab Saudi menurunkan hubungan dagang dengan Jerman setelah Jerman mengkritik blokade Arab Saudi terhadap Qatar pada Juni 2017.

Dengan adanya kritik yang datang dari berbagai pihak dan jika kritik dibiarkan terus akan menyebabkan rakyat Arab belajar

dan membangun sikap kritis warga, lembaga, dan mungkin akan memicu pemberontakan yang mengancam sistem kekuasaan monarki. Terlebih lagi saat ini kritikan dari segala arah lebih tertuju pada MBS yang notabene sebagai tokoh reformis dimata masyarakat Arab sehingga jika membiarkan masyarakat Arab kritis akan menyebabkan keraguan pada nilai reformis yang digalang MBS. Tentu saja MBS yang bahkan tidak memiliki emosi persaudaraan tidak akan tinggal diam.

Konsolidasi kekuatan

Dalam keluarga kerajaan terdapat banyak aturan dan peraturan. Juga status setiap orang berbeda sehingga tidak mungkin memiliki hubungan persaudaraan seperti saudara biasa pada keluarga pada umumnya. Sejak zaman dahulu, keluarga kerajaan tidak memiliki emosi dan hubungan keluarga, jika seseorang sudah tidak terjerat pada minat yang sama dan berdiri disisi yang berlawanan maka seseorang akan mengambil tindakan untuk menghilangkan ancaman. Jika sudah seperti itu tidak akan ada lagi kata keluarga. Seperti yang kita ketahui banyak diceritakan dalam sejarah bahwasanya banyak kerajaan hancur karena adanya konflik internal yang terjadi dalam kerajaan tersebut seperti adanya perebutan kekuasaan yang berujung pada perang saudara.

Penangkapan tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam pembangunan ekonomi, keuangan, keamanan, dan tata pelaksanaan pemerintahan Arab Saudi yang didalamnya terdiri dari pangeran, menteri, mantan menteri, dan sejumlah konglomerat papan atas, termasuk salah satu orang terkaya dunia, yakni Pangeran Al-Waleed bin Talal. Penangkapan ini dilakukan oleh komisi antikorupsi, komisi ini baru dibentuk dengan dekrit Raja Salman bin Abdulaziz dan dipimpin Putra Mahkota Pangeran Mohammed bin Salman. MBS juga sebelumnya mencopot Kepala Garda Nasional Saudi Mitaeb bin Abdullah Al-Saud, putra kesayangan mendiang Raja Abdullah dan calon kuat ahli waris takhta kerajaan sebelum kemunculan Mohammed bin Salman. Mitaeb dilaporkan sebagai salah satu pangeran yang ikut ditahan. Posisi Mitaeb amat diperhitungkan

karena dirinya mewarisi kendali garda nasional, sebuah pasukan elite dalam negeri yang dibangun dari unit-unit kesukuan, yang dibangun sang ayah puluhan tahun silam. Pangeran Mitaeb juga adalah anggota terakhir keluarga mendiang Raja Abdullah yang duduk pada posisi penting dalam struktur kekuasaan pemerintahan. Oleh karena itu dapat disimpulkan Penangkapan ini dilakukan dengan dalih membersihkan korupsi yang sudah lama bercokol di kerajaan dan sebagai salah satu upaya untuk membuktikan pada rakyat bahwa bila anggota kerajaan bersalah maka akan dihukum sama seperti rakyat. Namun pada kenyataan penangkapan ini dilakukan sebagai langkah untuk membersihkan segala macam ancaman yang berpotensi untuk mengguncang posisi MBS dan juga sebagai upaya mengkonsolidasikan kekuatannya dengan mengisi pos-pos penting yang kosong dengan orangnya sendiri. Tak hanya itu dengan tindakan tersebut akan membuat citra MBS dimata rakyat kian tinggi.

Negara Arab berbeda dengan negara-negara monarki lainnya yang mana posisi putra mahkota diserahkan dari saudara ke saudara secara bergiliran sesuai dengan senioritas. Namun saat ini model penyerahan kekuasaan ini beralih dari orang tua ke anak seperti yang umumnya berlangsung di negara-negara monarki lainnya. Seharusnya jika putra mahkota tetap pangeran Muhamad bin Naef tetap menjadi putra mahkota maka model penyerahan akan tetap serupa seperti sebelumnya namun berhubungan saat ini peralihan dari generasi kedua ke generasi ketiga dan juga bertepatan dengan penyerahan dari orang tua dan anak. Sehingga Lembaga Baiat yang dibentuk Raja Abdullah bin Abdulaziz al-Saud pada 2006 dan tujuan Raja Abdullah membentuk lembaga Baiat itu untuk mengalihkan wewenang penunjukan putra mahkota yang sebelum ini berada di tangan raja ke lembaga Baiat. Lembaga ini terutama didesain untuk menghindari perpecahan di jajaran generasi ketiga dalam proses suksesi di semua tingkatan jabatan di negara itu. Namun pada kenyataan perpecahan pun timbul, yang awalnya hanya secara halus namun saat ini sudah meninggalkan kepura-

puraan di depan umum, terbukti dengan banyaknya pangeran yang awalnya memiliki kekuatan dan kekuasaan harus dilucuti dari pos-pos strategis. Sebelumnya, siapa pun rajanya dan dari klan apa pun, semua klan yang menonjol memperoleh posisi penting. Akan tetapi, kini mereka sudah disingkirkan. Saat ini pos-pos strategis kerajaan sudah berada di bawah kendali putra mahkota. Baik itu bidang pertahanan keamanan, ekonomi, urusan departemen dalam negeri, dan lainnya. Hal itu tampak tak hanya di dalam negeri, juga terlihat dalam sejumlah kunjungannya ke luar negeri, baik ke Mesir, Inggris, Rusia, Perancis, maupun Amerika Serikat. Sehingga dengan begitu perlu dipertanyakan apakah para emir dari keluarga besar Al-Saud, khususnya para emir anggota lembaga Baiat memang netral atau mereka orang-orang Raja Salman yang bertujuan memudahkan MBS menjadi putra Mahkota. Jika ini tetap berlanjut tidak menuntut kemungkinan suatu hari terjadi kudeta.

Dibalik topeng

Pemerintah Arab Saudi menahan para aktivis HAM dan juga melarang sejumlah aktivitis HAM untuk bepergian. Para aktivis yang ditahan antara lain Loujain al-Hathloul, Eman al-Nafjan, Aziza al-Yousef, Nouf Abdelaziz dan Mayaa al-Zahrani. Saudi juga menahan pria aktivis seperti Ibrahim al-Modaimeegh, Mohammad al-Rabea, dan Abdulaziz al-Meshaal. Mereka Pemerintah Saudi menyebutkan, ada 17 orang yang pernah diperiksa. Dari 17 orang itu, 8 warga di antaranya dikenakan wajib lapor sampai penyelidikan selesai. Adapun 9 aktivis masih ditahan setelah dinyatakan mengakui tuduhan seperti berhubungan dengan organisasi yang dinilai berbahaya oleh pemerintah Saudi. Mereka juga dinyatakan sebagai pengkhianat dan mata-mata dari kedutaan asing. Tapi untuk meredakan gejolak dan membuat citra keluarga kerajaan kian baik, MBS melakukan pengalihan isu dengan munculnya penampilan Putri Haifa di majalah *Vogue* edisi bahasa Arab. Dalam foto itu putri Haifa mengkampanyekan pencabutan larangan perempuan untuk mengemudi. Hal ini sebagai pengalihan agar masyarakat

Arab melupakan para aktivis yang ditangkap dan dipenjarakan akibat mengkampanyekan hak perempuan untuk mengemudi.

Tindakan Arab Saudi menjadi sangat represif terhadap upaya kritik yang disuarakan para aktivis warganya dengan menangkap ulama dan cendekiawan kritis hingga terjadi peristiwa tewasnya wartawan senior asal Arab Saudi, Jamal Khashoggi, di Istanbul, Turki, pada 2 Oktober lalu. Khashoggi adalah salah satu sosok yang kritis terhadap MBS.





Menguraikan Kebijakan Politik Internasional
Presiden Filipina Rodrigo Duterte



WIPD
PUBLISHING
GROUP







BAB IX

MENGURAIKAN KEBIJAKAN POLITIK INTERNASIONAL PRESIDEN FILIPINA RODRIGO DUTERTE

Kompetensi akhir yang diharapkan:

1. Menguraikan kebijakan politik RRD di tengah krisis melawan kriminal dan pengedar narkoba
2. Menguraikan pentingnya kebijakan politik RRD di tengah krisis melawan kriminal dan pengedar narkoba melawan kecaman internasional dan domestik
3. Menunjukkan sikap kepemimpinan, berpikir kritis, cinta tanah air dan sikap menghargai perbedaan

A. Studi Kasus *War on Drugs!*

Duterte dikenal sebagai salah satu presiden yang sering membuat keputusan secara cepat dan terbilang meledak-ledak di hadapan publik seperti saat Duterte memerintahkan membatalkan kesepakatan pembelian helikopter Bell 412EPI dari Kanada senilai 235 juta dollar AS, atau setara dengan 12 miliar peso atau 3,4 triliun rupiah. Sejak Duterte menjadi seorang presiden hubungan antara Filipina dan Amerika Serikat juga kurang baik hal ini dikarenakan Duterte menolak tawaran menteri Amerika Serikat untuk membeli jet tempur F-16 buatan Amerika Serikat, bahkan Duterte menyebut pembelian jet tempur itu “Tidak berguna sama sekali”. Duterte juga mengecam mantan presiden Amerika Serikat Obama karena mengungkapkan rasa prihatin atas hak asasi manusia di atas pemerintahannya. Meskipun demikian, setelahnya Duterte berdamai dengan presiden baru Amerika Serikat Donald Trump.

Selain sebagai pribadi yang mudah mengambil keputusan secara mendadak Duterte adalah sosok yang akan menepati setiap janjinya seperti saat kampanye pemilu, Duterte mengungkapkan

akan mengubah Filipina menjadi negara federal karena Duterte menilai sentralisasi di Filipina menyebabkan banyak provinsi berada di garis kemiskinan, dan mengizinkan seorang presiden menjabat selama dua periode secara berturut. Kursi parlemen yang mayoritasnya di kuasai oleh pendukung Duterte juga mendukung perubahan konstitusi yang lebih luas, memperpanjang masa kerja anggota parlemennya menambah jumlah kursi parlemen hingga memberi otonomi keuangan di Provinsi. Rencananya rancangan amandemen konstitusi ini akan selesai pada akhir 2018 ini dan akan di laksanakan referendum pada bulan mei 2018, hal ini dipercepat agar tidak membuang-buang waktu dan uang rakyat menurut Roger Mercado selaku ketua panel amandemen. Saat ini pun majelis rendah di Filipina sedang mempelajari konstitusi yang telah berjalan selama 30 tahun. Namun para oposisi menilai hal yang di lakukan Duterte adalah cara ia memperpanjang kekuasaannya yang harusnya berakhir pada tahun 2022. selain berjanji mengubah Filipina menjadi negara federal Duterte juga berjanji melakukan pemberantasan korupsi di Filipina, hal ini telah Duterte buktikan dengan menghancurkan motor gede dan mobil-mobil mewah yang merupakan barang sitaan ilegal yang akan di impor ke negara-negara di Asia, jumlah totalnya sekitar 800 buah dengan nilainya lebih dari 75,7miliar, menurutnya penghancuran ini dilakukan agar para penjahat tidak bisa mendapatkan kembali barang-barang tersebut menggunakan identitas palsu.

Duterte juga sangat gencar dalam mengatasi pemberantasan narkoba dinegaranya ia telah melancarkan pemberantasan narkoba sejak 2016 dan telah menewaskan ribuan nyawa, di perkirakan setidaknya 4.354 nyawa telah melayang akibat upaya ini, namun organisasi-organisasi HAM meyakini jumlah ini bisa jadi tiga kali lipat, para pegiat HAM menganggap apa yang dia lakukan sama dengan kejahatan kemanusiaan, namun Duterte meyangkal ia menganggap apa yang dia lakukan adalah untuk menyelamatkan manusia dari barang mematikan tersebut, meski mendapat banyak kecaman dari dunia Internasional dan para pegiat HAM Duterte

sangat percaya diri bahwa yang ia lakukan adalah kebenaran dan hal ini populer di mata rakyat Filipina, bahkan Duterte berencana untuk menarik Filipina dari pengadilan pidana internasional (ICC) adalah suatu keputusan yang dianggap tak biasa, hal ini dilakukan setelah pengadilan pidana internasional menyelidiki upaya pemberantasan narkoba yang dilakukan oleh Duterte, hal ini merupakan lanjutan dari tuduhan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Duterte atas upayanya dalam memerangi narkoba yang telah merenggut ribuan nyawa, Duterte juga pernah menolak penyelidikan yang dilakukan PBB dalam kasus yang sama, Duterte terus membantah dan meyakini bahwa masalah narkoba adalah salah satu penegakan hukum di negara Filipina.

Rodrigo Duterte kembali membuat pernyataan yang sangat kontroversial, dia mempertanyakan “logika Tuhan”, hal ini ia sampaikan pada tanggal 22 Juni 2018 ketika berpidato di kota Davao, Duterte mempertanyakan logika Tuhan dalam terciptanya Adam dan Hawa yang dia anggap membingungkan, ia juga mengatakan jika ada seseorang yang mampu membuktikan jika Tuhan itu ada dan mempunyai foto bersama Tuhan ia mengatakan akan mengundurkan diri dari jabatannya, namun di sisi lain dia juga mengakui jika dia percaya pada satu Tuhan, dia juga mengatakan bahwa dia juga bukan seorang agnostik dan bukan ateis, hanya saja ia mempercayai ada pemikiran universal yang mampu mengendalikan alam semesta.

Tak cukup dengan perkataan dan pernyataan yang kontroversial bahkan sikap dan tingkah lakunya tak jauh berbeda dengan pernyataannya seperti pada saat Duterte mencium bibir seorang tenaga kerja Filipina yang ada di Seoul, Korea Selatan, hal tersebut dilakukannya saat Duterte melakukan sebuah agenda di Seoul, bukan hanya satu wanita bahkan wanita yang lainnya juga ia peluk dan ia cium pipinya, bahkan ia menanyakan status perkawinan pada wanita yang ia cium bibirnya. Hal ini sangat memicu kontroversi bahkan Duterte mendapat kecaman dari kelompok pembela hak-hak wanita, hal itu dituding untuk upaya pembelokan isu kebijakan

dan menutupi popularitasnya yang semakin turun dari tahun ke tahun.

Di Filipina, mudah sekali ditemukan transaksi narkoba di jalanan. Hal ini rupanya membuat Duterte yang saat itu menjadi Walikota Davao geram. Meskipun tidak secara langsung, namun terdapat satuan tugas (satgas) dinamai Duterte Death Squad yang melakukan eksekusi terhadap setiap transaksi narkoba di jalanan. Aksi ini kemudian dapat membuahkan hasil dengan menciptakan Kota Davao Filipina menjadi kota paling aman di seluruh Filipina. Kesuksesan ini yang membawa Duterte cukup percaya diri mencalonkan diri sebagai Presiden. Ditambah itu, pemilih terlihat menyukai Duterte sehingga Duterte terpilih menjadi Presiden pada tahun 2016.

Perang atas narkoba sudah pernah dilontarkan pada masa kampanye pilihan presiden di Filipina yang mana Duterte mencalonkan diri. Terdapat sejumlah kebijakan yang kemudian diberlakukan oleh Duterte ketika ia menjadi presiden. Kebijakan tersebut bertujuan untuk mengendalikan kestabilan kota yang terganggu akibat transaksi narkoba. Di tingkat nasional, pasca dilantik, Duterte memberi sinyal agar transaksi narkoba dan mafianya dilawan dengan perlawanan serius. Untuk itu, Duterte melalui aparat kepolisian dan aparat keamanan Filipina, menugaskan tembak ditempat setiap gembong narkoba yang ditemui. Duterte menyebutnya, "*shoot to kill*".

Sampai sekarang kebijakan ini masih dilaksanakan. Pelaksanaan kebijakan ini menuai *outcome* yang bervariasi. Sejumlah warga Filipina mengirimkan protes ketika mengetahui bahwa anak maupun sanak keluarga mereka hilang atau meninggal di jalanan. Duterte menjadi pihak yang disalahkan di posisi pertama, dan polisi serta aparat keamanan disalahkan berikutnya. Warga menilai sanak keluarganya yang hilang dan meninggal di jalanan merupakan buah dari kebijakan "*shoot to kill*" Duterte. Namun sampai sekarang kebijakan ini masih menuai pro dan kontra di rakyat Filipina. Tetapi, ini mampu menekan angka kejahatan dan

tindak kriminal akibat narkoba dan lainnya di Filipina. Menciptakan Filipina sebagai tempat yang lebih aman daripada sebelumnya. Hal menarik lainnya adalah Duterte meski mendapat kecaman dari Amnesty Internasional, namun ia terlalu kaku untuk berubah pikiran.

B. Nilai Kepemimpinan Ekspansionisme dalam Kepribadian Presiden Rodrigo Duterte

Rodrigo Duterte adalah Presiden Filipina yang ke-16, Duterte lahir di Maasin, Leyte, Persemakmuran Filipina pada 28 Maret 1945 yang mana pada saat itu berlangsung perang dunia kedua terjadi pengeboman nuklir oleh Amerika Serikat di Jepang (Miller, 2018; "Rodrigo Duterte-President of the Philippines-Biography.com-Biography," 2016).

Duterte adalah keturunan dari seorang pengacara Cebuano Vicente G Duterte yang mana pada saat itu sedang menjabat Gubernur Provinsi Davao. Ibunya adalah guru sekolah dan pimpinan sipil, Soledad Roa, yang berasal dari Cabadbaran. Duterte berasal dari keluarga yang di anggap menjadi keluarga politik dari kelompok Durano dan Almendras sebagai kekerabatan sehingga sejak kecil ia telah tumbuh dengan didikan para pelaku-pelaku politik karna selain ayahnya seorang gubernur, paman dan sepupunya juga seorang politisi yang memiliki jabatan strategis di Filipina.

Sebelum berkecimpung di dunia politik, Duterte adalah mahasiswa dari Lyceum Universitas Filipina, dan kolase Hukum dan Beda Kelak, ia memulai kariernya sebagai anggota kongres dan Walikota di Davao sejak 1986. Selain pernah menjadi Wakil Walikota dan Walikota di Davao, Duterte juga pernah ikut dalam keanggotaan Dewan perwakilan Filipina dari Juni 1998 hingga Juni 2001. Ia memiliki loyalitas tinggi akan partainya PDB-Laban sebagai partai nasional dan partai Hugpong Sa Tawong sebagai partai lokal. Ia mencalonkan diri sebagai Presiden Filipina pada tahun 2016 pada usia yang sudah tidak muda lagi yaitu 71 tahun setelah 7 periode

ia menjadi pelaku politik di Kota Davao. Meskipun sudah berumur 71 tahun, Duterte masih bersemangat di dunia politik, sosoknya yang penuh dengan kontroversi rupanya tidak mengurangi para pemilihnya sehingga Duterte mampu memenangkan pemilihan presiden di Filipina kali ini.

Duterte dapat meyakinkan masyarakat Filipina bahwa ia mampu melakukan yang paling baik untuk negara Filipina, bahkan Duterte berjanji menjalankan tugasnya dalam keadaan tidur sekalipun. Ia bertekad melakukan yang terbaik untuk bangsanya dan pelayanan kepada masyarakatnya harus benar-benar dilakukan secara total sehingga hal ini mampu memberikan rasa percaya dari masyarakat terhadap Rodrigo Duterte. Sehingga tidak mengherankan jika Duterte sangat menggebu dalam mewujudkan janjinya pada para pemilihnya terutama dalam perang melawan narkoba, kriminal dan korupsi.

Kepribadian, Motivasi dan Keyakinan

Presiden Duterte dikenal dengan perilakunya yang tidak seperti kebanyakan presiden yang telah menjabat sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi di Filipina. Presiden Duterte terkenal dengan latar belakangnya yang dekat dengan kehidupan jalanan. Sehingga membangun kepribadian yang dekat dengan pemikiran yang kaku, keras dan tidak dapat diatur. Presiden Duterte bahkan dikenal sebagai presiden dengan kepribadian yang mana ia sering secara unilateral mengambil keputusan sendiri. Ia tampaknya tidak terlalu memperhitungkan pandangan dari orang-orang terdekatnya seperti penasihat pemerintahannya. Bahkan sampai sekarang, bahkan ia dengan percaya diri sering menyuarakan pendapatnya secara apa adanya tanpa melalui juru bicara maupun menteri terdekat.

Namun demikian, Presiden Duterte bukan orang kebal kritik. Kritik seringkali ditujukan terhadap keputusan dan sikap Duterte akan suatu isu yang berkembang. Duterte pun nampaknya tak segan untuk membalas kritik yang ditujukan padanya. Pada sejumlah kesempatan, Duterte kerap kali menyuarakan balasan atas kritik

yang ia terima di depan publik maupun dalam ranah hubungan internasional. Sejumlah kritik yang pernah ia terima yakni kritik dari International Criminal Court terhadap kebijakan perang narkoba yang Duterte kampanyekan selama masa pemerintahannya.

Menantang Batasan-batasan

Presiden Duterte menjadi satu-satunya presiden di Asia Tenggara yang cukup berani berkomentar keras atas dominansi Amerika Serikat di Kawasan Asia Tenggara dan tekanan internasional. Duterte menjadi presiden yang mendapat kritik internasional atas beragam pelanggaran HAM yang dilakukan selama menjabat sebagai presiden sejak tahun 2016 (Miller, 2018). Padahal selama ini, setiap Presiden Filipina tidak pernah benar-benar menentang kepentingan nasional AS di wilayah Asia Tenggara utamanya di Filipina. Filipina, sebaliknya, memiliki sejarah panjang sebagai sekutu politis di wilayah Asia Tenggara. Bahkan hal ini dipertegas sejak pangkalan militer AS berdiam di wilayah Teluk Subic. Teluk Subic adalah sebuah teluk di pantai barat pulau Luzon sekitar 100 kilometer barat laut dari Teluk Manila. Kawasan ini bahkan merupakan lokasi dari fasilitas utama Angkatan Laut Amerika Serikat. Teluk Subic merupakan kawasan strategis yang masih menjadi bagian dari Laut China Selatan. Selain itu Pemerintah Filipina sejak tahun 2014 telah menandatangani kesepakatan peningkatan kerjasama sama militer pada 28 April. Kerjasama ini merupakan dampak dari semakin kuatnya dominasi dan pengaruh China di kawasan Laut China Selatan. Semakin menguatnya pengaruh China ini mengakibatkan sengketa baik di tingkat nelayan sipil dan angkatan bersenjata sulit dihindari. Untuk itu, kesepakatan ini dibuat yang memungkinkan militer Amerika Serikat memiliki akses ke sejumlah pangkalan militer, pelabuhan dan lapangan udara hingga sepuluh tahun mendatang. Kesepakatan ini adalah bentuk dari keinginan Filipina sebagai gantinya meminta AS untuk tidak membangun pangkalan militer secara permanen sejak pangkalan militer di Teluk Subic ditutup pada 1991 atas dorongan Presiden Qorazon Aquino yang memerintah pada 1986.

Salah satu senator Filipina beranggapan, membangun pangkalan militer AS di salah satu wilayah Filipina tidak akan memberi banyak manfaat untuk rakyat Filipina.



Menguraikan Kebijakan Politik Internasional
Presiden Emmanuel Macron



WAD PUBLISHING
GROUP







BAB IXI

MENGURAIKAN KEBIJAKAN POLITIK INTERNASIONAL PRESIDEN EMMANUEL MACRON

Kompetensi akhir yang diharapkan:

1. Menguraikan kebijakan politik EM di tengah krisis Demonstrasi Rompi Kuning 2018-2019
2. Menguraikan pentingnya kebijakan politik EM di tengah krisis kepercayaan konstituen domestic
3. Menunjukkan sikap kooperatif, berpikir kritis, cinta tanah air, dan menghargai perbedaan

A. Studi Kasus Demonstrasi Rompi Kuning 2018-2019

Demonstrasi ini mendapatkan namanya dari para demonstran yang turun ke jalan dan secara kompak mengenakan rompi kuning. Rompi kuning kemudian menjadi simbol pertentangan para demonstran yang mengatasnamakan dirinya sebagai perwakilan tenaga kerja kelas menengah ke bawah. Mereka turun ke jalan sebagai respon terhadap kebijakan yang diambil oleh Presiden Emmanuel Macron.

Perangkat kebijakan yang diperkenalkan oleh Presiden Emmanuel Macron terdiri atas restrukturisasi tenaga kerja berdasarkan performa, kebijakan untuk menaikkan pajak, menarik pajak kendaraan, dan menaikkan pajak harga bahan bakar.

Perkembangan unjuk rasa ini pertama menentang kenaikan pajak bahan bakar. Namun belakangan, muncul tuntutan termasuk kenaikan upah yang lebih baik, pajak yang lebih rendah, dan kesetaraan yang lebih besar dan partisipasi warga dalam pemerintahan (kompas.id, 2017). Unjuk rasa sini berjalan sejak bulan November 2018 hingga awal tahun 2019. Kronologi demonstrasi ini dapat ditelusuri pada berbagai berita online. Detik news menyediakan kronologinya (Kami, 2018).

B. Studi Kasus Popularitasi Presiden Merosot

Dampak unjuk rasa selama lebih dari 6 bulan di Perancis cukup terasa pada popularitas Presiden Emmanuel Macron. Melalui polling yang diselenggarakan oleh lembaga survei di Perancis, menghasilkan popularitas Emmanuel Macron yang merosok dari angka 60% ke 30%.

Meskipun sebelumnya presiden Emmanuel Macron telah merespon tuntutan demonstran. Presiden Emmanuel macron telah mengundang dan berbicara perwakilan demonstran di istana. Ia pun kemudian mengumumkan langkah pemerintah Perancis untuk melakukan perubahan kebijakan sedapat mungkin dan menjanjikan perbaikan yang lebih baik.

C. Nilai Kepemimpinan Konsiliatif dalam Kepribadian Presiden Emmanuel Macron

Emmanuel Macron merupakan presiden ke 25 yang lahir dari daerah Amiens, Perancis pada 21 Desember 1977. Emmanuel Macron merupakan keturunan dari Jena dan Michel Macron yang merupakan Profesor Neurologi di Universitas Picardy dan francoise Macron, Nogues. Emmanuel Macron menempuh pendidikan selama beberapa tahun di Lycee La Providence In Amiens yang didirikan oleh Yesuit sebelum dia melanjutkan pendidikannya di sekolah tinggi Elite Lycee Henri IV di Paris. Emmanuel Macron adalah seorang pejabat dan politikus yang terpilih menjadi seorang Presiden Perancis pada pemilihan umum tahun 2017. Emmanuel Macron mengalahkan Marine Le Pen dengan perolehan suara sebanyak 66,06 persen. Dia menjadi Presiden termuda negara Perancis dalam sejarah yang berusia 39 tahun. Sebelum terjun ke dunia politik, Emmanuel Macron merupakan seorang Bankir Investor Perancis. Pada tahun 2014 dia dilantik sebagai menteri ekonomi, pembaruan industri dan urusan digital dalam pemerintahan Manuel Valls, dia menekankan pada reformasi bisnis yang ramah. Mantan Perdana Menteri Manuel Valls sempat memandang remeh dan menyebutnya sebagai “populis kelas

ringan”, Namun sejumlah pengamat menuturkan, daya tarik Emmanuel Macron justru terletak di latar belakangnya yang tidak biasa di kalangan politisi, yakni bankir investasi dengan dompet berisi jutaan euro, yang berubah haluan menjadi pejabat publik. Sebagai kandidat yang belum pernah memegang jabatan lewat pemilu, Emmanuel Macron bisa menawarkan dirinya sebagai “anti-sistem” untuk warga yang muak dengan perpolitikan Perancis. Kepribadian Emmanuel Macron sangatlah unik.

Dia memiliki seorang istri yang jauh lebih tua usianya yaitu terpaut 25 tahun lebih tua dari Emmanuel Macron. Dia jatuh cinta pada guru dramanya yaitu Brigitte Trogneux. Brigitte Trogneux adalah seorang guru drama yang sudah menikah dan memiliki tiga orang anak. Namun dengan latar belakang tersebut keduanya tidak canggung untuk memulai suatu hubungan. Emmanuel Macron sempat memiliki satu hubungan dengan wanita seusianya namun hubungan itu tidak bertahan, kemudian Emmanuel Macron jatuh cinta pada Brigitte Trogneux dan pada tahun 2007 akhirnya mereka menikah setelah beberapa tahun berpisah karena orang tua Emmanuel Macron mengirimnya belajar di paris dan setelah Brigitte Trogneux menceraikan suaminya. Walaupun dengan jarak yang jauh dan berpisah beberapa tahun lamanya Emmanuel Macron ternyata masih dapat berhubungan dengan Brigitte Trogneux.

Dia memiliki kepribadian yang setia terhadap pasangannya. Dibuktikan dengan hanya dua kali memiliki kekasih dan mampu bertahan untuk berhubungan dengan Brigitte Trogneux walaupun dengan jarak yang jauh. Emmanuel Macron merupakan sosok yang luar biasa untuk dapat memperoleh simpati dari masyarakat. Dia memiliki kebijakan atau visi dalam kontestasi pemilihan Presiden dengan menjanjikan Perancis yang modern. Hal ini sangat bertolak belakang dengan kebijakan Donald Trump yang menginginkan Amerika Serikat agar kembali ke nilai-nilai lamanya. Selain itu Emmanuel Macron merupakan sosok yang sangat romantis, dia sering menyebut istrinya dengan kata belahan jiwa. Tentu saja kata-kata itu sangat tidak mudah diucapkan apalagi dengan perbedaan

usia yang cukup jauh. Namun hal itu tidak berlaku untuk Emmanuel Macron walaupun dengan perbedaan usia yang cukup jauh tidak membuat Emmanuel Macron merasa malu atau canggung memiliki seorang istri yang jauh lebih tua darinya dengan memperlakukan istrinya dengan romantis seperti rayuan-rayuan yang dilakukan oleh anak muda pada umumnya. Sempat dalam pertemuan antara Donald Trump dan Emmanuel Macron yang sama-sama membawa istrinya, mereka memperlakukan istrinya dengan sikap yang berbeda. Emmanuel Macron dengan kepribadian yang romantis menunjukkan sikap yang sangat manis kepada istrinya yaitu dengan menggenggam dan mencium tangan istrinya dihadapan publik, sebagai balasannya Brigitte Macron memandang wajah suaminya dengan senyuman dan tersipu malu, sementara perlakuan berbeda juga diperlihatkan Presiden Donald Trump kepada istrinya, Melania Trump. Sikap yang diperlihatkan Presiden Donald Trump sangat jauh berbeda dengan yang dilakukan Emmanuel Macron kepada istrinya. Presiden Donald Trump hanya memandang istrinya saja dengan keduanya memperlihatkan wajah yang tegang tanpa sedikit senyuman yang menghiasi wajah mereka.

Emmanuel Macron sangat menyadari jika hubungannya akan menjadi sorotan masyarakat jika dia menjadi seorang Presiden. Namun langkahnya tetap kukuh untuk mencalonkan diri sebagai seorang Presiden, tidak hanya itu dia secara terang-terangan membela kisah asmaranya. Dia tidak menutup-nutupi kisah cintanya bersama Brigitte Macron walaupun masyarakat memandang remeh dirinya. Menurutnya masyarakat yang memiliki pandangan remeh tentang asmaranya merupakan orang yang memiliki kesalahpahaman dan memiliki pandangan yang homogen. Alasan ini sejalan dengan yang dianut oleh Emmanuel Macron.

Emmanuel Macron saat melakukan kampanye mencetuskan beberapa hal yang akan dia lakukan saat terpilih menjadi Presiden Perancis adalah berkomitmen terhadap Perancis yang terbuka, serta berjanji mengedepankan inovasi dan reformasi ekonomi. Dia juga bersumpah akan melindungi kelas pekerja. Emmanuel Macron

menganut sistem liberalisme tradisional atau biasa disebut orang-orang yang pro terhadap Uni Eropa. Dia berani mengungkapkan bahwa Perancis harus tetap memegang teguh nilai-nilai Liberte, Egalite dan Fraternite yang masing-masing memiliki arti kebebasan, kesetaraan dan persaudaraan. Emmanuel Macron menunjukkan rasa simpati dan solidaritas terhadap warga pengungsi dan imigran. Walaupun dia berasal dari partai yang baru saja lahir, tidak memutuskan semangatnya untuk menjadi seorang pemimpin. Ini merupakan sebuah hal yang sangat ekstrim, mengingat dia seorang politikus yang baru lahir dan langsung membentuk partainya sendiri yang dia berikan nama En Marche! Yang memiliki arti maju kedepan!. Rasa percaya diri dan motto dari partainya, dia berhasil menjadi Presiden mengalahkan Marine Le Pen dari Partai Nasional. Emmanuel Macron berhasil menyingkirkan partai arus utama dan menyingkirkan partai sayap kanan yang mengusung islamfobia yang anti imigran dan ingin Perancis keluar dari Uni Eropa. Tentu saja ini sangat melegakan bagi warga Perancis dan bagi Uni Eropa setelah Emmanuel Macron yang berhasil menduduki kursi Presiden yang memiliki motto sejalan dengan keinginan warganya. Kemenangan Emmanuel Macron merupakan sesuatu hal yang sangat mudah untuk diraih karena sosok Emmanuel Macron merupakan sosok yang sangat kharismatik yang mampu mengambil hati hampir semua lapisan masyarakat mulai dari anggota serikat pekerja sampai anak-anak muda gaul. Setelah dilantik menjadi seorang Presiden banyak persoalan yang akan dihadapi oleh Presiden terpilih Emmanuel Macron sebab negara Perancis saat ini mirip dengan Negara Amerika Serikat dan Negara Inggris yang mana perbedaan antara politisi dan masyarakat yang mencolok.

Selain kharismatik, Emmanuel Macron merupakan sosok yang memiliki rasa simpati yang tinggi, hal ini dibuktikan dengan saat aksi kekerasan Israel yang menewaskan puluhan demonstran Palestina di perbatasan Gaza. Emmanuel Macron mengutuk kekerasan yang dilakukan tentara-tentara Israel yang tidak memiliki rasa kemanusiaan. Emmanuel Macron langsung menghubungi Raja

Yordania Abdullah dan Presiden Palestina Mahmud Abbas melalui via telepon untuk membahas kejadian tersebut. Tidak hanya itu Emmanuel Macron berusaha menghubungi Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu melalui via telepon. Dalam pernyataannya, Emmanuel Macron menegaskan kembali siap pemerintahnya yang menentang pemindahan kedutaan besar Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerusalem. Selain peristiwa itu, rasa simpatinya juga ditunjukkan terhadap warga imigran. Presiden Emmanuel Macron sangat menghormati warga-warga imigran, dia menegaskan bahwa dia mendukung sanksi finansial terhadap anggota Uni Eropa yang tidak mau menerima imigran, menurutnya anggota Uni Eropa seluruhnya mampu menerima para imigran dengan sikap yang kooperatif. Hal ini menimbulkan pertentangan dengan negara Italia. Wakil ketua perdana menteri Italia mengatakan pernyataan yang dilontarkan oleh Presiden Emmanuel Macron merupakan suatu kesalahan yang besar. Dia mengatakan bahwa banyak persoalan yang terjadi diakibatkan oleh para imigran. Tidak hanya dari negara Italia, dari dalam negeri pun juga menyoroti pernyataan Presiden Emmanuel Macron, pertentangan tersebut dilakukan oleh menteri dalam negeri Matteo Salvini, kubu sayap kanan jauh. Dia mengatakan bahwa banyak persoalan yang ditimbulkan dari datangnya para imigran. Jika Presiden Emmanuel Macron menganggap persoalan imigran bukan suatu permasalahan maka dia mengundang Presiden Emmanuel Macron untuk menghentikan cercaan dan menunjukkan kemurahan hatinya untuk membuka banyak pelabuhan Perancis dan menghentikan tekanan-tekanan terhadap perempuan, anak-anak dan pria yang ingin pergi ke Vetimiglia.

Selain memiliki rasa simpati yang tinggi, Presiden Emmanuel Macron juga memiliki sikap yang tegas namun lamban untuk memberikan sanksi yang setimpal karena Emmanuel Macron masih mempertimbangkan antara kesalahan dan sanksi yang diberikan berlaku adil atau tidak, selain itu dipengaruhi oleh sikap Presiden Emmanuel Macron yang memiliki rasa belas kasih, ini dibuktikan

dengan memecat ajudannya yang terbukti memukul demonstran di jalanan Paris. Pemecatan ini dilakukan setelah kasusnya berjalan tiga bulan. Sebelumnya telah terjadi demonstrasi pada *May day* yang digelar oleh serikat buruh di Perancis. Unjuk rasa ini sering berujung pada bentrokan dengan polisi. Pada saat itu terekam oleh sebuah kamera bahwa telah terjadi pemukulan terhadap demonstran oleh seorang laki-laki yang memakai baju polisi, belakangan diketahui bahwa seseorang itu merupakan staff ke Presidenan yang diberikan izin untuk menyaksikan aksi demonstrasi hanya sebagai pemantau saja. Namun tindakan staff tersebut melampaui batas sehingga hal ini menuai banyak kecaman terhadap Presiden Emmanuel Macron. Emmanuel Macron hanya memberikan cuti selama lima belas hari saja sebagai sanksinya tanpa diberi gaji. Setelah itu, dia tetap bertugas seperti sedia kala. Termasuk diantaranya, membantu koordinasi pengamanan untuk penyambutan tim sepak bola Perancis yang baru memenangi Piala Dunia di Rusia. Tentu saja hal ini banyak mengundang polemik di masyarakat, ini merupakan kesempatan untuk pemimpin oposisi Perancis untuk menjatuhkan kepemimpinan Presiden Emmanuel Macron, banyak kritikan terhadap sanksi yang diberikan terhadap ajudan Emmanuel Macron. Setelah polemik itu terjadi tiga bulan setelahnya, Presiden Emmanuel Macron menjatuhkan hukuman yang lebih tegas yaitu pemecatan dari pekerjaannya sebagai staff ke Presidenan dan membiarkan polisi menyelidiki kasus pemukulan tersebut. Keputusan yang diambil oleh Presiden Emmanuel Macron itu memantik apresiasi positif sejumlah kalangan.

Emmanuel Macron juga memiliki beberapa hal sifat-sifat yang buruk, Emmanuel Macron merupakan presiden Perancis yang di sebut-sebut memiliki sifat arogan, hal ini di lihat dari beberapa anggota partainya yang ingin mengundurkan diri dalam pemerintahan Emmanuel Macron. Sekitar 100 anggota partainya, *La Republique En Marche!* (LREM) mengancam akan mengundurkan diri karena menganggap Presiden Perancis itu kini kian arogan dan tak demokratis.

Kepribadian, Motivasi dan Keyakinan

Emmanuel Macron merupakan presiden ke-25 yang lahir dari daerah Amiens, Perancis pada 21 Desember 1977 di mana pada saat itu terjadi Perang Dingin. Macron merupakan keturunan dari Jena dan Michel Macron yang merupakan Profesor Neurologi di Universitas Picardy dan francoise Macron, Nogues. Ia menjadi dewasa di lingkungan para profesor yang membuat dia tumbuh menjadi sosok yang cemerlang. Emmanuel Macron menempuh pendidikan selama beberapa tahun di Lycee La Providence In Amiens yang didirikan oleh Yesuit sebelum dia melanjutkan pendidikannya di sekolah tinggi Elite Lycee Henri IV di Paris dan Paris X Nanterre (DEA dalam bidang Filsafat). Sehingga filsafat ialah bidang asli Macron sebelum akhirnya bekerja menjadi bankir.

Sebelum terjun ke dunia politik, Emmanuel Macron merupakan seorang Bankir Investor Perancis. Pada tahun 2014 dia dilantik sebagai menteri ekonomi, pembaruan industri dan urusan digital dalam pemerintahan Manuel Valls, dia menekankan pada reformasi bisnis yang ramah.

Mantan Perdana Menteri Manuel Valls sempat memandang remeh dan menyebutnya sebagai “populis kelas ringan”, Namun sejumlah pengamat menuturkan, daya tarik Emmanuel Macron justru terletak di latar belakangnya yang tidak biasa di kalangan politisi, yakni bankir investasi dengan dompet berisi jutaan euro, yang berubah haluan menjadi pejabat publik. Sebagai kandidat yang belum pernah memegang jabatan lewat pemilu, Emmanuel Macron bisa menawarkan dirinya sebagai “anti-sistem” untuk warga yang muak dengan perpolitikan Perancis. Kepribadian Emmanuel Macron sangatlah unik.

Macron adalah seorang pejabat dan politikus yang terpilih menjadi seorang Presiden Perancis pada pemilihan umum tahun 2017, pada tahun 2014 nama Macron belum terkenal oleh masyarakat Perancis kemudian ia menjadi calon presiden terkuat mengalahkan Marine Le Pen dengan perolehan suara sebanyak 65,8 persen (kompas.id, 2017). Terdapat dua hal menarik dari

pemilu Prancis. Pertama, Macron menjadi Presiden termuda negara Prancis dalam sejarah, dalam musianya yang masih 39 tahun. Kedua, margin keunggulan suara yang diperoleh Macron melampaui margin kemenangan Presiden Jacques Chirac dari partai konservatif yang meraih 82,2 persen suara atas ayah Marine Le Pen, pendiri Front Nasional sayap kanan, yaitu Jean-Marie Le Pen, dalam pemilihan presiden 2002 (kompas.id, 2017).

Saat melakukan kampanye ia mencetuskan beberapa hal yang akan dilakukan saat terpilih menjadi Presiden Prancis adalah berkomitmen terhadap Prancis yang terbuka, serta berjanji mengedepankan inovasi dan reformasi ekonomi. Dia juga berjanji akan melindungi kelas pekerja.

Pidato Presiden Macron juga menyatakan pendapatnya dan posisi Prancis di tengah-tengah ketidakpastian global. Ia menyatakan Prancis akan tetap Bersama dengan Uni Eropa dan mengedepankan kemitraan global yang strategis. Dia berani mengungkapkan bahwa Prancis harus tetap memegang teguh nilai-nilai *Liberte*, *Egalite* dan *Fraternite* yang masing-masing memiliki arti kebebasan, kesetaraan dan persaudaraan. Emmanuel Macron menunjukkan rasa simpati dan solidaritas terhadap warga pengungsi dan imigran. dalam beragam kesempatan ia menjamin komitmen Prancis untuk tetap berdampingan dengan Uni Eropa dan menjauhi praktik yang ia sebut dapat mengancam kestabilan global (kompas.id, 2017).

Emmanuel macron juga memiliki kepercayaan diri yang besar ini dibuktikan ketika ia maju sebagai calon presiden Prancis walaupun berasal dari partai yang masih muda, tidak memutuskan semangatnya untuk menjadi seorang pemimpin. Ini merupakan sebuah hal yang sangat ekstrim, mengingat dia seorang politikus yang baru lahir dan langsung membentuk partainya sendiri yang dia berikan nama *En Marche!* Yang memiliki arti maju ke depan! Rasa percaya diri dan motto dari partainya, dia berhasil menjadi Presiden mengalahkan Marine Le Pen dari Partai Nasional. Emmanuel Macron berhasil menyingkirkan partai arus utama dan

menyingkirkan partai sayap kanan yang mengusung Islam-fobia yang anti imigran dan ingin Perancis keluar dari Uni Eropa. Tentu saja ini sangat melegakan bagi warga Perancis dan bagi Uni Eropa setelah Macron yang berhasil menduduki kursi presiden yang memiliki moto sejalan dengan keinginan warganya.

Macron merupakan sosok yang memiliki simpati atas pelanggaran kemanusiaan yang terjadi di dunia internasional. Ia mengecam aksi kekerasan Israel yang menewaskan puluhan demonstran Palestina di perbatasan Gaza. Macron mengutuk kekerasan yang dilakukan tentara-tentara Israel yang tidak memiliki rasa kemanusiaan. Macron langsung menghubungi Raja Yordania Abdullah dan Presiden Palestina Mahmud Abbas melalui via telepon untuk membahas kejadian tersebut.

Tidak hanya itu Macron berusaha menghubungi Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu melalui via telepon. Dalam pernyataannya, Macron menegaskan kembali sikap pemerintahnya yang menentang pemindahan kedutaan besar Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Selain peristiwa itu, rasa simpatinya juga ditunjukkan terhadap warga imigran. Presiden Macron sangat menghormati warga-warga imigran, dia menegaskan bahwa dia mendukung sanksi finansial terhadap anggota Uni Eropa yang tidak mau menerima imigran, menurutnya anggota Uni Eropa seluruhnya mampu menerima para imigran dengan sikap yang kooperatif.

Selain memiliki rasa simpati yang tinggi, Presiden Macron juga memiliki sikap yang tegas namun lamban untuk memberikan sanksi yang setimpal karena Macron masih mempertimbangkan antara kesalahan dan sanksi yang diberikan berlaku adil atau tidak, selain itu dipengaruhi oleh sikap Presiden Emmanuel Macron yang memiliki rasa belas kasih, ini dibuktikan dengan memecat ajudannya yang terbukti memukul demonstran di jalanan Paris. Pemecatan ini dilakukan setelah kasusnya berjalan tiga bulan. Sebelumnya telah terjadi demonstrasi pada May Day yang digelar oleh serikat buruh di Perancis. Unjuk rasa ini sering berujung pada

bentrok dengan polisi.

Pada saat itu terekam oleh sebuah kamera bahwa telah terjadi pemukulan terhadap demonstran oleh seorang laki-laki yang memakai baju polisi, belakangan diketahui bahwa seseorang itu merupakan staff kepresidenan yang diberikan izin untuk menyaksikan aksi demonstrasi hanya sebagai pemantau saja. Namun tindakan staf tersebut melampaui batas sehingga hal ini menuai banyak kecaman terhadap Presiden Macron. Macron hanya memberikan cuti selama lima belas hari saja sebagai sanksinya tanpa diberi gaji. Setelah itu, dia tetap bertugas seperti sediakala. Termasuk diantaranya, membantu koordinasi pengamanan untuk penyambutan tim sepak bola Perancis yang baru memenangi Piala Dunia di Rusia (Dallison, 2018).

Menantang Batasan-batasan

Sikap menantang Batasan dapat dikenali dengan mempelajari tingkat keberanian seorang kepala pemerintahan untuk mengambil tindakan yang tidak populer. Tindakan tidak populer yang dimaksud ialah tindakan yang bertentangan dengan norma maupun hukum internasional. Selama memerintah Perancis, Macron menunjukkan sedikit sekali menentang norma dan nilai-nilai yang berlaku di Perancis. Sikap dia yang paling utama di dalam negeri ialah melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk menjaga kestabilan ekonomi Perancis di saat negara-negara Uni Eropa terancam dengan hutang tinggi.

Presiden Macron juga menegaskan sikap Perancis yang ingin menjaga keutuhan Uni Eropa dan tidak akan mengikuti Inggris untuk keluar dari Uni Eropa. Namun berkaitan dengan sikap kepala pemerintahan lain yang menunjukkan sikap bertentangan dengan sikap Perancis. Presiden Perancis dapat menunjukkan sikap tegas. Hal ini tecermin pada sambutan yang diberikan Presiden Perancis saat Presiden Amerika Serikan Donald Trump melangkah masuk ruang rapat dengan terlambat (kompas.id, 2018). Kantor berita *Associated Press* memberitakan saat Trump masuk ruangan, Presiden Perancis Emmanuel Macron langsung memelototi Trump.

Macron mungkin jengkel karena keterlambatan Trump membuat jadwal pertemuan bilateral mereka pada Jumat pagi menjadi tertunda (kompas.id, 2018).

Menghargai Perbedaan dan Tingkat Kompleksitas Informasi

Saat ini Perancis sedang dilanda gelombang dua isu yang menjadi perhatian utama Presiden Macron karena menentukan arah kebijakan negara. Isu tersebut ialah kebijakan imigrasi dan kebijakan anti-ras. Presiden Macron dalam pidato inaugurasinya menegaskan bahwa kebijakan imigrasi Perancis berjalan selaras dengan kebijakan Uni Eropa. Uni Eropa sendiri dengan tegas tidak menolak gelombang imigran yang berasal dari negara-negara berkonflik. Presiden Macron juga menolak bersikap anti-rasis. Pernyataan ini juga menjadi inti arah kebijakan yang akan diperjuangkan selama masa pemerintahannya. Hal ini berbeda dengan kampanye yang dilakukan oleh pesaingnya pada pemilu 2017 yang bersikap anti-Uni Eropa, anti-imigran, serta cenderung rasis seperti sebagian besar gelombang populisme yang melanda negara-negara maju di Amerika dan Uni Eropa.

Tidak banyak ditemukan bahwa Presiden Macron menantang komitmen terhadap kestabilan global. Contoh paling baik dari tindakan menantang batasan-batasan ini adalah tindakan sepihak yang dilakukan oleh Presiden Donald Trump.

Baru-baru ini, Presiden Macron mendapat komentar kurang menyenangkan dari Presiden Trump. Presiden Trump menilai Presiden Macron sebagai individu yang mengabaikan nasionalisme. Presiden Trump juga mengomentari capaian kepuasan warga Perancis akan 16 bulan pemerintahan Presiden Macron di Perancis yang mencapai penurunan signifikan (*“Macron’s approval ratings slip again in latest opinion poll–POLITICO,”* 2018). Merespon pernyataan Presiden Trump, Presiden Macron menyampaikan pada media bahwa ia yakin rakyat Perancis tidak mengharapkan agar ia merespon cuitan Presiden Trump (*“Macron brushes off Trump attacks: US alliance deserves ‘respect’ | France News | Al Jazeera,”* 2018). Macron juga menambahkan dalam wawancara dengan

media bahwa Amerika Serikat merupakan sekutu dan akan terus demikian. Sekutu yang mana resiko akan selalu diperhitungkan, yang dapat dijalankan meski sulit. Hal ini menyimpulkan meskipun di tengah-tengah situasi yang sulit demikian, Presiden Macron masih menghormati keberadaan dan peran Amerika Serikat.

Pernyataan Presiden Macron yang menyampaikan ia tidak perlu merespon dengan segera komentar yang dilontarkan oleh Presiden Trump, menandakan ia berhati-hati dalam menanggapi. Ia tidak terlalu responsif menilai pernyataan Presiden Trump yang kontroversial dan cenderung menunjukkan lemahnya penghargaan pada sesama Presiden di negara lain. Dengan demikian, Presiden Macron dengan pengalaman di pemerintahan dan memiliki bekal teknokrasi memahami betul hubungan diplomatic yang mesti dibangun antara sesama presiden dari negara-negara yang patut diperhitungkan. Berbanding dengan Presiden Donald Trump, maka Presiden Macron lebih memiliki pelatihan tentang norma dan etika diplomatic yang menjadikan ia berpikir bahwa komentar Presiden Trump bukanlah hal penting untuk segera ditanggapi.

Pernyataan Macron yang menyampaikan bahwa rakyat Perancis pasti tidak mengharapkan presidennya menanggapi cuitan Trump merupakan pertanda Presiden Macron mempertimbangkan persoalan itu sendiri dan mempertimbangkan apa yang konstituennya anggap lebih penting. Hal ini menjadi sinyal adanya gaya kepemimpinan yang konsultatif yang menjadi bagian dari gaya kepemimpinan konsiliatoris menurut Margareth Hermann (1980).

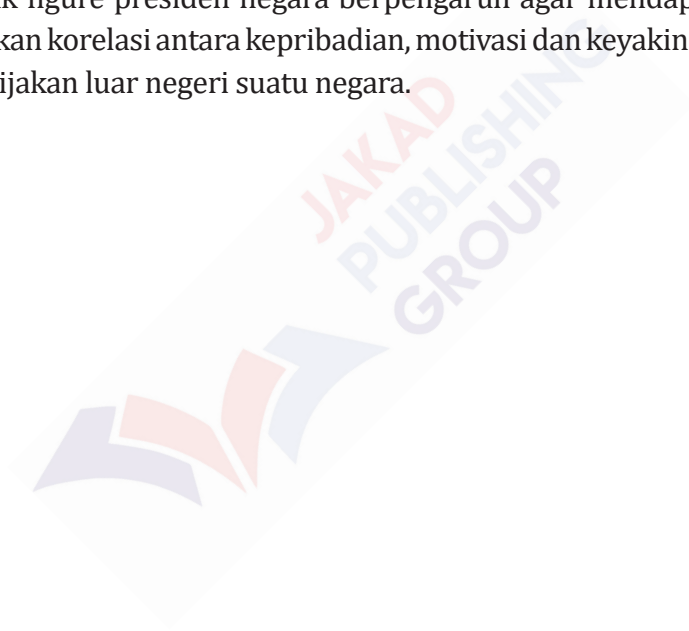
Presiden Macron juga adalah figur yang menyampaikan pentingnya untuk berbagi tanggung jawab. Tanggung jawab yang dimaksud adalah tanggung jawab untuk menjamin perdamaian global di tengah ketidakpastian saat ini. Dalam peringatan 100 tahun Perang Dunia I, Presiden Macron mengajukan agenda negara Uni Eropa memperkuat pertahanan. Pertahanan ini dilakukan dengan membeli produk pertahanan dari negara Uni Eropa sendiri. Belakangan ia menyebut bahwa perlu untuk mengurangi pembelian pertahanan dan keamanan dari negara yang tidak ikut

andil dalam pakta pertahanan NATO, dalam hal ini merujuk pada komitmen Amerika Serikat yang mundur dari kesepakatan NATO (“Merkel joins Macron in calling for EU army to complement NATO – POLITICO,” 2018).

Simpulan

Paparan di atas menjelaskan sedikit dari banyak yang dapat dijelaskan melalui level analisis individu. Level analisis individu membantu menilai kepribadian, motivasi dan keyakinan yang dimiliki oleh presiden suatu negara. Tulisan ini meneliti kepribadian, motivasi dan keyakinan yang dimiliki oleh Presiden Perancis Emmanuel Macron. Penjelasan di atas menguatkan bahwa Presiden Macron ialah figur presiden dengan gaya kepemimpinan lebih dekat pada meminjam konsep gaya kepemimpinan milik Jerrold Post, Hermann dan Hudson sebagai konsiliatoris. Ciri-ciri konsiliatoris lebih melekat pada figure Presiden Macron dari peristiwa yang terjadi semenjak Macron dilantik menjadi presiden pada Mei 2017. Ciri-ciri tersebut antara lain Presiden Macron sedikit menunjukkan bukti bahwa ia menantang Batasan-batasan dalam ranah hubungan internasional yang berlaku seperti hubungan diplomatic, kerjasama, kesepakatan yang telah berjalan dan lainnya. Jika dibandingkan dengan Presiden Trump, maka Presiden Macron lebih dekat dengan gaya kepemimpinan yang tidak ambisius dan tidak mengejar dan meluaskan kekuasaan pengaruhnya. Tidak hanya itu, Presiden Macron dapat disimpulkan sebagai pribadi yang banyak mengeluarkan pernyataan yang kontroversial menyikapi kritik yang diarahkan padanya. Ia dalam merespon kritik selalu mempertimbangkan apa yang menurut konstituennya anggap penting. Hal ini disampaikan sesaat ia mendapat kritik dari Presiden Trump melalui cuitan ditwitternya. Hal ini menandakan bahwa tingkat kompleksitas Presiden Macron dalam mengolah informasi yang sampai padanya cukup rendah. Dengan demikian ia tergolong pada figure pemimpin dengan *high complexity*. Terakhir adalah pandangan Presiden Macron atas hubungan dengan banyak mitra senegaranya. Presiden Macron dapat digolongkan sebagai

figure yang bertanggung jawab dalam proses. Hal ini ditegaskan melalui komitmennya untuk mengajak negara-negara anggota Uni Eropa untuk menguatkan pertahanan dan keamanannya di tengah-tengah sentiment mundurnya Amerika Serikat dan kerumitan yang diakibatkan oleh peristiwa yang melibatkan Rusia. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Presiden Macron adalah figure pemimpin dengan gaya kepemimpinan konsiliatoris setelah dikaji menggunakan level analisis individu. Saran untuk penelitian kedepannya adalah menggunakan data peristiwa dan diolah menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan melibatkan lebih banyak figure presiden negara berpengaruh agar mendapat hasil signifikan korelasi antara kepribadian, motivasi dan keyakinan dengan kebijakan luar negeri suatu negara.





Menguraikan Kebijakan Politik Internasional
Kanselir Jerman Angela Markle



ALFABETA
PUBLISHING
GROUP







BAB XI

MENGURAIKAN KEBIJAKAN POLITIK INTERNASIONAL KANSELIR JERMAN ANGELA MARKLE

Kompetensi akhir yang diharapkan:

1. Menguraikan kebijakan politik Angela Merkel terkait imigran dan keutuhan Uni Eropa
2. Menguraikan pentingnya kebijakan politik Angela Merkel terkait imigran dan keutuhan Uni Eropa
3. Menunjukkan sikap kooperatif, berpikir kritis, cinta tanah air dan sikap menghargai perbedaan

A. Studi Kasus Keutuhan Uni Eropa

Keutuhan Uni Eropa sedang diujung tanduk sejak referendum Brexit tahun 2016 menghasilkan hal yang tak pernah diprediksi sebelumnya. Inggris keluar dari keanggotaan Uni Eropa. Keluarnya Inggris sebagai salah satu anggota Uni Eropa, meninggalkan posisi yang menjalankan fungsi penting dan strategis di kawasan ini. Hal ini terjadi ketika Presiden Uni Eropa saat itu dijabat oleh Donald Tusk. Di sisi lain, rekan strategis Inggris, Jerman saat itu dipimpin oleh Kanselir Merkel.

Hengkangnya Inggris dari Uni Eropa tidak menyisahkan proses yang singkat. Sebaliknya, merupakan proses yang mendalam dan mengonsumsi energi. Perdana Menteri (PM) Theresa May yang ditunjuk menggantikan PM Cameron ditugaskan untuk mempersiapkan agar Brexit dapat dilakukan tanpa kerugian berarti di pihak Inggris. Namun sejak tahun 2016 hingga 2019, ternyata proses tersebut tidak dapat dilakukan dengan mudah. Muncul sejumlah hambatan baik dari eksternal maupun internal. Hambatan terbesar berasal dari internal, PM Theresa May mendapat tantangan dari partainya sendiri yakni Partai Konservatif. Lebih dari itu, PM Theresa May ditandingi oleh Mantan Walikota

London Boris Johnson yang terus menerus membakar manakala kesepakatan yang dibawah PM May ke sidang parlemen dinilai merugikan Inggris telak.

Deadline Inggris keluar dari Uni Eropa semakin dekat, semakin mengirim tekanan pada PM May. Tekanan menguat dari kubu Partai Konservatif yang “membangkang”. Bahkan di akhir sidang parlemen ketiga, PM May tidak dapat menyatukan suara anggota parlemen dari Partai Konservatif yang menguasai sebagian besar kursi di parlemen. Di akhir cerita, PM May kemudian mengundurkan diri. Melalui proses yang tidak singkat, pengunduran diri PM May dari kursi Perdana Menteri mengirim sinyal calon kandidat yang layak menggantikannya. Di akhir pertarungan kandidat, Boris Johnson terpilih sebagai perdana menteri.

Proses yang panjang menuju BRexit bukannya tidak mengundang respon dari negara-negara tetangganya utamanya negara yang memiliki fungsi dan peran sama strategis dan sama pentingnya di kawasan, yakni Jerman.

Jerman kala itu dipimpin oleh Kanselir Merkel, menyambut dengan hampir tanpa ekspresi, hasil referendum Brexit. Merkel menilai keluarnya Inggris dari Uni Eropa merupakan hal yang patut disayangkan mengingat Inggris merupakan negara penting di kawasan ini. Merkel tidak menunjukkan rasa kehilangan, ia menunjukkan sikap profesionalisme dan negarawan manakala perubahan besar sedang terjadi di Inggris. Merkel menilai komunikasi dengan Uni Eropa harus tetap dilakukan dan Inggris diminta mengikuti prosedur keluar dengan baik sehingga ke depannya masih dapat bekerja sama dengan Uni Eropa tanpa kekurangan berarti kecuali yang sudah seharusnya.

Kanselir Merkel, meningkatkan bahwa Uni Eropa akan tetap kompetitif meskipun tanpa Inggris (Lionel & Guy, 2020). Ia lebih jauh menambahkan, Merkel melihat Inggris setelah Brexit sebagai kompetitor bagi blok Uni Eropa (Rym, 2020). Dengan keluarnya Inggris, maka ini menempatkan Inggris sebagai satu-satunya negara di tengah-tengah kawasan Eropa.

B. Nilai Kepemimpinan Konsiliatif dalam Kepribadian Kanselir Jerman Angela Markle

Kepribadian

Angela Dorothea Merkel (née **Kasner**; lahir 17 Juli 1954) adalah politisi yang berasal dari mantan ilmuwan peneliti Jerman yang saat ini ditulis menjabat sebagai Kanselir Jerman sejak 2005 dan Ketua Persatuan Demokrat Kristen (CDU) sejak 2000. Merkel adalah perempuan pertama yang memegang kedua jabatan tersebut.

Setelah mendapat gelar doktoralnya di bidang kimia fisik, Merkel terjun ke dunia politik pasca-Revolusi 1989. Ia sempat menjabat sebagai wakil juru bicara untuk kabinet Jerman Timur yang terpilih secara demokratis untuk pertama kalinya tahun 1990. Setelah penyatuan kembali Jerman tahun 1990, ia terpilih sebagai anggota Bundestag mewakili Stralsund-Nord-vorpommern-Rügen di negara bagian Mecklenburg-Vorpommern.

Ia kemudian diangkat sebagai Menteri Perempuan dan Pemuda pada tahun 1991 di bawah pemerintahan Kanselir Helmut Kohl, lalu Menteri Lingkungan tahun 1994. Setelah Kohl dikalahkan tahun 1998, ia menjabat sebagai Sekretaris Jenderal CDU. Tahun 2000, Merkel diangkat menjadi ketua partai CDU perempuan pertama setelah Wolfgang Schäuble dipaksa turun karena terlibat skandal sumbangan.

Setelah pemilu federal 2005, Merkel terpilih sebagai Kanselir Jerman perempuan pertama sekaligus pemimpin koalisi besar yang mencakup CDU; partai saudaranya di Bayern, Persatuan Sosial Bayern (CSU); dan Partai Demokrat Sosial Jerman (SPD). Dalam pemilu federal 2009, CDU memperoleh jumlah suara terbanyak, dan Merkel dapat membentuk pemerintahan koalisi berkat bantuan Partai Demokrat Bebas (FDP). Pada pemilu federal 2013, Merkel memperoleh 41,5% suara dan membentuk koalisi besar kedua bersama SPD setelah FDP kehilangan seluruh kursinya di Bundestag.

Pada tahun 2007, Merkel terpilih sebagai Presiden Dewan Eropa dan mengetuai forum G8. Ia memainkan peran utama dalam perundingan Perjanjian Lisbon dan Deklarasi Berlin. Salah satu prioritas utamanya adalah memperkuat hubungan ekonomi transatlantik lewat penandatanganan perjanjian Dewan Ekonomi Transatlantik tanggal 30 April 2007. Merkel juga berperan dalam penanganan krisis keuangan di tingkat Eropa dan internasional. Dalam krisis tersebut, ia mendapat julukan «sang pengambil keputusan». Di dalam negeri, Merkel mengurus reformasi layanan kesehatan dan berbagai persoalan seputar pengembangan energi masa depan.

Merkel dianggap sebagai pemimpin *de facto* Uni Eropa. Ia juga terpilih sebagai tokoh paling berkuasa kedua di dunia menurut majalah *Forbes* tahun 2012 dan 2015, peringkat tertinggi yang pernah dicapai seorang perempuan. Bulan Desember 2015, majalah *Time* memilih Merkel sebagai *Person of the Year* dengan julukan «Kanselir Dunia Bebas.» Tanggal 26 Maret 2014, Merkel secara resmi menjadi kepala pemerintahan petahana dengan masa jabatan terlama di Uni Eropa. Ia merupakan pemimpin senior G7. Bulan Mei 2015, ia terpilih sebagai wanita paling berkuasa di dunia untuk kesembilan kalinya oleh majalah *Forbes*.

Ia terlahir dengan nama Angela Dorothea Kasner di Hanburg sebagai anak perempuan dari Horst Kasner, seorang pendeta Lutheranyang berasal dari Berlin, dan istrinya Herlind Jentzsch, seorang guru yang berasal dari Danzig. Pada 1954 ayahnya mendapat panggilan untuk melayani gereja di Quitzow, dekat Perleberg, dan keluarganya pun pindah ke Templin. Merkel dibesarkan di daerah pedesaan, hanya 80 km di sebelah utara Berlin, di Republik Demokratik Jerman yang komunis.

Ia belajar di Templin dan di Universitas Leipzig, dan mendalami fisika dari 1973 hingga 1978. Merkel bekerja dan belajar di Institut Pusat untuk kimia fisika dari Akademi Ilmu Pengetahuan dari 1978 hingga 1990. Setelah lulus dengan gelar doktor dalam fisika, ia bekerja dalam bidang kimia kuantum.

Gelar Doktornya diperoleh pada tahun 1986 dengan disertasi tentang Akselerasi partikel dengan hidrokarbon sederhana.

Pada tahun 1989, Merkel pernah terlibat gerakan demokrasi setelah runtuhnya tembok Berlin. Kemudian dia bergabung pada partai Demokratischer Aufbruch. Setelah pemilihan umum yang pertama dan demokratis (dan satu-satunya) di negara Jerman Timur, ia menjadi wakil juru bicara dari pemerintahan sementara yang baru sebelum penyatuan kembali di bawah Lothar de Maizière. Pada pemilihan umum pertama setelah penyatuan kembali pada Desember 1990, ia terpilih sebagai anggota Bundestag dari sebuah daerah pemilihan yang mencakup distrik Nordvorpommern dan Rügen, serta kota Stralsund. Partainya kemudian bergabung dengan CDU di Jerman bagian barat dan Merkel menjadi Menteri Urusan Perempuan dan Pemuda dalam kabinet Helmut Kohl. Pada 1994, ia diangkat sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Keamanan Reaktor Nuklir, yang membuat ia semakin menonjol secara politis. Ia pun memiliki sebuah *platform* untuk membangun karier politiknya. Sebagai salah seorang anak emas Kohl dan menteri termuda di kabinetnya, ia biasa disebut Kohl sebagai «das Mädchen» («sang gadis»).

Sikap

Diucapkan oleh Golda Meir, mantan Perdana Menteri Israel. Yang dimaksud Meir di sini adalah dalam bekerja sama, seorang pemimpin perlu menginvestasikan waktu dan usaha untuk membina hubungan baik perlu dibina agar sang pemimpin bisa diterima dengan tangan terbuka.

Angela Merkel merupakan seorang pemimpin yang mengutamakan kerja sama tim menggalang kerja sama tidak saja dengan berbagai pihak di dalam negeri, tetapi juga dengan negara-negara tetangga untuk mengatasi masalah, menciptakan stabilitas di bidang ekonomi, politik, dan sosial dan menciptakan perdamaian di tingkat regional dan internasional.

Dia sangat rasional, menghindari menarik perhatian dan memiliki kontrol diri yang baik. Ia juga selalu berusaha membuat

yang terbaik dari situasi tertentu. Perilaku seperti itu ditunjukkan oleh Angela Merkel, misalnya, di KTT NATO di Kehl di Rhine pada tahun 2009. Ketika Berlusconi keluar dan Merkel ingin menyambungnya, ia sedang berbicara di telepon. Dia menjadikannya, wanita paling kuat di dunia, tunggu. Alih-alih bereaksi dengan kesal, seperti yang mungkin Anda harapkan dari orang-orang yang terus-menerus didekati, Angela Merkel tetap santai. Dia awalnya menyapa semua tamu lain dan ketika Berlusconi masih di telepon setelah tamu terakhir tiba, dia hanya diabaikan. Contoh lain adalah pilihan tingkat mereka. Merkel tidak memilih fisika karena itu adalah hasratnya, tetapi karena dia pikir itu pilihan paling masuk akal. Orang yang bertindak lebih impulsif dan emosional cenderung memilih bahasa dalam situasi Merkel. Cara bicaranya yang agak monoton dan emosional yang tidak terlalu membangkitkan semangat juga tipikal bagi orang normatif (DÜLLINGS, 2013).

Kepribadian seseorang juga dapat diterka dengan pengamatan mendalam di ruang kerjanya. Sangat rapi dan rapi. Pilihan warna (hitam, putih, abu-abu) juga ideal untuk yang normatif. Orang-orang normatif juga suka menggantung pemandangan atau potret pendiri perusahaan di kantor mereka. Ada gambar Konrad Adenauer di ruang kerja Merkel (DÜLLINGS, 2013).

Kepribadian Angela Merkel jauh lebih tidak terpolarisasi daripada karakter Peer Steinbrück. Steinbrück memiliki dua sifat kuat, lima tipe HUMM® lainnya agak lemah. Selain normal dan politisi, tipe kepribadian lain juga berperan dalam karakter Merkel. Sekalipun tipe kepribadian lain tidak memiliki pengaruh dominan pada karakter Merkel, mereka tetap mengarah pada kepribadian yang lebih seimbang secara keseluruhan.

Tetapi alasan utama mengapa Merkel lebih populer di kalangan massa adalah karena gaya normatifnya, yang hampir selalu mengarah pada perilaku yang dapat diterima secara sosial. Merkel tidak ingin menarik perhatian dan memiliki kontrol diri tingkat tinggi. Selain itu, ia biasanya menyelaraskan perilakunya dengan konvensi sosial. Contoh penghentian nuklir. Awalnya dia

menentanginya. Namun, ketika opini publik di Jerman condong ke Fukushima, itu dapat diubah relatif cepat dari pendapat aslinya. Merupakan hal yang umum bagi orang normal dalam posisi manajemen bahwa mereka pertama kali mendapatkan ide dan memperoleh semua pendapat yang relevan. Sebelum keputusan dibuat, situasi dan opsi untuk tindakan dianalisis dan argumen yang diajukan ditimbang.

Gaya Kepemimpinan Faktual

Namun Angela Merkel juga memiliki kelemahan, tentu saja. Masalah khas politisi normatif adalah bahwa ia selalu menjaga jarak tertentu dari orang lain dan karenanya sering terlihat berkarisma dan sulit untuk dapat didekati. Di pesta-pesta di masa mudanya, mungkin akan sulit bagi Angela Merkel, tetapi sebagai kanselir jarak tertentu bahkan diharapkan. Penampilan yang agak akrab akan disambut oleh kebanyakan orang, tetapi tidak diharapkan.

Poin kritik lainnya adalah dia ingin melakukan yang terbaik dari setiap situasi. Meskipun ini adalah pendekatan yang sangat terpuji, ini menghasilkan reaksi bukannya bertindak. Angela Merkel mengelola dan mengelola tantangan yang dihadapi, tetapi dia mungkin melewatkan kesempatan untuk menciptakan situasi baru. Anda tidak akan dapat mengharapkan visi dan ide revolusioner darinya karena sulit baginya untuk melanggar konvensi yang ada dan untuk terlibat dalam sesuatu yang sama sekali baru (DÜLLINGS, 2013; Welt.de, 2015).

Terbuka

Angela Melker adalah seorang wanita yang dibesarkan saat komunis berkuasa di Jerman Timur, dan akhirnya dengan sikap terbukanya membawa ia sangat disayangi sekaligus disegani (bukan ditakuti) oleh warga Jerman yang dulunya hidup terpisah dan berbeda haluan politik. Hal ini tidak lepas dari sikapnya yang normatif dan karena itu mudah diterima oleh khalayak umum.

Begitupun yang terjadi di Negara lain. Dengan keterbukaan ini mereka menanamkan “kepercayaan” pada para pendukung.

Hasilnya, para pendukung umumnya menjadi lebih loyal pada pemimpin wanita mereka. Misalnya: Aung San Suu Kyi, pemimpin para pejuang demokrasi dari Myanmar, memiliki banyak pengikut dan pendukung setia, karena keterbukaannya pada rakyat. Sikap ini memupuk kepercayaan rakyat akan ketulusan Aung San Suu Kyi dalam memperjuangkan nasib mereka.

Cerdas

Angela Merkel dikenal sosok wanita yang cerdas, sejak dari kecil ia mendapat perhatian lebih disekolahnya, terutama oleh para guru, seperti semua anak dikeluarga Kristen taat. Sejak dini pun Angela belajar untuk bersikap sangat sopan dengan orang lain. Angela Merkel dikenal sebagai siswa cerdas, unggul dalam matematika dan pelajaran bahasa Rusia. Ia menyelesaikan studinya di bidang fisika di Universitas Leipziq.

Pemikir yang Lamban

Angela Merkel merupakan seseorang yang cepat mengenali problem yang terjadi, namun keputusannya selalu datang lambat, Merkel waspada dalam mengambil keputusannya sehingga sebelum mengambil keputusan ia memikirkannya secara matang terlebih dahulu. Menurut Lauk yang saat ini menjabat sebagai dewan ekonomi Uni Kristen Demokrat (CDU) itu juga merupakan ciri khas sistem yang dijalankan Merkel. "saya yakin, saya bukan pengambil keputusan *ad hoc*," kata Merkel tentang dirinya. "saya memahami proses dikeseluruhan perkembangan dan mempertanyakan setiap keputusan, bagaimana konsekuensinya. "Christian Wulff yang baru mundur dari jabatan presiden, pernah menyebut gaya kepemimpinan Merkel sebagai "menggiring dari belakang". Bahkan sering Merkel bekerja lembur di kantornya selama hampir 14 tahun masa kepemimpinannya sebagai kanselor (Welt.de, 2015).

Tegas

Merkel menggambarkan dirinya sebagai kepala partai Persatuan demokrat Kristen (CDU), yang tegas dalam berbicara. Dan seakan Merkel sang pemimpin partai konservatif, berusaha mengukur Merkel sang kanselir yang menyampaikan pesan keberanian, dan ketegasan, yang disampaikannya pada tanggal 31 agustus 2015: "Jerman adalah Negara yang kuat. Kita telah melakukan banyak hal-Kita Pasti Bisa!", ujarinya menginspirasi ribuan masyarakat Jerman dengan kata-katanya. Kata-kata tersebut mengingatkan kita mengenai apa yang perlu dan mungkin untuk dilakukan, kata-kata itu mengingatkan masyarakat Jerman akan nilai-nilai yang mereka anut. Selalu di garis depan mengatasi krisis keuangan di kawasan Eropa, ia dikenal karena ketegasannya - mencegah dana talangan, menyangkal permohonan dan membela seluruh Eropa. Dengan gayanya yang sederhana dan redah hati, ia telah mengambil hati para pemilih Jerman dan mendapat julukan "Mutti," yang berarti "Ibu."

Keras

Angela Merkel memiliki sikap keras ini karena terbukti dari pernyataan Menteri dalam negeri Jerman yang baru holt seehofer yang menggambarkan islam bukan bagian dari Jerman dalam sebuah wawancara yang diterbitkan pada jumat (16/3). Pernyataan tersebut telah memicu kegaduhan politik setelah 2 hari ia memasuki masa jabatan keempatnya. Terkait dengan pernyataan ini Merkel segera membantah pernyataan tersebut ia mengatakan, terlepas dari akar yahudi Yudeo-Kristen, lebih dari 4 juta muslim kini menciptakan rumah mereka diJerman. "Muslim adalah bagian dari Jerman dan dengan mereka, agama mereka, islam, sama seperti bagian dari jerman" kata Merkel kepada wartawan setelah mengadakan pembicaraan dengan perdana menteri Swedia Stefan lofven, seperti dilansir di Khaleej Times.

Pemberani

Angela Merkel memiliki sifat pribadi yang berani dalam memutuskan kebijakan mampu membuat Jerman menjadi negara yang lebih terbuka kepada orang asing. Hal ini tercermin pada sejumlah pernyataan yang pernah dilontarkan oleh Angela Markle. Sejumlah pernyataan tersebut, sebagaimana dirangkum dalam bagian bawah tulisan ini bertolak belakang dengan situasi domestik yang menginginkan Jerman untuk lebih melihat persoalan domestik daripada memperhatikan persoalan luar misalnya arus pengungsi. Kondisi domestik ini merupakan cermin dari gelombang populisme yang melanda Jerman disaat Kanselir Angela Merkel menjabat pada periode ketiga dan menjelang pemilihan kanselir untuk periode berikutnya. Di tengah gelombang populisme yang melanda Uni Eropa dan sebagian besar kawasan lainnya seperti Amerika Utara, bersikap terbuka dan mendukung penuh komitmen Jerman terhadap dunia luar merupakan hal yang sulit dilakukan apalagi bagi seorang perempuan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Angela Merkel memiliki kapasitas sebagai pemimpin yang mampu bertahan di tengah tantangan yang sedang melanda negerinya untuk tetap berkomitmen pada pergerakan pro-globalisasi daripada mengikuti pergerakan sentimen anti-globalisasi yang semakin menguat(Welt.de, 2015).

Persepsi

Angela Merkel merupakan seseorang yang pragmatis. Ia berpandangan bahwa yang benar adalah segala sesuatu yang membuktikan dirinya sebagai yang benar dengan melihat kepada akibat-akibat atau hasilnya yang bermanfaat secara praktis.

Angela Merkel berpandangan bahwa jerma harus mampu mempertahankan lapangan kerja dan membuka lapangan pekerjaan yang baru, memperbaiki pendidikan, mengurangi kesenjangan, regional dan memanfaatkan teknologi digital dalam waktu 10-15 tahun ke depan.

Nilai-nilai

Nilai liberal Angela Merkel mengatakan migran yang mengungsi di Jerman harus menghormati nilai-nilai liberal yang ada di Jerman. Nilai-nilai tersebut diantaranya adalah sebagai berikut ini:

1. Toleransi
2. Keterbukaan
3. Kebebasan beragama
4. Kebebasan berpendapat

Kami berharap orang-orang yang datang kenegara kami dapat menghormati hukum kami “ujar Markle, kepada seorang wartawan suriah yang datang ke Jerman pada tahun 2015 lalu.

Merkel telah mengizinkan lebih dari satu juta pengungsi timur tengah untuk memasuki Jerman selama dua terakhir. Partai konserfatif Merkel Christian Democratic Union (CDU), telah kehilangan banyak dukungan karena keputusan Merkel untuk membuka perbatasan Jerman pada tahun 2015, bagi pengungsi Suriah dan Irak.

Prinsip

Kepemimpinan transformasional. Salah satunya Angela Merker. Pemimpin yang transformasional antara lain adalah pemimpin yang berorientasi pada pendukung, prinsip, dan perubahan.

Berorientasi Padan Prinsip

Merkel merupakan seorang yang sangat hati-hati dalam bertindak maupun dalam mengambil keputusan. Hal ini karena Merkel adalah pemimpin yang sangat memegang prinsip yang telah ia perjuangkan. Itu merupakan ciri pemimpin transformasional adalah berorientasi pada prinsip, artinya dalam bertindak dan mengambil keputusan terutama karena didorong oleh prinsip yang diperjuangkan, bukannya oleh kekuasaan yang diraih. Mereka menunjukkan semangat yang tinggi dalam mempertahankan dan memperjuangkan prinsip yang mereka pegang. Dan salah satu ciri tersebut dipunyai oleh Angela Merkel.

Berorientasi pada Pendukung

Merkel merupakan seorang pemimpin wanita yang lebih mengutamakan orientasi pada pendukung. Dia pemimpin yang peduli dan memberdayakan para pendukung dengan memberi kesempatan kepada orang-orang yang dia pimpin untuk memberikan pendapat atau masukan ide pemikiran kepadanya. Ia juga melakukan berbagai upaya untuk pengembangan diri. Selain memberdayakan pengikutnya, Merkel dalam bertindak lebih banyak yang bertindak sebagai mentor dari pada sebagai "bos". Ia memberi petunjuk dan bimbingan yang diperlukan kepada para pendukung untuk melakukan pekerjaan yang ditugaskan. Selain bertindak sebagai mentor, Merkel juga merupakan pemimpin yang lebih memberi teladan kepemimpinan kepada bawahannya salah satunya kedisiplinan.

Simpulan

Angela Merkel merupakan wanita berpengaruh di dunia. Ia memegang jabatan eksekutif paling tinggi di Jerman selama beberapa periode. Ia bahkan menjadi wanita paling lama memegang jabatan kanselir beberapa periode berturut-turut. Hal ini meletakkannya sebagai pemimpin dunia, berdasarkan paparan secara kualitatif di atas, sebagai pemimpin dengan karakter konsiliatif.

Menguraikan Kebijakan Politik Internasional
Presiden Rusia Vladimir Putin







BAB XII

MENGURAIKAN KEBIJAKAN POLITIK INTERNASIONAL PRESIDEN RUSIA VLADIMIR PUTIN

Kompetensi akhir yang diharapkan:

1. Menguraikan kebijakan politik Presiden Rusia Vladimir Putin di tengah ketidakpastian global menggunakan perspektif politik internasional
2. Menguraikan pentingnya kebijakan politik Presiden Rusia Vladimir Putin di tengah ketidakpastian global menggunakan perspektif politik internasional
3. Menunjukkan sikap kooperatif, berpikir kritis, cinta tanah air dan sikap menghargai perbedaan

A. Studi Kasus Kepentingan Nasional Rusia di Ukraina

Pada penghujung tahun 2013 tepatnya di bulan November, kita dikejutkan oleh peristiwa penting di Ukraina yang banyak analisis merujuk pada apa yang telah terjadi pada Georgia pada 2008 silam. Pada November 2013, presiden terusir Viktor Yanukovych secara mengejutkan membatalkan kontrak perjanjian European Association Agreement (BBC, 2014b, 2014c). Akibatnya ratusan mahasiswa turun ke jalan ibukota Kiev menuntut agar presiden Yanukovych mundur. Aksi brutal yang dilakukan oleh polisi dan aparat keamanan Ukraina saat itu mengakibatkan demonstrasi berjalan rusuh. Sebanyak 77 demonstran meninggal, 600 lainnya dirawat, dua aktivis ditemukan tewas karena luka tembak dan beberapa lainnya hilang (BBC, 2014b).

Aksi brutal aparat keamanan Ukraina ini mengundang perhatian dunia utamanya Uni Eropa dan Amerika Serikat (US). Uni Eropa dan US sejak lama telah memiliki kepentingan nasional untuk mempengaruhi politik luar negeri Ukraina pasca runtuhnya

Uni Soviet (sekarang Russia) pasca berakhirnya Cold War di tahun 1991. Di sisi lain Russia juga menginginkan agar Ukraina tetap berada dalam *sphere of influence-nya* (BBC, 2014a). Kedua pengaruh kepentingan antara UE-US (untuk kemudian disebut Barat) dan Russia berbenturan langsung di Ukraina.

Benturan kepentingan yang terjadi antara dua kubu menimbulkan ancaman terhadap stabilitas politik dan keamanan tidak hanya secara kawasan tetapi juga internasional. Kajian ini hendak merangkum linearitas Russia sebagai aktor rasional dalam menyikapi perubahan politik yang tiba-tiba di Ukraina. Harapan dan tujuan yang ingin disampaikan penulis dalam kajian ini adalah memaknai intervensi Russia di semenanjung Crimea yang dipandang sebagai politik aneksasi oleh negara-negara Barat daripada untuk memastikan perdamaian di kawasan perbatasan dan melindungi orang-orang berbahasa Russia di semenanjung Crimea.

Transisi Politik Ukraina

Kerusuhan yang sudah berlangsung selama tiga bulan di Ukraina akhirnya menemukan titik terang, tapi belum benar-benar berakhir. Gelombang demonstran ini merupakan wujud protes yang menuntut Presiden Ukraina Viktor Yanukovych lengser pasca pembatalan UE Association Agreement pada 21 November 2013.

Demonstrasi yang tadinya berjalan damai menjadi demonstrasi berdarah akibat kekerasan yang berujung aksi brutal aparat keamanan. Nasib 45 juta rakyat Ukraina sedang dipertaruhkan oleh segelintir orang yang berdemo menduduki Independence Square dan gedung-gedung pemerintahan vital di sekitarnya di Ibukota Ukraina, Kiev.

Kerusuhan ini berakar pada persaingan sengit dua kubu yang mempengaruhi jalannya pemerintahan dan kebijakan politik luar negeri Ukraina. Orientasi luar negeri Ukraina pun bercabang pada Barat, yakni UE dan US; dan Russia–Moskow. Parlemen sebagai dewan legislatif dan pemerintah sebagai lembaga eksekutif memiliki sifat yang bertolak belakang dan tidak dapat berjalan

seiring. Parlemen cenderung condong pada kepentingan UE dan US, sementara pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Yanukovych cenderung sejalan dengan kepentingan Russia. Puncaknya, Presiden Ukraina Viktor Yanukovych secara mengejutkan menolak bantuan yang diprakarsai oleh Uni Eropa pada November 2013 lalu, mengakibatkan mahasiswa Kiev turun ke jalan menuntut presiden mundur (BBC, 2014b).

Aksi demonstrasi ini tidak lepas dari geokultur penduduk Ukraina yang terbagi menjadi dua. Penduduk yang menempati Ukraina Barat berbatasan dengan Russia memiliki latar belakang sejarah dan bahasa yang secara kultural lekat dengan Russia. Oleh karena itu, penduduk Ukraina Barat menyangsikan langkah demonstran di Kiev yang mengatasnamakan suara bulat seluruh Ukraina (Ioffe, 2014).

Sementara itu, para demonstran yang mayoritas adalah mahasiswa di Kiev turun ke jalan mewakili banyak penduduk yang memilih untuk bergabung dengan Uni Eropa. Mereka sebagian besar bermukim di wilayah yang berbatasan langsung dengan negara anggota UE seperti Polandia.

Pemukulan dan penculikan demonstran pro-UE atau pro-oposisi membuat protes semakin berlanjut dan memanas. Pada 20 Februari 2014 tercatat sebagai demonstrasi paling berdarah di Ukraina. Kementerian Kesehatan melaporkan sekurang-kurangnya 77 orang tewas dalam demonstrasi tersebut dan 600 lainnya terluka dan beberapa lainnya ditemukan meninggal dunia akibat luka tembak dan menghilang.

Meskipun gelombang demonstran sudah usai dan perekonomian kembali lancar pasca penggulingan Presiden Ukraina Viktor Yanukovych, kini Ukraina menghadapi tekanan baru dari Russia yang kabarnya membatalkan dana talangan senilai 15 miliar AS. Selama ini Russia telah mengguyurkan pinjaman sebesar 3 miliar AS. Russia juga membatalkan diskon 30% harga gas yang dijual ke Ukraina. Akibatnya Ukraina harus membayar utang sebesar 1,8 miliar dollar AS per bulan untuk gas yang diimpor dari Russia.

Tak hanya itu, Russia juga akan mengancam menaikkan pajak ekspor Ukraina. Perlu diketahui, sejak lepas dari Uni Soviet pada 1991, hampir setengah perdagangan Ukraina mengalir ke Russia, terutama produk-produk baja dan alat-alat berat(BBC, 2014b).

Melihat perkembangan politik Ukraina yang menuai berbagai ancaman dari Russia, sekutunya seperti Amerika Serikat dan Inggris segera merespon. Presiden Amerika Serikat Barrack Obama segera mengutus Wakil Menteri Luar Negeri Williams Burns terbang ke Kiev. Inggris juga mengutus Menlunya William Hague yang dijadwalkan untuk bertemu peimpimpinan baru dan perwakilan IMF di kota yang sama(BBC, 2014b). Pertemuan ini tidak lain akan membahas bagaimana negara-negara Barat akan menyelematkan Ukraina dari Russia. Akan tetapi, banyak yang berspekulasi bahwa Ukraina akan mengalami kesulitan untuk menerima prasyarat yang diberikan oleh IMF. Beberapa analis seperti George Friedman dan Paul Craig Roberts yakin Ukraina tidak dapat memenuhi prasyarat yang diberikan.

Melunaknya demonstrasi di Kiev yang mendukung pemecatan mantan presiden Viktor, harus dibayar sama mahalannya dengan munculnya demonstrasi di semenanjung Crimea. Semenanjung Crimea dihuni oleh penduduknya yang mayoritas, hampir 60%, berbahasa Rusia. Mereka menentang pemerintahan baru Turchynov dan meneriakkan gerakan pro-Russia. Bahkan di beberapa tempat mereka mengganti bendera Ukraina dengan bendera Russia. Benturan pendukung Russia dan pro-UE pun terjadi, setidaknya seorang dilaporkan tewas. Pemerintah setempat pun mengajak tokoh berpengaruh untuk membujuk warga di semenanjung Crimea untuk kembali ke rumah masing-masing dan tidak melakukan aksi demonstrasi lanjutan("Ukraine crisis: Turchynov warns of 'separatism' risk," 2014). Sejauh ini mantan presiden Viktor Yanukovych masih belum diketahui kabarnya ia tengah berlindung di pangkalan Angkatan Laut Russia di Sevastopol(BBC, 2014b).

Babak Baru Politik Luar Negeri Ukraina

Belajar dari revolusi yang terjadi di belahan dunia yang lain utamanya di Arab atau “Arab Spring”, parlemen segera bersidang untuk mencegah benturan antara demonstran dan aparat keamanan yang semakin memburuk. Dalam sidang bersama parlemen dan kesepakatan yang dimotori oleh tiga menteri luar negeri (Perancis, Polandia dan Jerman), presiden Yanukovych mengajukan sepakat agar pengunduran dirinya dilakukan setelah pemilihan umum digelar lebih awal pada pertengahan 2014 nanti (BBC, 2014a). Namun kesepakatan ini ditolak oleh para demonstran. Lebih jauh, para demonstran menilai anggota dewan parlemen yang menandatangani kesepakatan sebagai “penghianat.” Aksi demonstrasi berjalan makin panas di luar parlemen yang akhirnya memaksa parlemen untuk menolak kesepakatan semula yang diajukan oleh Presiden Yanukovych dan menonaktifkan Presiden Yanukovych. Beberapa analisis seperti George Freidman dan Julia Ioffe menilai aksi demonstrasi ini sangat tidak konstitusional sehingga membuka celah bagi Russia untuk melakukan politik intervensi. Julia Ioffe mengatakan,

“The situation in Kiev—in which people representing one half of the country (the Ukrainian-speaking west) took power to some extent at the expense of the Russian-speaking east—created the perfect opportunity for Moscow to divide and conquer.”(Ioffe, 2014).

George Freidman dalam analisisnya berjudul “Geopolitical Weekly : Ukraine Turns From Revolution to Recovery” menulis,
“... to the extent that Ukraine had a constitutional democracy, that is now broken by people who said their intention was to create one.”(Freidman, 2014)

Pasca presiden Yanukovych digulingkan, terjadi kekosongan kekuasaan (*vacuum of power*). Kekosongan pemerintahan ini lalu diisi oleh parlemen yang didominasi oleh oposisi. Berbeda dengan orientasi politik luar negeri Yanukovych, parlemen

cenderung condong pada politik luar negeri di bawah pengaruh Barat, utamanya Uni Eropa dan US. Parlemen lalu menunjuk pemerintahan sementara (*interim government*) yang dipimpin oleh presiden pelaksana (*acting president*) Turchynov (BBC, 2014b).

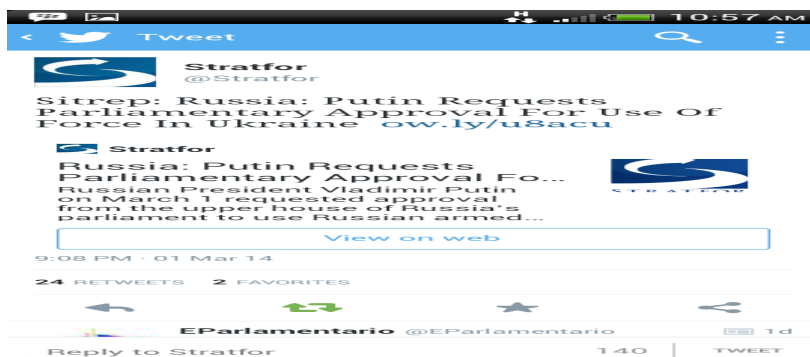
Melihat situasi yang mana Yanukovych—sekutu dekat Russia—digulingkan, Russia mulai memusatkan perhatiannya terhadap apa yang tengah terjadi di Ukraina. Berbagai ancaman baik secara finansial dan kerjasama dikeluarkan oleh Russia. Menghadapi tekanan Russia, seolah gayung bersambut pemerintahan sementara Ukraina lalu mengalihkan perhatiannya kepada Barat. Ukraina yang dihadapkan pada problem finansial pada dua pekan lalu mengharap bantuan finansial dari sekutunya, Barat (“Ukraina Butuh Tunai 35 Miliar,” 2014). Melalui IMF, Barat sepakat untuk menyelamatkan Ukraina dari ancaman gagal bayar hutang atau *default*. Perwakilan IMF pun dijadwalkan bertemu dengan presiden pelaksana, Turchynov di Kiev (Lowrey & Gordon, 2014).

Langkah pemerintah sementara yang cenderung condong pada Barat memicu sejumlah demonstrasi di wilayahnya, utamanya wilayah dengan penduduk mayoritas keturunan dan berbahasa Russia. Di Crimea, aksi demonstrasi dan turun ke jalan terjadi. Penduduk Crimea mengganti bendera Ukraina di wilayah mereka dengan bendera Russia sambil meneriakkan bahwa mereka adalah bagian dari Russia (“BBC NEWS,” 2014).

Rupanya aksi demonstrasi pro-Russia ini mendapat perlawanan tidak hanya dari aparat keamanan dan polisi Ukraina, tetapi juga masyarakat pendukung UE. Di saat yang sama, pemerintah Ukraina pun melalui tokoh-tokoh masyarakat menghimbau agar para demonstran menghentikan aksi mereka. Namun, himbauan ini diabaikan dan berujung pada satu orang tewas karena benturan kekerasan (“BBC NEWS,” 2014).

Eskalasi konflik terus terjadi. Sekurang-kurangnya 2000 pria berseragam militer dan bersenjata yang tidak dikenali melakukan infiltrasi ke obyek-obyek vital di semenanjung Crimea. Mereka menduduki sejumlah kantor penting dan gedung-gedung

pemerintahan (Charter, Magnay, & Eastwood, 2014). Berbagai spekulasi muncul menilai bahwa kelompok pasukan tersebut merupakan tentara Russia yang berusaha untuk memprovokasi. Bahkan beberapa media cetak seperti *cnn.com*, *bbc.co.uk* dan *foreign policy*, dan laporan *intelligence analysis* misalnya *Stratfor* melalui akun twittermelaporkan bahwa Presiden Putin telah meminta parlemen Russia untuk menyetujui intervensi lebih lanjut ke Crimea.



Secara mengejutkan parlemen merespon permintaan Presiden Putin dan menyetujuinya.



Sebelum informasi sah dirilis oleh pemerintah Russia (Charter et al., 2014), para diplomat dan pejabat tinggi pemerintahan negara-negara berkepentingan menunjukkan keprihatinannya dengan menghimbau agar Russia tidak melakukan intervensi lebih

jauh. Salah satunya ialah Presiden Barrack Obama yang secara langsung menghubungi Presiden Russia Vladimir Putin. Dalam pernyataan yang dikeluarkan oleh White House, Presiden Obama mengharapkan agar Presiden Putin tidak memperparah situasi yang saat ini karena hal ini akan berdampak pada posisi Russia di mata dunia. Sebagaimana pernyataan White House yang dikutip oleh media berita internasional sebagai berikut,

“Russia’s invasion to Crimean will lead to compromise its standing in the international community” (Charter et al., 2014)

Terkait alasan itulah, US kemudian membatalkan pertemuan tingkat tinggi G-8 yang rencananya akan digelar pada Juni di Sochi, Russia (“Russia G8 status at risk over ‘incredible act of aggression’ in Crimea, says Kerry,” 2014). Namun, Presiden Putin mengabaikannya (Charter et al., 2014). Situasi menjadi lebih buruk ketika Parlemen Russia kemudian meminta Presiden Putin untuk memulangkan duta besar Russia untuk US (Stratfor, 2014).



Di kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri US menghubungi Menteri Luar Negeri Russia untuk meminta konfirmasi terkait situasi yang berkembang dan asumsi bahwa pasukan Russia telah melakukan infiltrasi di Crimea (“Russia G8 status at risk over ‘incredible act of aggression’ in Crimea, says Kerry,” 2014). Merespon asumsi yang berkembang terkait dugaan infiltrasi militer Russia ke Crimea, Presiden Putin dalam percakapan telepon oleh Obama melalui situs pemerintahan mengungkapkan,

“... in the case of further spread of violence to Eastern Ukraine and Crimea, Russia retains the right to protect its interests and the Russian-speaking population of those areas.” (“Telephone conversation with US President Barack Obama,” 2014)

Hal ini kemudian membenarkan bahwa 2000 pasukan yang berjaga di Crimea merupakan tentara Russia (Bennet, 2014). Tidak lama kemudian, juru bicara Ukraina untuk United Nations (PBB), Yegor Pyovarov, mengatakan kepada CNN bahwa jumlah pasukan Russia di semenanjung Crimea telah mencapai 15.000 tentara (Charter et al., 2014). Meskipun demikian, duta besar Russia untuk UN, Vitaly Churkin, mengungkapkan tidak ada keinginan untuk Russia untuk menarik pasukannya dari Crimea. Sebaliknya ia menyalahkan Uni Eropa karena telah mengakibatkan korban jiwa di pihak demonstran. Churkin menambahkan ada tentara Ukraina yang mengancam pemerintahan lokal di Crimea yang pro-Russia dan menggantinya dengan pemerintahan yang dapat mendukung pemerintahan sementara Ukraina saat ini (Charter et al., 2014). Pemerintah sementara Ukraina saat ini telah menetapkan mantan Presiden Viktor Yanukovych sebagai buron dan berniat membawa Yanukovych ke mahkamah internasional (ICC) atas tuduhan genosida yang menewaskan lebih dari 80 demonstran pada Februari lalu (“Ukraine MPs call on ICC to try Yanukovych for crimes against humanity,” 2014). Oleh karena itu, Russia melihat ini sebagai suatu ancaman dan berniat untuk melindungi pemerintah lokal yang pro-Russia.

Menanggapi pernyataan Kremlin di atas, presiden pelaksana Turchynov menilai intervensi yang dilakukan Russia merupakan pengulangan atas apa yang pernah terjadi dengan Georgia pada 2008 lalu (“Ukraine’s crisis : the tale of two countries,” 2014). Para analisis seperti Steve LeVine juga menambahkan bahwa Russia akan menerapkan strategi yang sama pada Ukraina (LeVine, 2014).

Armenia, Azerbaijan dan Georgia menjadi referensi esensial untuk mengamati strategi Russia ke depannya. Sebagai referensi, Georgia terpaksa kehilangan dua wilayah vitalnya yang berbatasan

langsung dengan Russia yakni Ossetia Selatan dan Abkhazia pasca intervensi Russia di tahun 2008 (LeVine, 2014). Berdasarkan kajian yang pernah dikeluarkan terkait konflik-konflik di atas, Steve LeVine yakin Russia akan mendukung aksi separatisme di semenanjung Crimea dan mengakibatkan Ukraina harus kehilangan salah satu wilayah pentingnya, yakni Crimea (Levine, 2014).

Kepentingan Russia di Semenanjung Crimea Memahami Perspektif Russia

Russia memiliki banyak kepentingan di Crimea, mulai dari sosial, politik, kultural, ekonomi dan keamanan. Alasan utama munculnya banyak kepentingan Russia di wilayah tersebut berasal dari (1) ambisi Russia untuk menjadi pemain global di kawasan tersebut sebagaimana China di kawasan Asia, Jerman di tengah-tengah Uni Eropa, dan US di kawasan Atlantik Utara (LeVine, 2014); (2) ikatan yang kuat antara wilayah tersebut sebagai negara-negara pecahan Uni Soviet dan Russia sebagai warisan Uni Soviet (Kocaman, 2007); dan (3) ambisi Russia untuk mengabaikan diplomasi US (Tucker, 2014).

Sehubungan dengan Crimea, Crimea merupakan semenanjung yang terletak di Laut Hitam Karena posisinya yang berdekatan dengan negara-negara dengan geopolitik strategis seperti Turki, Romania, Russia menjadikan Crimea sesuai untuk basis pangkalan militer dan armada laut. Tujuannya semata-mata tidak hanya untuk memantau akses rute pipa gas yang mengalir dari dan menuju Russia, tetapi juga untuk memantau negara sekutunya yang secara politik juga erat dengan Barat (Kocaman, 2007).

Crimea juga merupakan markas besar bagi armada kapal perang Russia, markas empat resimen misil pantai, empat pangkalan militer Russia dan lusinan pangkalan lainnya yang menjadi rumah bagi lebih dari ratusan bahkan ribuan tentara Russia (Lally, 2014). Kehadiran pangkalan armada dan pasukan Russia di Ukraina tidak lepas dari kebijakan Uni Soviet di tahun 1990. Untuk menghindari kekosongan kekuasaan (*vacuum of power*) di Kaukasus Selatan, Russia berusaha untuk terus meletakkan negara-negara pecahan

Uni Soviet dalam kontrol dan pengaruh sehingga Kremlin belum sepenuhnya menarik militernya dari negara-negara tersebut (Allison, 1999).

Di Crimea juga terdapat Black Sea Fleet yang memiliki arti strategis untuk mengawasi dan atau lebih jauh dari itu, mengancam, negara-negara pecahan Uni Soviet utamanya Georgia dan Ukraina yang dikenal berada di bayang-bayang pengaruh Barat (Lally, 2014). Di kawasan inilah, Russia berhadapan dengan Turkey yang memiliki ambisi yang sama yakni kontrol pipa gas dari dan menuju Turki. Secara strategis, kawasan Laut Hitam utamanya semenanjung Ukraina, memiliki sedikit arti strategis bagi Russia dibandingkan dengan kawasan Balkan.

Tidak banyak analisis dilakukan untuk memetakan kepentingan keamanan energi Russia di Laut Hitam maupun di negara-negara pecahan Uni Soviet di sekitarnya, seperti Georgia dan yang menjadi kajian utama tulisan ini, Ukraina. Namun, intervensi Russia di kawasan tersebut, khususnya di semenanjung Crimea dapat dilihat dari sejarah Crimea dan konstruksi geokultur Russia itu sendiri.

Sejarah Crimea

Semenanjung Crimea sejatinya merupakan bagian dari Uni Soviet yang secara sepihak diberikan kepada Ukraina oleh Nikita Khrushchev, presiden Uni Soviet yang masih memiliki kekerabatan etnis Ukraina, saat itu pada tahun 1954. Karena penduduknya yang memiliki ikatan kekerabatan kuat dengan Uni Soviet, penduduk Crimea sebagian besar berbahasa Russia. Namun, sebagai catatan meskipun media cetak memberitakan penduduk Crimea secara aklamasi mendukung Russia, hal itu tidak sepenuhnya benar. Di wilayah Crimea yang lain ada penduduk keturunan Crimean Tartars yang tidak menyukai kehadiran Russia di Crimea ("Crimean Tatars deported by stalin rally against putin in crimea," 2014).

Uni Soviet dan Russia memiliki sejarah konflik antaretnis yang panjang. Russia dan negara-negara federasi Russia yang tergabung dalam *Commonwealth of Independent States* (CIS) terdiri dari banyak

etnis. Perbedaan etnis ini memicu ketidakstabilan geopolitik tidak hanya dalam negara-negara CIS tetapi juga di perbatasan antara negara-negara CIS.

Konflik antaretnis ini rentan sekali menyebar di berbagai kawasan di CIS. Misalnya konflik yang terjadi di Ossetia Selatan memiliki reaksi dramatis di Republik Ossetia Utara, di dalam lingkup Federasi Russia. Sebagaimana konflik di Abkhazia mengirim ketegangan etnis terkait dengan Republik Adyge (Trenin, 1996). Hal ini lah yang memicu Russia untuk melakukan tindakan intervensi dengan tujuan mencegah konflik menyebar ke negara-negara Federasi Russia lainnya.

Dalam dimensi keamanan perbatasan, banyak analisis dan pejabat Russia meyakini konflik yang berlatar belakang etnis dapat memicu migrasi ke Russia dari negara-negara Kaukasus Selatan dan mengancam hubungan etnis dengan wilayah lain dalam federasinya. Karena konflik tersebut dapat memicu perdagangan senjata ilegal dan terbentuknya pasukan sipil bersenjata di wilayah Federasi Russia lainnya (Allison, 1999).

Dari penjelasan di atas, tampak bahwa intervensi militer Russia menjadi modal utama guna menjaga perdamaian di perbatasannya. Russia sebagai pemain global di wilayah Kaukasus pada khususnya dan Eropa Timur pada umumnya, melihat konflik etnis sebagai suatu ancaman bagi seluruh kesatuan federasi, maka Russia memiliki tanggung jawab untuk mencegah penyebaran konflik etnis ke wilayah lain di dalam federasinya.

Perspektif ini membuat kita memahami intervensi militer Russia ke Crimea dalam satu kaca mata global. Ditambah dengan pengalaman intervensi serupa di Georgia, maka ke depannya Russia cenderung akan menerapkan strategi dengan mendukung gerakan separatis pro-Russia. Jika Russia melakukan hal tersebut, maka besar kemungkinan Ukraina akan kehilangan satu wilayah krusialnya yakni Crimea. Hal ini dibuktikan dengan pembentukan pemerintah regional sementara—yang diyakini sebagai pemerintah boneka Russia dibawah Sergei Aksyonov. Perkembangan selanjut-nya, Sergei

Aksyonov meminta perlindungan Russia untuk mempersenjatai penduduk pro-Russia dari tentara Ukraina.

Kesimpulan

Perseturan pengaruh antara UE-US dan Russia telah merusak orientasi politik luar negeri dan dalam negeri Ukraina. Tak hanya itu, persetujuan itu kini berujung pada ancaman perang dari pihak Russia yang mengirim sejumlah pasukannya bersiaga di wilayah Ukraina, yakni di semenanjung Crimea. Namun, motivasi Russia untuk mengulang perang yang sama sebagaimana perang singkat antara Georgia dan Russia pada 2008 lalu belum cukup transparan. Repon internasional pun semakin beragam mulai dari himbauan agar tidak berperang, diplomasi, hingga sanksi di dunia internasional. Crimea hanya sebagian kecil dari wilayah Ukraina yang diklaim memiliki arti historis dan strategis bagi geopolitik Russia di kawasan Laut Hitam. Namun berdasarkan analisis politik Russia, intervensi militer Russia ke Crimea memiliki tujuan untuk mencegah agar pemerintah interim Ukraina tidak memaksakan orientasi politiknya ke Crimea mengingat sebagian besar penduduk Crimea lebih pro-Russia. Tidak hanya untuk mencegah melemahnya pengaruh Russia ke dalam wilayah Ukraina, Russia juga memiliki kepentingan untuk mencegah pecahnya perang antaretnis misalnya Ukraina, Crimea Tartar, dan *Russia-speaking-people*, ke perbatasan dengan segala konsekuensinya. Dominasi berita internasional sangat kuat menyikapi potensi pecah perang Ukraina dan Russia tanpa kita memahami apa yang melatarbelakangi, dalam hal ini Russia untuk secara periodik menduduki Crimea.

B. Nilai Kepemimpinan Konsiliatif dalam Kepribadian Presiden Vladimir Putin

Tentang Vladimir Putin

Vladimir Vladimirovich Putin atau yang lebih dikenal dengan Vladimir Putin yaitu politikus Rusia dan menjabat sebagai Presiden Rusia saat ini. Vladimir Putin (Rusia : Влади́мир Влади́мирович

Путин) lahir pada tanggal 07 Oktober 1952 di Leningrad (Republik Sosialis Federatif Soviet Rusia, Uni Soviet) yang sekarang menjadi Saint Petersburg, Federasi Rusia. Vladimir Putin lahir dari lahir dari ibu, seorang buruh pabrik, dan ayahnya, seorang konskrip angkatan laut Soviet, yang bertugas dalam armada submarinir pada tahun 1930an.

Vladimir Putin mempunyai dua (2) saudara kandung yang lebih tua yaitu Viktor dan Albert yang lahir pada pertengahan 1930an, akan tetapi Albert meninggal saat masih bayi, dan Viktor juga meninggal karena *Difteria*² saat pengepungan Leningrad pada perang dunia II. Sehingga praktik Putin menjadi dewasa tanpa saudara kandung.

Dalam sisi keluarga, Putin pernah menikah sekali yaitu dengan Lyudmila Shkrebnova pada tanggal 28 Juli 1983, dan tinggal di Jerman dari 1985 hingga 1990. Dari pernikahan tersebut Putin memiliki dua putri yakni Mariya Putina lahir pada 28 April 1985 di Saint Petersburg, Rusia. Serta Yekaterina Putina lahir pada 31 Agustus 1986 di Dresden, Jerman Timur. Tetapi pada 6 Juni 2013 lalu Putin mengumumkan perceraianya dengan sang mantan istri Lyudmila Shkrebnova dan Kremlin telah mengonfirmasi pada 1 April 2014 jika perceraian tersebut telah berakhir.

Menjadi dewasa, Putin pernah mengenyam pendidikan sekolah. Pada usia 12 tahun, ia memelajari judo agar menjadi seperti karakter perwira inteligen seperti yang dicita-citakannya. Putin belajar bahasa Jerman di Saint Petersburg lalu melanjutkan sekolah dengan mempelajari Hukum di Universitas Negeri Saint Petersburg pada tahun 1970 dan lulus tahun 1975. Lalu melanjutkan pendidikan tesisnya dengan judul "Prinsip Dagang Negara yang Paling Disukai dalam Hukum Internasional". Putin direkrut untuk bergabung dengan Partai Komunis Uni Soviet pada masa itu, dan menjadi anggota sampai Desember 1991. Bertemu dengan Anatoly Sobchak, seorang asisten profesor yang mengajar hukum bisnis dan dugaannya turut mempengaruhi karier Putin.

²Infeksi bakteri yang umumnya menyerang selaput lendir pada hidung dan tenggorokan, serta terkadang dapat memengaruhi kulit.

Karier Vladimir Putin berawal setelah bergabung dengan KGB (Komitet *Gosudarstvennoy Bezopasnosti*) nama badan intelijen Uni Soviet (1954-1991). Dilatih di sekolah KGB ke-401, Okhta, Leningrad. Setelah lulus sekolah tersebut, Putin bekerja di Kepala Direktorat Kedua (Kontra Intelejensi) sebelum dipindahkan ke Kepala Direktorat Pertama, di mana ia bertugas memantau orang-orang asing dan pejabat konsuler di Leningrad. Pada tahun 1985-1990, Putin bertugas di Dresden, Jerman Timur dengan menggunakan identitas samaran sebagai penerjemah. Putin kembali ke Leningrad pada Juni 1991 setelah keruntuhan pemerintah komunis Jerman Timur, lalu Putin bekerja pada bagian urusan Internasional Universitas Negeri Leningrad. Di sana Putin bertugas merekrut anggota-anggota KGB baru dan memantau badan belajar. Putin mengundurkan diri dari dengan pangkat Letnan Kolonel pada 20 Agustus 1991 tepat pada saat hari kedua serangan yang didukung KGB melawan presiden Uni Soviet, Mikhael Gorbachev.

Karier

Pemerintahan Saint Petersburg (1990–1996)

Sejak lulus sekolah, Putin mulai dekat dengan profesi negarawan (*stateman*). Karier politik Vladimir Putin bermula dari diangkatnya Putin menjadi penasihat internasional untuk Walikota Sobchak, yakni mantan profesornya pada Mei 1990. Putin menjadi Komite Urusan Luar Negeri balai kota Saint Petersburg, pada 28 Juni 1991 dan bertugas mempromosikan hubungan internasional dan investasi asing serta mendaftarkan usaha-usaha bisnis. Selama setahun Putin diselidiki dewan legislatif karena diduga mengatur harga dan mengizinkan ekspor metal senilai \$93 juta untuk ditukar dengan bantuan pangan luar negeri yang tidak pernah datang. Penyelidik menginginkan Putin dipecat, tetapi Putin tetap menjabat sebagai kepala komite urusan luar negeri sampai tahun 1996. Dari 1994 sampai 1996, ia memegang beberapa jabatan politik dan pemerintahan lainnya di Saint Petersburg. Putin dilantik menjadi Ketua Deputy Pertama Pemerintah Saint Petersburg pada Mei 1994. Putin membentuk cabang Saint Petersburg dari partai

politik Tanah Air Kami Adalah Rusia yang pro-pemerintah, sebuah partai kekuatanliberal yang didirikan oleh Perdana Menteri Viktor Chernomyrdin, pada Mei 1995. Putin juga mengurus kampanye pemilihan legislatif untuk partai tersebut dan dari 1995 sampai Juni 1997, ia menjadi pemimpin cabang Saint Petersburg-nya.

Karier Moskwa Awal (1996–1999)

Walikota Sobchak gagal terpilih kembali di Saint Petersburg, lalu memanggil Putin kembali ke Moskwa pada Juni 1996 menjadi ketua Deputy Manajemen Properti Presidensial yang dikepalai oleh Pavel Borodin. Putin bertugas untuk mengurus properti luar negeri dari negara dan mengadakan pemindahan aset-aset lama Uni Soviet dan Partai Komunis ke Federasi Rusia. Putin menjabat sebagai Ketua deputy tersebut hingga maret 1997. Presiden Boris Yeltsin lalu melantik Vladimir Putin untuk menjadi ketua deputy staf presidensial pada Maret 1997, Putin memegang jabatan tersebut hingga Mei 1998. Dan menjadi kepala Direktorat Kendali Utama Departemen Manajemen Properti Presidensial hingga Juni 1998.

Pada 27 Juni 1997 Vladimir Putin melanjutkan pendidikan S3nya di Lembaga Pertambangan Saint Petersburg. Dengan dipandu oleh rektornya yakni Vladimir Litvinenko, Putin mengajukan disertasi kandidat sainsnya dalam bidang ekonomi, dengan judul “Perencanaan Strategis Sumber Daya Regional di Bawah Pembentukan Hubungan Pasar” Disertasi tersebut menjelaskan tentang kebiasaan kaum muda di Rusia untuk menulis sebuah karya sarjana pada pertengahan karier di Rusia. Kemudian Putin dilantik menjadi Kepala Deputy pertama staf presidensial untuk kewilayahan menggantikan Viktoriya Mitina pada 25 Mei 1998. Lalu dilantik menjadi Kepala Komisi untuk persiapan persetujuan terhadap delimitasi³ kekuasaan kewilayahan dan pusat federal yang diserahkan kepada Presiden, menggantikan Sergey Shakhray pada 15 Juli.

³Penetapan garis batas antara dua negara yang sebagian wilayahnya overlapping di laut.

Masa Jabatan Perdana Menteri Pertama (1999)

Pada tanggal 16 Agustus 1999 Vladimir Putin dilantik menjadi perdana menteri ke lima oleh Duma Negara dengan memperoleh 233 suara yang setuju. Menjadikan Putin sebagai perdana menteri selama dalam waktu kurang dari delapan belas bulan, beberapa orang menganggap Putin sebagai loyalis Yeltsin seperti perdana menteri lainnya. Putin tidak memilih sendiri jajaran menterinya, tetapi ditentukan oleh sistem presidensial Rusia.

Pelaksana Jabatan Presiden (1999–2000)

Boris Yeltsin tiba-tiba mengundurkan diri dari kursi kepresidenan pada tanggal 31 Desember 1999. Selanjutnya menurut konstitusi Rusia, Putin menjadi pelaksana jabatan presiden federasi Rusia. Putin melakukan kunjungan terjadwal kepada pasukan Rusia di Chechnya pada akhir masa jabatannya. Selama akan masa pemilihan presiden di tahun 2000 banyak kasus yang mencuat agar Putin mundur, bahkan Putin pernah menjadi terdakwa dalam kasus terduga ekspor metal pada tahun 1992 yang dibuka kembali oleh Marina Salye, tetapi ia dibungkam dan dipaksa meninggalkan Saint Petersburg. Meskipun para pesaingnya bersiap untuk pemilihan presiden di bulan Juni 2000 tetapi pengunduran diri presiden Boris Yeltsin membuat Pemilihan Presiden diadakan dalam sebulan dan pada tanggal 26 Maret 2000 Vladimir Putin memenangkan pemilihan Presiden dengan memperoleh suara sebanyak 53%.

Masa Jabatan Presiden Pertama (2000–2004)

Setelah Putin terpilih menjadi presiden kemudian ia dilantik oleh menteri keuangan Mikhail Kasyanov sebagai perdana menteri pada tanggal 7 Mei 2000. Selama masa menjabat yakni tahun 2000 hingga 2004, Putin akan melakukan rekonstruksi terhadap turunnya kondisi negara Kursk. Putin memberikan suatu tawaran dengan memenangkan perjuangan dengan kekuatan oligarki⁴

⁴Bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya secara efektif dipegang oleh kelompok elit kecil dari masyarakat baik dari dibedakan menurut kekayaan, keluarga, atau militer.

Rusia, tawaran itu memberikan oligarki untuk mengutamakan kekuasaan negara mereka, lalu bertukar dukungan khusus atau bersekutu dengan pemerintahan Putin. Pada masa jabatannya ini juga dilakukan referendum di Chechnya, mengaplikasikan sebuah konstitusi baru yang menyatakan bahwa Republik Chechnya adalah bagian dari Rusia dan menjadi wilayah otonomi. Chechnya secara bertahap destablisasi dengan penyelenggaraan pemilihan parlemen dan pembentukan pemerintahan regional pada tahun 2003.

Masa Jabatan Presiden Kedua (2004–2008)

Masa jabatan presiden kedua ini, Vladimir Putin kembali terpilih dengan memperoleh sebanyak 73% suara pada 14 Maret 2004. Pada masa itu terjadi tragedi krisis sandera sekolah Beslan, di mana ratusan orang tewas pada September 2004. Namun, tidak lama setelah pengepungan tersebut berakhir Presiden Putin mendapat kekaguman masyarakat Rusia karena penanganannya dalam tragedi tersebut. Selama Putin menjabat, proyek prioritas nasional diluncurkan untuk mempengaruhi perawatan pendidikan, perumahan, pertanian dan kesehatan di Rusia.

Masa Jabatan Perdana Menteri Kedua (2008–2012)

Setelah masa jabatan presiden kedua habis, yang digantikan oleh Deputy perdana menteri yaitu Dmitry Medvedev sebagai pengganti presiden. Sehari setelah penyerahan jabatan presiden, Vladimir Putin dilantik menjadi perdana menteri yang mengutamakan dominasi politiknya. Prestasi Putin dalam masa jabatan ini yakni mengatasi krisis ekonomi dunia dan menstabilkan populasi Rusia yang turun drastis selama tahun 2008 hingga 2011.

Masa Jabatan Presiden Ketiga (2012–2018)

Kembali Putin memenangkan pemilihan kursi presiden Rusia di putaran pertama dengan memperoleh suara sebanyak 63,6 %. Pada masa ini oposisi pemerintahan Putin menduga adanya kecurangan suara dan terjadi demonstrasi yang mengakibatkan sebagian orang luka-luka. Meskipun transparansi pemilihan dilakukan dengan

menempatkan webcam di tempat-tempat pemilihan, namun tetap saja perolehan suara Putin mendapatkan kritikan oleh oposisi dan para pengamat internasional dari organisasi keamanan dan kerja sama Eropa.

Masa Jabatan Presiden Keempat (Maret 2018-Sekarang)

Putin kembali terpilih menjadi presiden pada tanggal 18 Maret 2018, masa jabatan presiden keempat ini hingga enam tahun kedepan. Putin terpilih dengan perolehan suara sebanyak 75%, melebihi ekspektasi atau perkiraan awal partisipasi pemilih yang hanya mencapai 63% saja. Pada pemilihan Maret lalu Putin bersaing dengan tujuh calon, namun sudah diprediksi tidak akan mendapat perlawanan yang begitu sengit dalam pemilihan. Presiden yang berumur 66 tahun ini telah membuktikan akan dominasi dirinya di dunia politik.

Kepribadian

Vladimir Putin adalah sosok tegas, sangat berambisi akan kekuasaan, hedonis, dan kontroversial dalam arti tidak takut terhadap ancaman maupun sanksi yang diberikan. Ketika menjabat sebagai presiden di tahun 2012, Putin memutuskan menganeksasi semenanjung Crimea, langkah ini kemudian menjadi sebuah geopolitik⁵ yang rumit sekaligus kontroversial. Meskipun pemerintah Ukraina mengancam akan memerangi Rusia jika mengirimkan tentaranya, namun Putin tetap bersikukuh dan Rusia sudah menduduki Crimea pada 2 Maret 2012. Langkah tersebut menyebabkan Rusia diberi sanksi ekonomi oleh Barat, yang dibalas oleh Putin dengan mempererat hubungan dengan China. Juga ketika terjadi suatu permasalahan yang melibatkan pemerintahan Rusia, Putin tidak ragu-ragu untuk membalas apa yang telah negara lain lakukan kepada negaranya. Sebagai contoh ketika terjadi pembunuhan terhadap mantan mata-mata Rusia yakni Sergei Skripal (66) dan puterinya Yulia (33) di Salisbury pada 4 Maret 2018. Rusia membantah terlibat dalam upaya pembunuhan

⁵Metode analisis kebijakan luar negeri yang berupaya memahami, menjelaskan dan memperkirakan perilaku politik internasional dalam variabel geografi.

mantan mata-mata tersebut, dan Perdana Menteri Inggris Theresa May mengumumkan pengusiran 23 diplomat Rusia pada tanggal 14 Maret 2018. Ke-23 diplomat tersebut harus meninggalkan Inggris dalam waktu satu minggu. Tidak lama kemudian, hal tersebut dibalas oleh Rusia yang juga melakukan pengusiran kepada 23 diplomat Inggris, dalam pernyataan Kementerian Luar negeri Rusia diplomat-diplomat tersebut akan diberi status “persona non grata⁶” dan harus meninggalkan Rusia seminggu kemudian. Ketegasan Putin bisa dilihat dari caranya memimpin Rusia tanpa ragu- ragu, pada tahun 2002, sebuah teater di Moskow di duduki oleh 40 militan Chechnya yang dipimpin oleh Movsar Barayev. Putin langsung memerintahkan pasukan khusus untuk menyerang. Dalam krisis selama tiga hari tersebut menewaskan 129 orang dari 912 sandera dan mampu melumpuhkan Barayev. Karena kejadian tersebut banyak yang menduga bahwa popularitas Putin akan menurun, namun ternyata ketegasannya dalam menghadapi penyandera meskipun memakan banyak korban justru melambungkan popularitasnya pada saat itu.

Ambisi Putin dalam kekuasaan tidaklah main-main, dilihat dari karier politiknya yang dimulai tahun 1990 sampai sekarang dapat menjadi bukti Putin sangat berambisi akan kekuasaan. Dimulai dari menjadi walikota, perdana menteri dua kali masa jabatan hingga menjabat empat kali jabatan presiden. Pada 18 Maret 2018 yang lalu Putin terpilih kembali dengan perolehan suara sebanyak 75%. Walau ada gerakan oposisi yang ingin menghambat terpilihnya Putin namun tampaknya hanya bisa dikatakan bukan suatu hambatan yang berarti. Putin tidak hanya sekedar mengandalkan popularitasnya namun juga sederetan prestasi dalam berbagai bidang memang mewarnai kepemimpinannya. Peran Putin dalam mengembalikan peta geopolitik dunia sangat besar dan mengakibatkan rusia kembali berperan mengendalikan peta geopolitik dunia setelah sebelumnya sangat terpuruk akibat porak porandanya Uni Soviet yang sangat disegani di era perang dingin.

⁶Makna harfiahnya adalah orang yang tidak diinginkan.

Sebagai presiden kehidupan Putin bisa dikatakan hedonis, dikutip dari *The Richest* (6/2/2018) Putin mempunyai toilet emas senilai US\$ 75.000 atau sekitar Rp. 1 miliar, mengoleksi mobil-mobil mewah seperti Lamborgini, Ferrari, dan juga Limousine lapis baja Mercedes-Benz S600 Guard Pullman. Akan tetapi meskipun mempunyai banyak mobil mewah Putin lebih menyukai helikopter sebagai moda transportasi pilihannya, tinggal di mansion pribadi yang besar. Kekayaan tersebut memang tidak hanya dari penghasilan menjadi presiden tetapi Putin juga seorang investor yang handal. Putin memiliki saham di sejumlah perusahaan besar seperti Gazprom dan Surgutnefgaz yang masing-masing kapitalisasi pasar perusahaannya di 2018 ini mencapai US\$ 58 miliar dan US\$ 20 miliar.

Namun, kepribadian Putin tidak hanya itu saja. Putin kerap kali terlambat dalam suatu pertemuan, keterlambatan Putin ini sudah melegenda. Dalam pertemuan dengan Paus Fransiskus di Vatikan pada tahun 2013, Putin membuat para Staf Istana kepausan kedinginan setelah menunggu Putin selama 50 menit. Berikut adalah beberapa daftar keterlambatan Putin, ia terlambat 14 menit untuk bertemu Ratu Elizabeth II, terlambat 40 menit untuk kanselir Jerman Angela Merkel. Putin bahkan terlambat 3 jam saat akan membicarakan masalah Suriah dengan Menlu AS John Kerry, bahkan ia juga pernah membuat sejumlah orang tua anak-anak yang tewas dalam kecelakaan udara menunggu selama 2 jam di suatu pemakaman di Bashkortostan, Rusia pada 2002.

Presiden Putin juga dikenal sebagai seorang pemimpin yang otoriter, orang-orang yang berani menentang kekuasaannya ia singkirkan dengan berbagai cara, mulai dari dikucilkan, melarang ikut pemilu, bahkan memasukkan dalam penjara. Putin tak akan segan-segan kepada para lawannya.

Keyakinan

Setelah Uni Soviet runtuh, Rusia mewarisi wilayah terbesar imperium⁷ tersebut. Kebijakan domestik dan luar negeri, identitas

⁷Mengacu pada sekelompok negara dan kelompok etnik yang menempati

nasional serta orientasi strategis Rusia sangat mempengaruhi negara-negara pecahan Uni Soviet yang lainnya. Sehingga Rusia mendefinisikan pendekatan '*near abroad*'⁸ kemudian dimasukkan dalam kepentingan nasional, bahkan tujuan keamanan negara sejak 1991. Alasan terbesar Rusia menjalin hubungan baik dengan negara tetangganya adalah kepentingan ekonomi dan geopolitik. Pasca Uni Soviet runtuh, dikhawatirkan sistem perekonomian akan dikuasai oleh Barat sehingga perlu adanya ruang ekonomi bersama untuk mencapai kemajuan ekonomi bersama. Serta pada 1993, Rusia mendeklarasikan pembuatan aliansi militer bernama Organisasi Perjanjian Keamanan Bersama atau *Collective Security Treaty Organization* (CSTO)⁹, sebagai alternatif dari *North Atlantic Treaty Organization* (NATO)¹⁰.

Pada tahun 2000, Konsep Kebijakan Luar Negeri Rusia yang dikeluarkan oleh presiden Vladimir Putin menempatkan prioritas pada proyeksi internasional Federasi Rusia dengan mempertimbangkan hubungan dengan negara-negara *Commonwealth of Independent States* (CIS)¹¹ serta melihat politik ekspansionaris NATO. Konsep politik luar negeri yang pertama yaitu mengenai 'kedaulatan demokrasi' yang menguatkan otonomi Rusia dengan menerapkan model demokrasinya sendiri, sangat berbeda dengan model demokrasi Barat, di sisi lain, kebijakan luar negeri yang berorientasi pada menjaga kedaulatan Rusia dari ancaman globalisasi. Konsep politik luar negeri yang kedua adalah mengelaborasi teori politik kompleks yaitu *Neo-Eurasianisme*, yang bertujuan memperluas jangkauan Eurasia dengan Barat. Pada saat ini, Rusia melancarkan peran hegemoni melalui mengembalikan hegemoni 'Dunia Rusia'

wilayah geografis sangat luas, yang dipimpin atau dikuasai oleh satu kekuatan politik.

⁸Istilah *near abroad* merupakan negara-negara yang berdekatan dengan Rusia yang merupakan negara baru yang pernah tergabung dalam Uni Soviet.

⁹Adalah sebuah organisasi kerjasama militer yang mencakup beberapa negara dikawasan Eropa Timur yang terbentuk sejak tahun 1992.

¹⁰Yaitu Pakta Pertahanan Atlantik Utara adalah sebuah organisasi internasional untuk keamanan bersama yang didirikan pada tahun 1949.

¹¹adalah negara-negara yang merdeka dan memperoleh kemerdekaannya setelah Uni Soviet runtuh pada 1991.

(*russkiy mir*) melalui pendekatan kultural dan identitas yang sama, bukan melalui kekerasan dan militerisme seperti masa Uni Soviet.

Motivasi

Kepemimpinan Vladimir Putin, Rusia menjadi salah satu negara yang disegani dalam kancah dunia internasional. Perkembangan Rusia ini sesuai dengan ambisi Vladimir Putin untuk mengembalikan kejayaan Uni Soviet di Eropa Timur, khususnya terhadap negara pecahan Soviet, salah satunya melalui peningkatan senjata dan teknologi.

Jika Amerika punya Donald Trump dengan *Make America Great Again*, maka Rusia punya Vladimir Putin yang menginginkan Rusia sebagai *Great Power* pasca runtuhnya Uni Soviet dengan menempatkan militer dan pengembangan teknologi sebagai garda terdepan dalam mengawalinya. Untuk menjelaskan mengenai visi ini, Putin mengungkapkan bahwa dalam pidato kenegaraan dalam perayaan 72 tahun perang kemenangan Rusia pada tahun perang dunia ke II, "Rusia selalu di sisi yang sama dengan perdamaian, dan membuka lebar kesepakatan untuk saling bekerjasama dengan negara yang menolak perang serta menghargai esensi dari kehidupan dan sifat alami manusia." Serta adanya keinginan untuk memperkuat identitas nasional Rusia di tengah dinamika global. Setelah bertahun-tahun terpuruk dalam kehinaan sebagai negara gagal, Rusia kini mulai berdiri tegak menjadi salah satu kekuatan utama baru di dunia.

Nilai-nilai

Nilai-nilai atau norma yang dianut oleh Vladimir Putin adalah Kristen Ortodoks¹², ibunya adalah seorang Ortodoks yang taat. Sehingga tidaklah heran apabila ideologi personal yang berlandaskan keyakinan kristen ortodoks mampu mengibaratkan dirinya menjadi sosok Vladimir Svyatoslavich, sang Pangeran Kiev, penguasa Rusia pada abad ke-10 yang mampu mengubah

¹²Keyakinan yang berlandaskan pada Ortodoks Rusia yang berakar pada liturgi kuno dan berkorelasi dengan Santo (orang suci) pada abad pertengahan. Dan dalam sejarahnya Tsar Rusia menempatkan dirinya sebagai pelindung kaum Ortodoks.

bangsa Slavia yang awalnya menyembah berhala menjadi Kristen, “semangat spiritualnya menjadi basis kebudayaan, peradaban, dan nilai-nilai kemanusiaan yang mempersatukan rakyat Rusia, Ukraina dan Belarus”.

Putin pernah melontarkan pernyataan yang kontroversial bahwa ajaran komunis diambil dari Alkitab. Dalam sebuah wawancara untuk film dokumenter *Valaam*, yang cuplikannya disiarkan di Rusia 1, yang dikutip Senin (15/1/2018), “ Ada tahun-tahun ateisme jadi militan saat para imam dibasmi, gereja-gereja hancur, namun pada saat bersamaan sebuah agama baru diciptakan. Ideologis komunis sangat mirip dengan agama Kristen, dalam faktanya : kebebasan, kesetaraan, persaudaraan, keadilan, semuanya diletakkan di dalam kitab suci, semuanya ada di sana. Dan apa kode pembangunan komunisme? Ini adalah sublimasi, ini pada dasarnya hanya kutipan dari Alkitab, tidak ada yang baru yang ditemukan.” Putin bahkan membandingkan Vladimir Lenin yakni salah satu tokoh besar Komunis Uni Soviet dengan seorang santo atau orang suci dalam agama Kristen. Dalam ritual juga, Putin berpendapat, Lenin dan kelompoknya meminjam dari praktik gereja. Meski tidak jelas apakah ini menurutnya adalah upaya sadar atau intuitif.

Persepsi

Kebijakan luar negeri Rusia pada 2014 ditandai dengan eksperimen geopolitik besar yang dilakukan oleh Putin sebagai tanggapan atas kekacauan di Maidan Ukraina. Eksperimen tersebut memberi kesempatan Putin untuk menguji pandangannya mengenai menegnai hubungan antar bangsa dan posisi Rusia di dunia. Pandanga Putin terhadap dunia meiliki beberapa poin penting, yaitu:

1. Barat tidak mengakui Rusia sebagai mitra yang sederajat.
2. Peradaban Barat dalam kondisi yang pelik.
3. Rusia telah berhasil membangun kemitraan dengan mayoritas negara non-Barat.

4. Rusia akan didukung oleh dunia apabila secara terang terangan menentang Barat.
5. Dalam konfrontasi terbuka Rusia-AS, Eropa mungkin akan beralih ke pihak Rusia karena perpecahan lama AS-Eropa semakin lebar.
6. Rusia akan menjadi satu-satunya kekuatan yang mampu dan berani menentang AS apabila krisis di Rusia berakhir.

Dalam sesi tanya-jawab tahunan dengan Rusia yang disiarkan langsung secara nasional pada tanggal 14 April 2016, mengungkapkan persepsinya tentang kemajuan Rusia saat itu bahwa Rusia berada dalam wilayah abu-abu mengenai ekonomi. Meskipun terjadi penurunan PDB sebesar 0,3%, namun pada Putin optimis pada tahun 2017 perekonomian akan meningkat sebesar 1,4%. 7) Pengaruh politik Rusia akan menutupi kelemahan ekonomi Rusia.

Vladimir Putin sebagai sosok yang dominan dalam pengambilan kebijakan intervensi politik atas nama Rusia ini memiliki nilai-nilai pemikirannya yang terbentuk sejak adanya *Ide Russia* bahkan sampai mengibaratkan Vladimir Putin sebagai Vladimir Svyatoslavich yang berkuasa pada abad ke X di Rusia. Kemudian dilihat dari biografi serta sejarah karir politiknya Vladimir Putin sehingga membuat sebuah doktrin atau prinsip sebagai nakhoda Federasi Rusia sampai sekarang. Sosok Putin sangat berpengaruh di Internasional, bahkan Putin dinobatkan sebagai orang paling berkuasa di dunia di tahun 2016 oleh majalah Forbes. Penobatan tersebut sudah menjadi ke-4 kali secara berturut-turut Putin menyandang gelar tersebut. Mengalahkan presiden Amerika yakni Donald Trump yang ada di urutan ke-2, kanselir Angela Merkel di urutan ke-3, serta presiden China Xi Jinping di urutan ke-4. Menurut Forbes, Putin selalu mendapat apa yang diinginkannya karena ia tidak dibatasi oleh norma-norma global konvensional, dan jangkauannya telah meluas di beberapa tahun terakhir.

Simpulan

Presiden Rusia Vladimir Putin memiliki karakter yang tidak meragukan keputusan yang ia buat. Tidak memerlukan waktu lama maupun pertimbangan berlarut-larut baginya untuk segera mengambil putusan. Ia berpikir cermat. Hal ini meletakkan Presiden Putin, tanpa mengabaikan pengalamannya yang dekat dengan profesi negarawan, maka Putin merupakan contoh yang baik akan kepribadian kepresidenan ekspansionisme. Hal ini kental terlihat dari cara ia bersikap menanggapi aksi pemimpin global yang lain. Contoh yang paling kentara adalah respon balik atas pemulangan duta besar Rusia oleh Theresa May dan respon akan sejumlah aksi verbal yang dilontarkan oleh Presiden Trump. Berdasarkan paparan perjalanan kariernya, maka dapat dipahami Putin memperoleh kepercayaan diri sebagai negarawan bahkan sebagai seorang presiden. Ia dapat memainkan peran presiden Rusia dengan baik sehingga Rusia pada saat ini nampak sebagai negara penantang Amerika Serikat yang gagah dan secara politik sama kuatnya dengan Trump. Ini mengakibatkan intimidasi yang sering dilontarkan Trump memiliki efek kecil pada tipe kepemimpinan dan proyeksi pengaruh Rusia di dunia.

Kesimpulan







BAB XIII

KESIMPULAN

Kajian kebijakan politik internasional terus berkembang mengikuti perubahan tatanan dunia internasional. Tatanan dunia internasional, sebagian kecil dari yang telah berkembang saat ini, sangat ditentukan oleh putusan yang diambil oleh pemimpin besar sejumlah negara saja dibandingkan dengan seluruh pemimpin negara di dunia. Hal ini meletakkan persepsi kajian kebijakan politik internasional hanya berpusat pada pemimpin global yang berpengaruh. Kajian kebijakan politik internasional mendapatkan momentumnya dengan semakin besarnya sorotan para pemimpin global pada ranah isu tertentu yang menurut mereka bersinggungan dengan kepentingan nasional negaranya. Sampai sekarang salah satu metode untuk menganalisis kebijakan politik internasional ialah dengan menggunakan analisis kepribadian presiden maupun analisis karakter presiden. Keduanya bermanfaat untuk menghasilkan generalisasi menjadi suatu proposisi yang membuka ruang perdebatan guna memprediksi arah kebijakan yang diambil seorang presiden atau pemimpin global. Di saat yang sama juga bermanfaat memahami proses rasionalitas yang terjadi pada setiap pemimpin global berpengaruh tersebut. Kesimpulan dari analisis kebijakan politik internasional menggunakan metode karakter presidensial serta analisis kepemimpinan memberi wawasan lebih luas tentang arah kebijakan yang diambil suatu negara dalam kaitannya dengan interaksi dengan negara lain di luar batas negaranya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Qannuji, H. I. A. I. L. A. A.-H. (2013). *Yaqazat uli al-i'tibar mimma warad fi dhikr al-nar wa-ashab al-nar*. Place of publication not identified: Turath For Solutions.
- Barber, J. D. (1992). *The presidential character : predicting performance in the White House* (4th ed.). Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall.
- Bilton, T., Bonnett, K., Jones, P., Skinner, D., Stanworth, M., & Webster, A. (2017). *Introductory Sociology*: Macmillan Education, Limited.
- Blondel, J. (1987). Why is Political Leader? *Political Leadership Towards a general Analysis* (1 ed., pp. 225): SAGE Publications.
- Breuning, M. (2007). *Foreign Policy Analysis: A Comparative Introduction*: Springer.
- Caldwell, D. (2018). *Alexander L. George: A Pioneer in Political and Social Sciences: With a Foreword by Dan Caldwell*: Springer.
- Geertz, C. (2016). *The Interpretation of Cultures (Text Only)*: Harper-Collins Publishers.
- George, A. L. (1967). *The "operational Code": A Neglected Approach to the Study of Political Leaders and Decision-making*: Rand.
- Gordon, M. E., & Trump, D. (2007). *Trump University entrepreneurship 101 : how to turn your idea into a money machine* (Second edition [revised & expanded]. ed.).
- Griffiths, M. (2013). *Fifty Key Thinkers in International Relations*: Taylor & Francis.
- Guzzini, S., & Leander, A. (2005). *Constructivism and International Relations*: Taylor & Francis.
- Hudson, V. M. (2013a). *Foreign Policy Analysis Classic and Contemporary Approach* (2nd ed.): Rowman & Littlefield.

- IntroBooks. (2019). *Trade War*: Can Akdeniz.
- Jackson, R. H., & Rosberg, C. G. (1981). *Personal rule in Black Africa*. Berkeley: University of California Press.
- Kellner, D. (2018). *Donald Trump as Authoritarian Populist: A Frommian Analysis*: University of Westminster Press.
- Lau, L. J. (2018). *The China-U.S. Trade War and Future Economic Relations*: The Chinese University Press.
- Miller, J. (2018). *Duterte Harry: fire and Fury in Phillipines*. United Kingdom: Scribe Publication.
- Nye, J. S. (2009). *Soft Power: The Means To Success In World Politics*: Hachette UK.
- Nye, J. S. (2011). *The Future of Power*: PublicAffairs.
- Nye, J. S. (2015). *Is the American Century Over?*: John Wiley & Sons.
- Ortner, S. B. (1999). *The Fate of "Culture"*: University of California Press.
- Sabato, L., Kondik, K., & Skelley, G. (2017). *Trumped: The 2016 Election That Broke All the Rules*: Rowman & Littlefield.
- Sexton, D. E., & Trump, D. (2006). *Trump University marketing 101 : how to use the most powerful ideas in marketing to get more customers and keep them* Retrieved from http://NQ5HL7CP9D.search.serialssolutions.com/?sid=sersol&SS_jc=TC0000262622&title=Trump%20University%20marketing%20101%20%3A%20how%20to%20use%20the%20most%20powerful%20ideas%20in%20marketing%20to%20get%20more%20customers%20and%20keep%20them
- Tandon, Y. (2015). *Trade Is War: The West's War Against the World*: OR Books.
- Trump, D. (2007). *Trump : the best real estate advice I ever received : 100 top experts share their strategies*. Nashville, Tenn.: Thomas Nelson.
- Trump, D. (2016). *Crippled America : how to make America great again* (First Threshold Editions hardcover edition. ed.).

- Trump, D., & McIver, M. (2005). *Trump : think like a billionaire : everything you need to know about success, real estate, and life* (Ballantine Books Mass Market ed.).
- Trump, D., & McIver, M. (2006). *Trump : how to get rich* (First Ballantine Books Mass Market Edition. ed.).
- Trump, D., & McIver, M. (2007). *Trump 101 : the way to success* Retrieved from http://NQ5HL7CP9D.search.serialssolutions.com/?sid=sersol&SS_jc=TC0000262619&title=Trump%20101%20%3A%20the%20way%20to%20success
- Trump, D., & McIver, M. (2008). *Trump never give up : how I turned my biggest challenges into success* Retrieved from http://NQ5HL7CP9D.search.serialssolutions.com/?sid=sersol&SS_jc=TC0000262620&title=Trump%20never%20give%20up%20%3A%20how%20I%20turned%20my%20biggest%20challenges%20into%20success
- Trump, D., & McIver, M. (2009). *Think like a champion : an informal education in business and life* Retrieved from <http://libezproxy.syr.edu/sso/skillport?context=34703>
- Waltz, K. N. (2010). *Theory of International Politics*: Waveland Press.
- Wendt, A. (1999). *Social Theory of International Politics*: Cambridge University Press.
- Wildavsky, A. (2018). *Cultural Analysis*: Taylor & Francis.
- Zeng, K., & Ka, Z. (2010). *Trade Threats, Trade Wars: Bargaining, Retaliation, and American Coercive Diplomacy*: University of Michigan Press.

Jurnal

- Anindhita, W., Arisanty, M., & Rahmawati, D. (2016). Analisis Penerapan Teknologi Komunikasi Tepat Guna Pada Bisnis Transportasi Ojek Online (Studi pada Bisnis Gojek dan Grab Bike dalam Penggunaan Teknologi Komuniasi Tepat Guna untuk Mengembangkan Bisnis Transportasi). *Prosiding Seminar Nasional INDOCOMPAC, 0(0)*.

- Berehulak, D. (2016). 'They Are Slaughtering Us Like Animals'. *New York Times*.
- Bump, P. (2017). There's no evidence that Trump's inauguration was the most-watched in history. Period. - *The Washington Post*.
- Gregory, S. M. R., Sanchez; Barbara, Rosenberg. (2007). Brazil's Response to the Judicialized WTO Regime: Strengthening the State through Diffusing Expertise *ICTSD South America Dialogue on WTO Dispute Settlement and Sustainable Development*.
- Guardian, T. (2018). Trans-Pacific trade pact revived despite Trump withdrawal | World news | *The Guardian*.
- Jazeera, A. (2018). Profile: Recep Tayyip Erdogan. *Al Jazeera*.
- Keck, M. L. (2019). A new foreign policy: beyond American exceptionalism. *Choice: Current Reviews for Academic Libraries*, 56(7), 930-930.
- kompas, i. (2018a). Ancaman Perang Dagang – Kompas.Id. *Kompas.Id*.
- kompas, i. (2018b). Dunia Tak Seindah Instagram – Kompas.Id. *Kompas.Id*.
- Kuo, L. (2018). China files complaint to WTO over Trump's \$200bn tariff plan. *the Guardian*.
- Marcus, J. (2018). Duterte's brutal drug war finally gets the International Criminal Court's attention. *VICE News*.
- News, B. B. C. (2017). Why do Duterte's supporters love him? *BBC News*.
- Prasetyantoko, A. (2018). Mengantisipasi Perang Dagang – Kompas.Id. *Kompas.Id*.
- Smedley, T. (2013). Patent wars: has India taken on Big Pharma and won? *the Guardian*.
- Wang, C. (2018). Trump to impose 30 percent tariff on solar cell imports. *CNBC*.

Laman Web, Koran Cetak, Artikel Daring

'The Apprentice' star Donald Trump to NBC: You can't fire me, I quit - Reality TV World. (2007a, 2007). from <https://www.realitytvworld.com/news/the-apprentice-star-donald-Trump-nbc-you-cant-fire-me-i-quit-5200.php>

files/519/the-apprentice-star-donald-Trump-nbc-you-cant-fire-me-i-quit-5200.html

BBCNews. (2019). US proposes tariffs on EU cheese and wine.

Britannica.com. (2019). Turkey - Constitution.

Charting the US-China trade battle. (2019).

correspondent, H. E.-P. S.-e. A. (2018a, 2018/12/19/T10:50:53.000Z).

Duterte's Philippines drug war death toll rises above 5,000, *the Guardian*. Retrieved from <https://www.theguardian.com/world/2018/dec/19/dutertes-philippines-drug-war-death-toll-rises-above-5000>

files/634/dutertes-philippines-drug-war-death-toll-rises-above-5000.html

correspondent, H. E.-P. S.-e. A. (2018b, 2018/12/04/T04:39:16.000Z).

Philippines president Duterte, architect of 'war on drugs', jokes about smoking pot, *the Guardian*. Retrieved from <https://www.theguardian.com/world/2018/dec/04/philippines-president-duterte-architect-of-war-on-drugs-jokes-about-smoking-pot>

files/644/philippines-president-duterte-architect-of-war-on-drugs-jokes-about-smoking-pot.html

correspondent, H. E.-P. S.-e. A. (2018c, 2018/10/23/T14:17:36.000Z).

Philippines: Duterte faces first serious dip in popularity ratings, *the Guardian*. Retrieved from <https://www.theguardian.com/world/2018/oct/23/philippines-rodrigo-duterte-dip-popularity-ratings>

files/646/philippines-rodrigo-duterte-dip-popularity-ratings.html

- France-Presse, A. (2017). Trump warned on Duterte fist salute in Manila.
- Kami, I. M. (2018, 2019/09/05/04:13:09). Kronologi 4 Aksi Protes Rompi Kuning yang Bikin Prancis Bergejolak. *detiknews*. Retrieved 05/09, 2019, from <https://news.detik.com/internasional/d-4335354/kronologi-4-aksi-protes-rompi-kuning-yang-bikin-prancis-bergejolak>
- kompas, i. (2018c). Hikmah di Balik Perang Dagang AS-China – Kompas.Id. *Kompas.Id*.
- kompas, i. (2018d). Perang Dagang Belum Usai – Kompas.Id. *Kompas.Id*.
- kompas, i. (2018e). Perang Dagang, Perang Tarif – Kompas.Id. *Kompas.Id*.
- kompas, i. (2018f). Trump Peringatkan Harley-Davidson soal Pemindahan Pabrik – Kompas.Id. *Kompas.Id*.
- Kompas.id. (2018, 2018/11/22/). Magang Atasi Kesenjangan, *Kompas Gramedia*.
- Oegroseno, A. H. (2018, 2018/06/04/). Ideologi Antisawit Eropa, *Kompas Gramedia*.
- Presiden Filipina Rodrigo Duterte menyebut bahwa Tuhan itu ‘goblok’. (2019).
- ResetDoc. (2019). Duterte, the Most Loved by Filipinos.
- Reuters, E. (2019). Survey shows Filipinos more satisfied with Duterte government than.
- Silicon or Soy? Targets of the U.S.-China Trade War. (2019).
- Timberman, D. G. (2019). Philippine Politics Under Duterte: A Midterm Assessment: Carnegie Endowment for International Peace.
- Wetzler, M. (2017). Event Data: The Root of All Analytics | Transforming Data with Intelligence.

Lain-lain

Thesis

Winanti, P. S., & Puspitarini, R. C. (2016). *POLITIK INKONSISTENSI AS DALAM UPAYA MENGATASI PEMANASAN GLOBAL: HAMBATAN TARIF PRODUK PANEL SURYA*. Universitas Gadjah Mada.

Uncategorized References

'The Apprentice' star Donald Trump to NBC: You can't fire me, I quit - Reality TV World. (2007b).

Arab Saudi Melunak, Qatar Belum Yakin. (2019, 2019/12/11/02:26:25 2020/02/01/02:49:01). *Kompas.id*. from <https://kompas.id/baca/utama/2019/12/11/arab-saudi-melunak-qatar-belum-yakin/>

Erdoganism and Turkey's new prime minister. (2016, 2016/05/23/T15:44:00+00:00

2019/09/08/07:07:26). *Middle East Monitor*. from <https://www.middleeastmonitor.com/20160523-erdoganism-and-turkeys-new-prime-minister/>

Hermann, C. F., Studies, W. W. S. o. P., & International Affairs Center of, I. (1969). *Crises in foreign policy: a simulation analysis*: [Published for Center of International Studies, Princeton University by] Bobbs-Merrill.

Hermann, M. G. (1980). Explaining Foreign Policy Behavior Using the Personal Characteristics of Political Leaders. *International Studies Quarterly*, 24(1), 7-46. doi: 10.2307/2600126

Hermann, M. G., & Milburn, T. W. (1977). *A Psychological examination of political leaders*: Free Press.

Hudson, V. M. (2013b). *Foreign Policy Analysis: Classic and Contemporary Theory*: Rowman & Littlefield.

Ip, G. (2015, 2015/12/09/T17:49:00.000Z). As the Gig Economy Changes Work, So Should Rules, *Wall Street Journal*. Retrieved

from <https://www.wsj.com/articles/as-the-gig-economy-changes-work-so-should-rules-1449683384>

Koestanto, B. D. (2020). Qatar Miliki Perdana Menteri Baru, *Kompas*. Retrieved from <https://kompas.id/baca/internasional/2020/01/29/qatar-miliki-perdana-menteri-baru/>

kompas.id. (2017, 2017/05/03/03:00:00

2019/09/05/03:43:40). Pengangguran, Masalah Utama Perancis. *Kompas.id*. from <https://kompas.id/baca/internasional/2017/05/03/pengangguran-masalah-utama-perancis/>

Özkırıklı, U. (2019, 2019/07/24/T05:00:04.000Z). There's hope for democracy in Turkey – but it needs help | Umur Özkırıklı, *The Guardian*. Retrieved from <https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/jul/24/hope-democracy-turkey-istanbul-mayoral-election>

Post, J. M. (2010). *The Psychological Assessment of Political Leaders: With Profiles of Saddam Hussein and Bill Clinton*: University of Michigan Press.

Post, J. M. (2014). *Narcissism and Politics: Dreams of Glory*: Cambridge University Press.

Rahman, M. A. (2019, 20-12). Saudi-Qatar Sepakati Tiga Butir Tuntutan, *Kompas*. Retrieved from <https://kompas.id/baca/utama/2019/12/20/saudi-qatar-sepakati-tiga-butir-tuntutan/>

Winter, D. G. (1992). *The effects of the Hitler relationship on Mussolini's motive profile*. New York: John Wiley.

Winter, D. G. (1996). *Personality: analysis and interpretation of lives*: McGraw-Hill.

Buku

Al-Qannuji, H. I. A. I. L. A. A.-H. (2013). *Yaqazat uli al-i'tibar mimma warad fi dhikr al-nar wa-ashab al-nar*. Place of publication not identified: Turath For Solutions.

- Barber, J. D. (1992). *The presidential character : predicting performance in the White House* (4th ed.). Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall.
- Bilton, T., Bonnett, K., Jones, P., Skinner, D., Stanworth, M., & Webster, A. (2017). *Introductory Sociology*: Macmillan Education, Limited.
- Blondel, J. (1987). Why is Political Leader? *Political Leadership Towards a general Analysis* (1 ed., pp. 225): SAGE Publications.
- Breuning, M. (2007). *Foreign Policy Analysis: A Comparative Introduction*: Springer.
- Caldwell, D. (2018). *Alexander L. George: A Pioneer in Political and Social Sciences: With a Foreword by Dan Caldwell*: Springer.
- Geertz, C. (2016). *The Interpretation of Cultures (Text Only)*: HarperCollins Publishers.
- George, A. L. (1967). *The "operational Code": A Neglected Approach to the Study of Political Leaders and Decision-making*: Rand.
- Gordon, M. E., & Trump, D. (2007). *Trump University entrepreneurship 101 : how to turn your idea into a money machine* (Second edition [revised & expanded]. ed.).
- Griffiths, M. (2013). *Fifty Key Thinkers in International Relations*: Taylor & Francis.
- Guzzini, S., & Leander, A. (2005). *Constructivism and International Relations*: Taylor & Francis.
- Hermann, C. F., Studies, W. W. S. o. P., & International Affairs Center of, I. (1969). *Crises in foreign policy: a simulation analysis*: [Published for Center of International Studies, Princeton University by] Bobbs-Merrill.
- Hermann, M. G., & Milburn, T. W. (1977). *A Psychological examination of political leaders*: Free Press.
- Hudson, V. M. (2013a). *Foreign Policy Analysis Classic and Contemporary Approach* (2nd ed.): Rowman & Littlefield.

- Hudson, V. M. (2013b). *Foreign Policy Analysis: Classic and Contemporary Theory*: Rowman & Littlefield.
- IntroBooks. (2019). *Trade War*: Can Akdeniz.
- Jackson, R. H., & Rosberg, C. G. (1981). *Personal rule in Black Africa*. Berkeley: University of California Press.
- Kellner, D. (2018). *Donald Trump as Authoritarian Populist: A Frommian Analysis*: University of Westminster Press.
- Lau, L. J. (2018). *The China-U.S. Trade War and Future Economic Relations*: The Chinese University Press.
- Miller, J. (2018). *Duterte Harry: fire and Fury in Phillipines*. United Kingdom: Scribe Publication.
- Nye, J. S. (2009). *Soft Power: The Means To Success In World Politics*: Hachette UK.
- Nye, J. S. (2011). *The Future of Power*: PublicAffairs.
- Nye, J. S. (2015). *Is the American Century Over?*: John Wiley & Sons.
- Ortner, S. B. (1999). *The Fate of "Culture"*: University of California Press.
- Post, J. M. (2010). *The Psychological Assessment of Political Leaders: With Profiles of Saddam Hussein and Bill Clinton*: University of Michigan Press.
- Post, J. M. (2014). *Narcissism and Politics: Dreams of Glory*: Cambridge University Press.
- Sabato, L., Kondik, K., & Skelley, G. (2017). *Trumped: The 2016 Election That Broke All the Rules*: Rowman & Littlefield.
- Sexton, D. E., & Trump, D. (2006). *Trump University marketing 101 : how to use the most powerful ideas in marketing to get more customers and keep them* Retrieved from http://NQ5HL7CP9D.search.serialssolutions.com/?sid=sersol&SS_jc=TC0000262622&title=Trump%20University%20marketing%20101%20%3A%20how%20to%20use%20the%20most%20powerful%20ideas%20

[in%20marketing%20to%20get%20more%20customers%20and%20keep%20them](#)

Tandon, Y. (2015). *Trade Is War: The West's War Against the World*: OR Books.

Trump, D. (2007). *Trump : the best real estate advice I ever received : 100 top experts share their strategies*. Nashville, Tenn.: Thomas Nelson.

Trump, D. (2016). *Crippled America : how to make America great again* (First Threshold Editions hardcover edition. ed.).

Trump, D., & McIver, M. (2005). *Trump : think like a billionaire : everything you need to know about success, real estate, and life* (Ballantine Books Mass Market ed.).

Trump, D., & McIver, M. (2006). *Trump : how to get rich* (First Ballantine Books Mass Market Edition. ed.).

Trump, D., & McIver, M. (2007). *Trump 101 : the way to success* Retrieved from http://NQ5HL7CP9D.search.serialssolutions.com/?sid=sersol&SS_jc=TC0000262619&title=Trump%20101%20%3A%20the%20way%20to%20success

Trump, D., & McIver, M. (2008). *Trump never give up : how I turned my biggest challenges into success* Retrieved from http://NQ5HL7CP9D.search.serialssolutions.com/?sid=sersol&SS_jc=TC0000262620&title=Trump%20never%20give%20up%20%3A%20how%20I%20turned%20my%20biggest%20challenges%20into%20success

Trump, D., & McIver, M. (2009). *Think like a champion : an informal education in business and life* Retrieved from <http://libezproxy.syr.edu/sso/skillport?context=34703>

Waltz, K. N. (2010). *Theory of International Politics*: Waveland Press.

Wendt, A. (1999). *Social Theory of International Politics*: Cambridge University Press.

Wildavsky, A. (2018). *Cultural Analysis*: Taylor & Francis.

Winter, D. G. (1992). *The effects of the Hitler relationship on Mussolini's motive profile*. New York: John Wiley.

Winter, D. G. (1996). *Personality: analysis and interpretation of lives*: McGraw-Hill.

Zeng, K., & Ka, Z. (2010). *Trade Threats, Trade Wars: Bargaining, Retaliation, and American Coercive Diplomacy*: University of Michigan Press.

Jurnal

Anindhita, W., Arisanty, M., & Rahmawati, D. (2016). Analisis Penerapan Teknologi Komunikasi Tepat Guna Pada Bisnis Transportasi Ojek Online (Studi pada Bisnis Gojek dan Grab Bike dalam Penggunaan Teknologi Komuniiasi Tepat Guna untuk Mengembangkan Bisnis Transportasi). *Prosiding Seminar Nasional INDOCOMPAC, 0(0)*.

Berehulak, D. (2016). 'They Are Slaughtering Us Like Animals'. *New York Times*.

Bump, P. (2017). There's no evidence that Trump's inauguration was the most-watched in history. Period. - *The Washington Post*.

Gregory, S. M. R., Sanchez; Barbara, Rosenberg. (2007). Brazil's Response to the Judicialized WTO Regime: Strengthening the State through Diffusing Expertise *ICTSD South America Dialogue on WTO Dispute Settlement and Sustainable Development*.

Guardian, T. (2018). Trans-Pacific trade pact revived despite Trump withdrawal | World news | *The Guardian*.

Hermann, M. G. (1980). Explaining Foreign Policy Behavior Using the Personal Characteristics of Political Leaders. *International Studies Quarterly, 24(1)*, 7-46. doi: 10.2307/2600126

Jazeera, A. (2018). Profile: Recep Tayyip Erdogan. *Al Jazeera*.

Keck, M. L. (2019). A new foreign policy: beyond American exceptionalism. *Choice: Current Reviews for Academic Libraries, 56(7)*, 930-930.

- kompas, i. (2018a). Ancaman Perang Dagang – Kompas.Id. *Kompas.Id.*
- kompas, i. (2018b). Dunia Tak Seindah Instagram – Kompas.Id. *Kompas.Id.*
- Kuo, L. (2018). China files complaint to WTO over Trump’s \$200bn tariff plan. *the Guardian.*
- Marcus, J. (2018). Duterte’s brutal drug war finally gets the International Criminal Court’s attention. *VICE News.*
- News, B. B. C. (2017). Why do Duterte’s supporters love him? *BBC News.*
- Prasetyantoko, A. (2018). Mengantisipasi Perang Dagang – Kompas.Id. *Kompas.Id.*
- Smedley, T. (2013). Patent wars: has India taken on Big Pharma and won? *the Guardian.*
- Wang, C. (2018). Trump to impose 30 percent tariff on solar cell imports. *CNBC.*

Laman Web, Koran Cetak, Artikel Daring

- ‘The Apprentice’ star Donald Trump to NBC: You can’t fire me, I quit - Reality TV World. (2007b, 2007). from <https://www.realitytvworld.com/news/the-apprentice-star-donald-trump-nbc-you-cant-fire-me-i-quit-5200.php>
- files/519/the-apprentice-star-donald-trump-nbc-you-cant-fire-me-i-quit-5200.html
- Arab Saudi Melunak, Qatar Belum Yakin. (2019, 2019/12/11/02:26:25 2020/02/01/02:49:01). *Kompas.id.* from <https://kompas.id/baca/utama/2019/12/11/arab-saudi-melunak-qatar-belum-yakin/>
- BBC. (2014c). Why is Ukraine in Turmoil. Retrieved 19, 2020, from <http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-25182823>
- BBCNews. (2019). US proposes tariffs on EU cheese and wine.
- Britannica.com. (2019). Turkey - Constitution.
- Charting the US-China trade battle. (2019).

- correspondent, H. E.-P. S.-e. A. (2018a, 2018/12/19/T10:50:53.000Z). Duterte's Philippines drug war death toll rises above 5,000, *the Guardian*. Retrieved from <https://www.theguardian.com/world/2018/dec/19/dutertes-philippines-drug-war-death-toll-rises-above-5000>
files/634/dutertes-philippines-drug-war-death-toll-rises-above-5000.html
- correspondent, H. E.-P. S.-e. A. (2018b, 2018/12/04/T04:39:16.000Z). Philippines president Duterte, architect of 'war on drugs', jokes about smoking pot, *the Guardian*. Retrieved from <https://www.theguardian.com/world/2018/dec/04/philippines-president-duterte-architect-of-war-on-drugs-jokes-about-smoking-pot>
files/644/philippines-president-duterte-architect-of-war-on-drugs-jokes-about-smoking-pot.html
- correspondent, H. E.-P. S.-e. A. (2018c, 2018/10/23/T14:17:36.000Z). Philippines: Duterte faces first serious dip in popularity ratings, *the Guardian*. Retrieved from <https://www.theguardian.com/world/2018/oct/23/philippines-rodrigo-duterte-dip-popularity-ratings>
files/646/philippines-rodrigo-duterte-dip-popularity-ratings.html
- Erdoganism and Turkey's new prime minister. (2016, 2016/05/23/T15:44:00+00:00
2019/09/08/07:07:26). *Middle East Monitor*. from <https://www.middleeastmonitor.com/20160523-erdoganism-and-turkeys-new-prime-minister/>
- France-Presse, A. (2017). Trump warned on Duterte fist salute in Manila.
- Ip, G. (2015, 2015/12/09/T17:49:00.000Z). As the Gig Economy Changes Work, So Should Rules, *Wall Street Journal*. Retrieved from <https://www.wsj.com/articles/as-the-gig-economy-changes-work-so-should-rules-1449683384>

- Kami, I. M. (2018, 2019/09/05/04:13:09). Kronologi 4 Aksi Protes Rompi Kuning yang Bikin Prancis Bergejolak. *detiknews*. Retrieved 05/09, 2019, from <https://news.detik.com/internasional/d-4335354/kronologi-4-aksi-protes-rompi-kuning-yang-bikin-prancis-bergejolak>
- Koestanto, B. D. (2020). Qatar Miliki Perdana Menteri Baru, *Kompas*. Retrieved from <https://kompas.id/baca/internasional/2020/01/29/qatar-miliki-perdana-menteri-baru/>
- kompas, i. (2018c). Hikmah di Balik Perang Dagang AS-China – Kompas.Id. *Kompas.Id*.
- kompas, i. (2018d). Perang Dagang Belum Usai – Kompas.Id. *Kompas.Id*.
- kompas, i. (2018e). Perang Dagang, Perang Tarif – Kompas.Id. *Kompas.Id*.
- kompas, i. (2018f). Trump Peringatkan Harley-Davidson soal Pemindahan Pabrik – Kompas.Id. *Kompas.Id*.
- kompas.id. (2017, 2017/05/03/03:00:00 2019/09/05/03:43:40). Pengangguran, Masalah Utama Perancis. *Kompas.id*. from <https://kompas.id/baca/internasional/2017/05/03/pengangguran-masalah-utama-perancis/>
- Kompas.id. (2018, 2018/11/22/). Magang Atasi Kesenjangan, *Kompas Gramedia*.
- Oegroseno, A. H. (2018, 2018/06/04/). Ideologi Antisawit Eropa, *Kompas Gramedia*.
- Özkırmılı, U. (2019, 2019/07/24/T05:00:04.000Z). There's hope for democracy in Turkey – but it needs help | Umut Özkırmılı, *The Guardian*. Retrieved from <https://www.theguardian.com/commentsfree/2019/jul/24/hope-democracy-turkey-istanbul-mayoral-election>
- Presiden Filipina Rodrigo Duterte menyebut bahwa Tuhan itu 'goblok'. (2019).

- Rahman, M. A. (2019, 20-12). Saudi-Qatar Sepakati Tiga Butir Tuntutan, *Kompas*. Retrieved from <https://kompas.id/baca/utama/2019/12/20/saudi-qatar-sepakati-tiga-butir-tuntutan/ResetDoc>. (2019). Duterte, the Most Loved by Filipinos.
- Reuters, E. (2019). Survey shows Filipinos more satisfied with Duterte government than.
- Silicon or Soy? Targets of the U.S.-China Trade War. (2019).
- Timberman, D. G. (2019). Philippine Politics Under Duterte: A Midterm Assessment: Carnegie Endowment for International Peace.
- Wetzler, M. (2017). Event Data: The Root of All Analytics | Transforming Data with Intelligence.

Lain-lain

Thesis

- Winanti, P. S., & Puspitarini, R. C. (2016). *POLITIK INKONSISTENSI AS DALAM UPAYA MENGATASI PEMANASAN GLOBAL: HAMBATAN TARIF PRODUK PANEL SURYA*. Universitas Gadjah Mada.

Uncategorized References

- Allison, R. (1999). The Military and Political Security Landscape in Russia and the South *Russia, The Caucasus and Central Asia: 21st Security Environment* (pp. 27-28). New York: EastWest Institute.
- 'The Apprentice' star Donald Trump to NBC: You can't fire me, I quit - Reality TV World. (2007a).
- BBC (Producer). (2014a, Februari 22). Ukraine crisis: Opposition asserts authority in Kiev. *BBC NEWS*. Retrieved from <http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-26299670>
- BBC (Producer). (2014b, February 22). Why is Ukraine in Turmoil. *BBC NEWS*. Retrieved from <http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-25182823>

- BBC NEWS. (2014, February 26). *Ukraine Crisis: Rival Rallies of protesters in Crimea*. Retrieved from <http://m.bbc.com/news/world-europe-26353824#>
- Bennet, D. (Producer). (2014, March 1). Russian Troop Convoy on Road to Crimea's Capital. *ABC News*. Retrieved from http://abcnews.go.com/International/wireStory/crimean-leader-claims-control-asks-putin-22729336?_ga=1.20388600.1532520994.1393844868
- Charter, C. J., Magnay, D., & Eastwood, V. (Producer). (2014, March 2). Ukraine Mobilizes Troops amid crisis with Russia. *CNN.COM*. Retrieved from <http://cnn.com/ukraine-mobilizes-troops-amid-crisis-with-russia>
- Crimean Tatars deported by stalin rally against putin in crimea. (2014, Februari 27). *Businessweek*. Retrieved from <http://www.businessweek.com/news/2014-02-27/crimean-tatars-deported-by-stalin-rally-against-putin-in-crimea>
- DÜLLINGS, C. (2013). Charakteranalyse Angela Merkel: die Titelvorteiligerin. Retrieved 20, 2020, from <http://www.empathie-lernen.de/angela-merkel-charakteranalyse>
- Freidman, G. (Producer). (2014, February 24). Geopolitical Weekly : Ukraine Turns From Revolution to Recovery. *Stratfor Global Intelligence*. Retrieved from http://www.stratfor.com/weekly/ukraine-turns-revolution-recovery?utm_source=freelist-f&utm_medium=email&utm_campaign=20140225&utm_term=Gweekly&utm_content=readmore
- Ioffe, J. (Producer). (2014, March 1). Putin's War in Crimea Could Soon Spread to Eastern Ukraine. *New Republic News*. Retrieved from http://www.newrepublic.com/article/116810/putin-declares-war-ukraine-and-us-or-nato-wont-do-much?_ga=1.41361378.1532520994.1393844868
- Kocaman, Ö. (2007). Russia's relations with Georgia in the South Ossetian conflict. *Cilt:2, Sayı: 3, ss. 1-27, 2007, 1-27*.

- Lally, K. (Producer). (2014, March 1). Russian forces in Ukraine: What Does the Black Sea Fleet in Crimea look like with Mark Galeotti. *Washington Post*. Retrieved from http://www.washingtonpost.com/world/europe/russia-decides-to-send-troops-into-crimea-what-does-the-black-sea-fleet-look-like/2014/03/01/38cf005c-a160-11e3-b8d8-94577ff66b28_story.html
- LeVine, S. (Producer). (2014, March 1). How Putin surprised the world after losing the war in Ukraine. *Quartz Report*. Retrieved from <http://qz.com/182964/how-putin-surprised-the-world-in-ukraine-after-losing-the-war/>
- Lionel, B., & Guy, C. (2020). Angela Merkel warns EU: 'Brexit is a wake-up call'.
- Lowrey, A., & Gordon, M. R. (Producer). (2014, February 26). Policy Makers Devise Plans to Provide Money to Kiev. *The New York Times*. Retrieved from <http://mobile.nytimes.com/2014/02/27/world/europe/policy-makers-devise-plans-to-provide-money-to-kiev.html?-r=0&referrer=>
- Russia G8 status at risk over 'incredible act of aggression' in Crimea, says Kerry. (2014, March 2). *theguardian*. Retrieved from <http://www.theguardian.com/world/2014/mar/02/john-kerry-russia-putin-crimea-ukraine>
- Rym, M. (2020). Merkel sees post-Brexit UK as 'potential competitor' to EU. Retrieved 23, 2020, from <https://www.politico.eu/article/angela-merkel-sees-post-brexit-uk-as-potential-competitor-to-eu-emmanuel-macron/>
- Telephone conversation with US President Barack Obama. (2014 March 2). *President of Russia*. Retrieved from <http://eng.kremlin.ru/news/6752>
- Trenin, D. (1996). *Russia's Security Interest and Policies in the Region*. Brussels: VUB Press.
- Tucker, J. (Producer). (2014, February 28). 5 reasons I am surprised the crisis in Crimea is escalating so quickly. *The Washington Post*

: *Monkey Cage*. Retrieved from <http://www.washingtonpost.com/blogs/monkey-cage>

Ukraina Butuh Tunai 35 Miliar. (2014). Jakarta: Koran Kompas.

Ukraine's crisis : the tale of two countries. (2014, March 1). *the Economist*. Retrieved from <http://www.economist.com/blogs/eastern-approaches/2014/02/ukraines-crisis>

Ukraine crisis: Turchynov warns of 'separatism' risk. (2014, February 25). *BBC NEWS*. Retrieved from <http://www.bbc.com/news/world-europe-26333587>

Ukraine MPs call on ICC to try Yanukovich for crimes against humanity. (2014, February 25). *Euronews*. Retrieved from <http://www.euronews.com/2014/02/25/ukraine-mps-call-on-icc-to-try-yanukovich-for-crimes-against-humanity/>

Welt.de. (2015). Angela Merkel ist der wachsame Typ. Germany. Retrieved 22, 2020, from <https://www.zeit.de/karriere/beruf/2015-07/peoenlichkeitstypen-profiling/seite-2>



BIODATA PENULIS



Renny Candradewi Puspitarini, M.A. Lahir di Kota Probolinggo dan menghabiskan masa remajanya di kota yang sama. Gelar sarjana ia peroleh setelah menyelesaikan studi di Departemen Hubungan Internasional Universitas Airlangga, Surabaya pada 2012. Pada 2012-2013 ia bekerja sebagai *Corporate Communication Specialist* di Departemen *Corporate Communication* PT Lion Superindo Jakarta, Grup Delhaize, Belgia. Setelah itu, ia meneruskan bekerja di *trading* (ekspor) di salah satu perusahaan ekspor impor di Surabaya selama setahun. Pada September 2014, ia kemudian meneruskan studi di jurusan ilmu hubungan internasional, peminatan diplomasi perdagangan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Ia berhasil menyelesaikan studi dan mendapat gelar *Master of Arts (M.A.)* pada bulan April 2016. Pada Oktober 2017, ia kemudian mulai mengajar sebagai dosen di Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Panca Marga Probolinggo sampai sekarang. Mata kuliah yang diampu antara lain Kebijakan Politik Internasional, Teori Pembangunan, *Sustainable Development*, dan Manajemen Pelayanan Publik. Selain mengajar, penulis juga melakukan penelitian yang telah dipublikasikan antara lain di Jurnal Expose President University, Jurnal Politea IAIN Kudus, dan Jurnal Indonesian Tourism and Development Universitas Brawijaya. Pada tahun 2019, ia mendapat hibah penelitian Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Kementerian Riset dan Teknologi/ BRIN skim Penelitian Dosen Pemula (PDP) dengan judul Hubungan Job Insecurity dan Network-Based Control terhadap Eksploitasi Pengemudi Angkutan Daring. Saat ini dipercaya kembali mendapatkan hibah penelitian dengan skim yang sama tahun pelaksanaan 2020.

